

23

16

SOSIOLOGI DEVIASI

(SEBUAH KAJIAN DARI SUDUT PANDANG PENDIDIKAN,
SOSIOLOGI, DAN FILSAFAT)



IBNU SYAMSI



VENUS GOLD Press

Penulis

Ibnu Syamsi

Penyunting

Ibnu Syamsi

Cetakan I, Oktober 2010

Desain Cover

VG

Tata Letak

Jaelani.M

Penerbit

Venus Gold Press

Jl. Panti Wredha No 1, UH7 RT13 RW 5

Ponggalan, Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta

Telp/Fax: 0274-410198

E-mail : venus_goldoffset@yahoo.co.id

Pencetak:

CV. Venus Gold Offset

DAFTAR ISI

BAB IV : DEVIASI DIPANDANG SEBAGAI	BAB	IV
TINGKAH LAKU MANUSIA YANG		
MELANGGAR NORMA.....		
PANDANGAN TRADISIONAL	BAB	V
DAN MODERN TENTANG DEVIASI.....		
HALAMAN JUDUL.....		i
KATA PENGANTAR.....		iii
DAFTAR ISI.....		v
BAGIAN PERTAMA : HAKEKAT DEVIASI		
BAB I : PENDANGAN TENTANG DEVIASI.....		1
A. Studi Deviasi Sebagai Kajian Aktual, Mandiri Dan Menarik		
.....		13
B. Pandangan Normatif Dan Relativistik Tentang Deviasi.....		26
C. Proses Menjadi Devian.....		38
BAB II : SEJARAH PERKEMBANGAN STUDI DEVIASI.....		44
A. Makna Sejarah Deviasi.....		44
B. Periode Patologi Sosial.....		45
C. Periode Disorganisasi Sosial.....		47
D. Periode Normatif.....		53
E. Periode Relativistik.....		55
BAB III : METODE PENELITIAN STUDI DEVIASI.....		61
BAGIAN KEDUA :		
KAJIAN DEVIASI SOSIAL DITINJAU		
DARI PERSPEKTIF TRADISIONAL		

BAB	IV	: DEVIASI DIPANDANG SEBAGAI TINGKAH LAKU MANUSIA YANG MELANGGAR NORMA.....	73
BAB	V	: PANDANGAN TRADISIONAL DAN MODERN TENTANG DEVIASI.....	96
BAB	VI	: TEORI FUNGSIONALISME.....	110
BAB	VII	: TEORI ANOMIE.....	113
	A.	Teori Kesenjangan Tujuan-Cara.....	113
	B.	Teori Frustasi Status.....	118
	C.	Teori Defferensial Illegitimate Opportunity.....	120
BAB	VIII	: TEORI ASOSIASI DEVERENSIAL.....	129
	A.	Makna Teori Asosiasi Deferensial.....	129
	B.	Teori Deferensial Identifikasi.....	133
	C.	Teori Deferensial Reinforcement.....	134
BAB	IX	: TEORI KONTROL SOSIAL.....	138
BAB	X	: TEORI IKATAN PADA MASYARAKAT.....	144
	A.	Makna Sejarah Deviasi.....	144
	B.	Perkembangan Teori Sosial.....	145
	C.	Periode Disorganisasi Sosial.....	147
	D.	Periode Normatif.....	153
	E.	Periode Relativistik.....	155
	BAGIAN KETIGA: STUDI DEVIASI SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MODERN.....		147
BAB	XI	: TEORI LABEL.....	147
	A.	Pengantar Teori Label.....	147
	B.	Siapa Memberi Label Kepada Siapa ?.....	153
	C.	Akibat Dari Pe label-an.....	154
	D.	Pihak Yang Dicap atau Dilabel.....	154
	E.	Pihak Yang Mencap atau Melabel.....	156

BAB XII : TEORI FENOMENOLOGI.....	163
A. Pengertian Teori fenomenologi.....	163
B. Fenomenologi Sebagai Metode Ilmu.....	186
C. Kontribusi Fenomenologi Terhadap Dunia Ilmu Pengetahuan 	189
D. Kritik Terhadap Fenomenologi.....	191
BAB XIII : TEORI KONFLIK.....	199
A. Teori Konflik Dari Kari Marx Dan Rolf Dahrendorf.....	199
B. Teori Unsur-Unsur Kriminalitas	205
C. Teori Realitas Hukum.....	206
D. Teori Realitas Sosial Kejahatan.....	207
DAFTAR PUSTAKA.....	213

BAB I PENDAHULUAN

Buku dengan judul Sosiologi Deviasi ini ditulis untuk membantu masyarakat dan para pembaca dalam memahami perilaku manusia dalam pergaulannya dengan individu atau kelompok lain yang secara umum dipandang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Buku dengan judul Sosiologi Deviasi ini pada masa yang lalu bernama Patologi Sosial dan masyarakat sudah mengenal dan sangat populer dengan nama Patologi Sosial. Saat ini dikenal dengan nama Sosiologi Deviasi dan nama ini sudah mulai dikenal juga dalam masyarakat. Kajian Sosiologi Deviasi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat serta sub-sub kelompok yang ada dalam masyarakat.

Perilaku manusia yang menyimpang dari norma masyarakat ini dipelajari melalui perspektif sosiologi. Sama halnya dengan perilaku ekonomi, politik, agama, perilaku pendidikan atau perilaku dalam keluarga, maka deviasi sebagai bidang studi dipelajari dengan perspektif sosiologi. Oleh karena itu, Theodorson dalam *dictionary of sociology modern* kajian tentang perilaku manusia yang menyimpang ini disebut sebagai *Sociology of deviant behavior*, yaitu sosiologi khusus yang

mempelajari perilaku manusia yang menyimpang dari norma sosial. Dalam wilayah kajian ini, norma dan perilaku manusia dianalisis dengan patokan-patokan norma yang selalu berkembang dalam masyarakat.

Kajian deviasi dari sudut pandang sosiologi ini dipandang masih relatif baru, sehingga oleh Ritzer, sosiologi sering disebut memiliki paradigma ganda. Ganda karena terdapat konsep yang kurang jelas atau kabur. Disebut berparadigma ganda karena sosiologi dalam setiap memandang fenomena sosial yang terjadi mempunyai beberapa paradigma dimana setiap paradigma mempunyai pendefinisian, *exemplar*, teori-teori, metode-metode dan ahli pemikir yang berbeda pula. Perbedaan paradigma ini disebabkan oleh faktor perbedaan pandangan filsafat yang mendasari pemikiran masing-masing para ahli yang merintisnya, perbedaan filsafat ini yang membawa konsekuensi terhadap perbedaan teori-teori yang dibangun pada masing-masing paradigma, dan pada akhirnya metode yang dipakai memahami dan menerangkan subyek-maternyapun sangat berbeda. Memang sejak lahir dan berkembangnya ilmu sosiologi ini sangat syarat dengan pergolakan intern yang menegangkan pada ahli dan tokoh-tokoh penganutnya. Jadi inilah yang disebut Ritzer sebagai *A Multiple Paradigm Science*.

Demikian pula halnya dengan kajian perilaku manusia yang dipandang menyimpang secara norma umum masyarakat dapat dipandang dari berbagai sudut pandang oleh berbagai ahli dalam waktu dan tempat tertentu. Munculnya berbagai perbedaan pandangan tentang deviasi sebagai sebuah kajian keilmuan ini, misalnya dapat dilihat dengan fenomena itu sendiri seperti masalah sosial yang diwujudkan dalam kemiskinan, pengangguran, kriminalitas atau perilaku deviasi yang masing-masing dapat dianalisis keterkaitannya sehingga membentuk sebuah konsep atau teori tertentu. Buku pegangan kuliah ini disajikan dalam bentuk konseptual/teori-teori dan dilengkapi dengan contoh-contoh aktual agar memotivasi dan meningkatkan analisa kritis mahasiswa dalam mempelajari deviasi sosial sebagai pengembangan wawasan terhadap fenomena. Oleh karena itu, buku yang diperuntukan untuk masyarakat dan pegangan kuliah atau buku ajar ini berisi tentang deviasi sosial sebagai sebuah kajian yang aktual, mandiri dan menarik, pandangan normatif dan relativistik tentang deviasi sosial, proses menjadi devian, sejarah perkembangan studi deviasi sebagai sebuah kajian, metode-metode penelitian tentang deviasi, teori-teori dari perspektif tradisional seperti teori anomie, teori frustrasi status, teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial dengan berbagai

versinya. Selanjutnya teori-teori deviasi sosial dari perspektif modern seperti teori label, teori fenomenologi dan teori power atau konflik.

Mempelajari perilaku manusia yang menyimpang terhadap norma sebagai fenomena dari sudut pandang sosiologis menjadi bermakna apabila digunakan sebagai cermin untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial yang diakui dan berkembang dalam masyarakat pada umumnya. Perilaku manusia baik yang menyimpang dari norma atau tidak adalah perilaku manusia biasa, dengan mekanisme yang relatif sama. Oleh karena itu, ada baiknya dalam belajar tentang deviasi sosial ini juga dilatihkan bagaimana berperilaku sebagaimana yang dimanifestasikan oleh masyarakat. Sementara mempelajari individu yang berperilaku menyimpang, sehingga memiliki kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya adalah sebuah pengalaman belajar tentang kehidupan masyarakat lain dan bagaimana belajar hidup berdampingan dan bersama individu yang berlatar belakang berbeda sama sekali.

Adapun tujuan mempelajari sosiologi deviasi ini adalah (1) membantu para pembaca untuk dapat mengerti dan memahami jenis-jenis masalah sosial, kriminalitas dan deviasi sosial dan keterkaitannya dalam perspektif sosiologi, (2)

membantu para pembaca dalam memahami perbedaan cara dalam mencapai tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial dan individu, (3) membantu para pembaca dalam menganalisis penyebab , jumlah, akibat, kapan dan siapa hingga terjadinya sebuah pelanggaran norma, (4) memahami teori-teori sosiologis yang dapat digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis deviasi sosial, (5) membantu para pembaca dan pihak-pihak lain dalam mencari solusi atas permasalahan sosial sebagai akibat terjadinya kriminalitas dan penyimpangan norma sosial, (6) membantu para pembaca dalam melakukan peran sosialnya sebagai anggota masyarakat yang selayaknya berperilaku sesuai norma yang ada dan berkembang di masyarakat.

Mengingat isi materi buku ini lebih teoritis dengan konsep-konsep sosiologisnya maka pendalaman materi dengan berbagai ilustrasi atau contoh-contoh aktual, tematik dan kontekstual akan dilakukan dalam proses pembelajarannya dan kehidupan bermasyarakat. Materi buku ini meramu berbagai macam konsep tentang sosiologi deviasi, baik konsep tradisional maupun konsep modern. Aplikasi dari konsep deviasi ini akan dapat membantu menyelesaikan persoalan hidup secara individual maupun kelompok.

Untuk mempelajari deviasi sosial dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu (1) Secara topikal, yaitu dengan menyajikan topik-topik yang sedang aktual sesuai dengan konteks kajian masalah sosial, deviasi maupun kriminalitas, (2) Secara teoritikal, yaitu dengan menyajikan teori atau konsep-konsep dalam perspektif sosiologi yang relevan dengan kajian-kajian deviasi dalam kaitannya dengan masalah sosial atau kriminalitas, (3) Secara mandiri, yaitu pemahaman terhadap konsep, topik dan analisa kritisnya dapat dilakukan dengan melakukan telusur melalui internet yang saat ini begitu banyak tersedia. Ketiga cara ini dapat mengembangkan teori-teori deviasi yang ada dan dianalisis secara tajam dan mendalam.

Studi deviasi dari perspektif sosiologi ini memiliki sifat kausalita, memaknai fenomena dengan berdasarkan analisis sebab akibat, empirik diskriptif, yaitu menggambarkan fenomena atas dasar realitas, fakta, hal-hal yang dapat diamati sebagaimana adanya. Selain itu, kajian deviasi sosial menjadi semakin menarik untuk dipelajari sebagai studi yang mandiri karena ruang lingkupnya luas yang mencakup individu, kelompok, masyarakat luas atau bahkan di berbagai institusi sosial, seperti lembaga kemasyarakatan, norma atau pranata sosial. Dalam sosiologi deviasi ini, fenomena yang terjadi dalam

masyarakat akan dianalisis dengan mencari sebab akibat akar permasalahan.

Bila seorang awam memaknai sebuah perilaku manusia menyimpang maka akan muncul jenis-jenis penyimpangan yang diketahui sebagaimana yang dipahami, diamati atau bahkan dialami baik oleh diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Orang awam lebih memaknai perilaku menyimpang, seperti homoseksualitas, *drugs addict* atau penyalahgunaan narkotika, alkoholik atau minuman keras, prostitusi, pembunuhan, kejahatan, lesbian, kenakalan remaja, sakit jiwa atau *mentally ill*, komunis, aliran sesat, murtad dan teroris. Akan tetapi akan berbeda apabila pemaknaan deviasi sosial itu berasal dari pemahaman para ahli.

Menurut para ahli, deviasi sosial dapat dipahami dengan dua perspektif, yaitu perspektif sosiologi yang tradisional dan modern. Menurut mereka deviasi sosial, yaitu (1) Dinitz, Dynes and Clark (1964 an) mengatakan, *regardless of the specific content of behavior, the essential nature of deviance lies in the departure of certain society at a particular time.* (2) Clinard (dalam buku *sociology of deviant behavior*) mengatakan, *deviant behavior is essentially a violation of certain types of group-norms; a deviant set is behavior which is procribed in certain way only there deviations in which behavior is in a*

disapproved direction and of sufficient degree to exceed the tolerance limit of the community, constitute deviant behavior as it will be used here.(3) Matza mengatakan, *according to any standard dictionary still the last source of clearly stated nominal definitions to deviate is to stray as from apart or standard.*

Maksud dari definisi-definisi di atas adalah (1) Deviasi pada hakekatnya adalah penyimpangan dari jenis-jenis tingkah laku yang sesuai dengan norma yang terdapat dalam masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu. (2) Tingkah laku devian pada hakekatnya adalah penyimpangan norma pada kelompok. Tingkah laku deviasi ini dikarenakan dalam penyimpangan tingkah laku tertentu yang tidak disetujui masyarakat dan melampaui batas-batas toleransi masyarakat tertentu. (3) Tingkah laku deviasi adalah penyimpangan terhadap standard. Ketiga definisi ini berpandangan sama terhadap penyimpangan norma, definisi ini menilai tingkah laku dari standarisasi norma.

Inti pengertian dari deviasi adalah penyimpangan terhadap norma atau *norm violation*. Intinya adalah setiap perilaku individu yang melampaui batas- batas toleransi adalah devian, misalnya penjudi, pemabuk, kedua unsur ini di masyarakat kita dianggap menyimpang juga bunuh diri, membunuh, merampok atau jenis-jenis perilaku menyimpang

yang lainnya sebagaimana disebutkan kelompok awam. Pakar-pakar di atas termasuk penganut aliran tradisional atau kaum normatif.

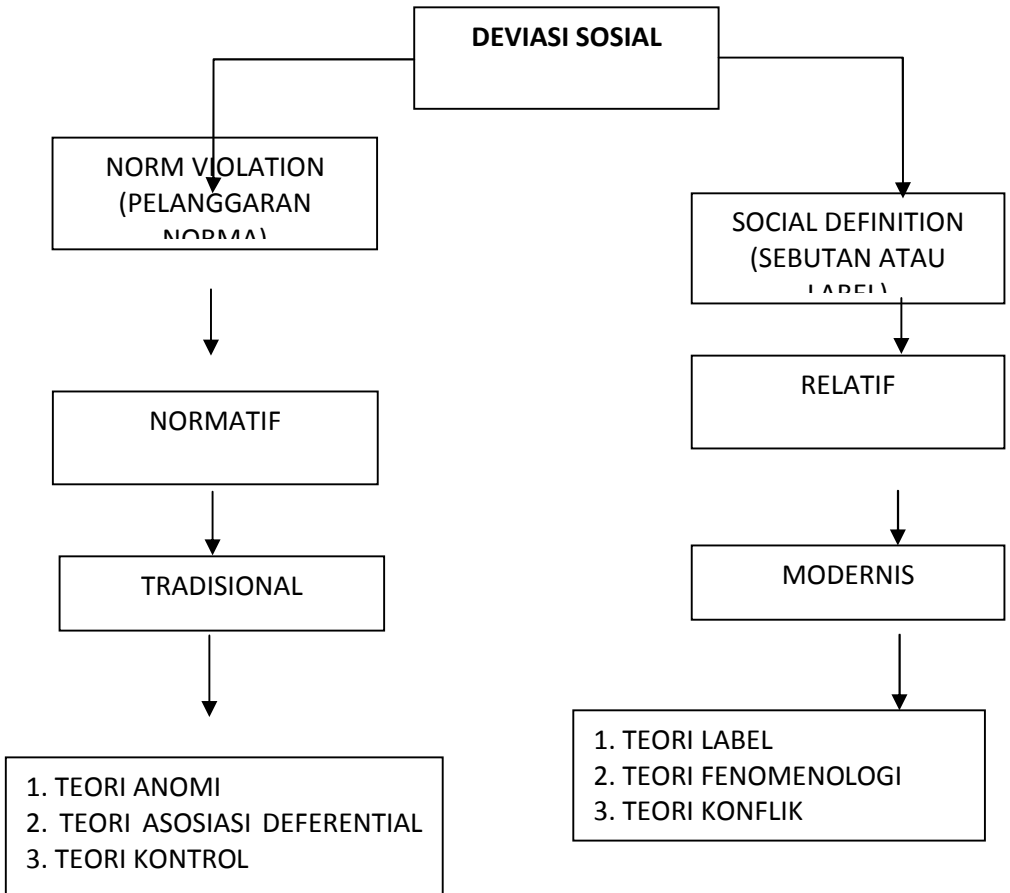
Sebaliknya oleh kelompok modernis juga megutarakan pengertian deviasi secara relatif sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh ahli-ahli berikut ini. Dalam pandangannya deviasi sosial, yaitu menurut (1) Becker (dimunculkan sekitar tahun 1963 dalam bukunya Clinard Marshal dengan judul *Sosiology of Deviant Behavior*) menyatakan bahwa *deviant is one to whom what label has successfully. Deviant behavior is that people so label.*(2) Devian adalah orang yang mendapat label demikian. Tingkah laku yang demikian itu adalah devian atau tidak tergantung siapa memberi cap pada orang atau kelompok itu, seperti cap sosial sebagai koruptor, anak nakal, bandel, teroris, aliran sesat dan sebagainya. (3) Schur (sekitar tahun 1971 dalam Clinard Marshal) menyatakan, bahwa *human behavior is deviant to the extent that it comes to be viewed as involving an personal discreditable departure from a group's normative expectations and it, interpersonal or collective reaction that serve to isolate, treat, or punish individual engaged in such behavior.*

Dalam pandangan ini, tingkah laku yang dianggap discredit, jadi deviasi adalah sebutan yang diberikan oleh

masyarakat kepada orang atau kelompok lain yang bertingkah laku demikian. Oleh karena itu, terdapat konsep sebutan, cap sosial atau *social definition* atau label, maka kecenderungan orang berpikir bahwa tingkah laku devian itu tidak ada, sebaliknya deviasi hanya sebatas sebutan atau label saja atau tuduhan terhadap orang yang melakukan tingkah laku tertentu. Misalnya ketika sedang terjadi ujian akhir semester, terdapat dua orang dalam kelas itu menyontek dan salah satu diantaranya tertangkap maka secara normatif anak ini deviasi, tetapi seorang lain yang tidak tertangkap tidak dianggap salah atau devian, padahal keduanya sudah melakukan pelanggaran norma ujian di kelas atau bila ujian itu memang ujian tulis yang tertutup.

Secara garis besar, deviasi sosial dapat diartikan sebagai (1) *norm violation* atau pelanggaran terhadap norma, seperti norma keluarga, ekonomi, politik, agama dan atau pendidikan, dan ke (2) sebagai *social definition* atau sebutan sosial, label sosial. Pemaknaan deviasi dengan dua cara tersebut memiliki konsekuensi pandangan yang berbeda dalam teori-teorinya. Berikut ini adalah bagan kedua pandangan dengan teori-teori yang memperkuat makna deviasi baik sebagai *norm violation* maupun *social definition*.

BAGAN KONSEP DEVIASI SOSIAL



Kelompok tradisional berkembang pada periode ketiga dan pemikiran kaum modernis berkembang pada periode keempat. Adapun perkembangan keilmuan kajian deviasi sebagai ilmu yang mandiri melalui periodisasi sebagai berikut,

yaitu (1) Periode pertama dengan paradigma patologi sosial, (2) Periode kedua disebut sebagai periode disorganisasi sosial, (3) Periode ketiga disebut periode normatif, dan (4) Periode keempat disebut sebagai periode relatif. Secara lebih lengkap, kajian atau studi deviasi sebagai studi yang aktual, mandiri dan menarik akan disajikan pada bab-bab selanjutnya.

Ringkasan

1. Buku dengan judul Sosiologi Deviasi ini ditulis untuk membantu masyarakat dan para pembaca dalam memahami perilaku manusia dalam pergaulannya dengan individu atau kelompok lain yang secara umum dipandang menyimpang dari norma-norma masyarakat.
2. Perilaku manusia yang menyimpang dari norma masyarakat ini dipelajari melalui perspektif sosiologi.
3. Kajian deviasi dari sudut pandang sosiologi ini dipandang masih relatif baru, sosiologi sering disebut memiliki paradigma ganda.
4. Demikian pula halnya dengan kajian perilaku manusia yang dipandang menyimpang secara norma umum masyarakat dapat dipandang dari berbagai sudut pandang oleh berbagai ahli dalam waktu dan tempat tertentu.

5. Perilaku manusia baik yang menyimpang dari norma atau tidak adalah perilaku manusia biasa, dengan mekanisme yang relatif sama.
6. Tujuan mempelajari sosiologi deviasi ini adalah membantu para pembaca untuk dapat mengerti dan memahami jenis-jenis masalah sosial, kriminalitas dan deviasi sosial dan keterkaitannya dalam perspektif sosiologi.
7. Isi materi buku ini lebih teoritis dengan konsep-konsep sosiologi, maka pendalaman materi dengan berbagai ilustrasi aktual, tematik dan kontekstual akan dilakukan dalam proses pembelajarannya dan kehidupan bermasyarakat.
8. Untuk mempelajari deviasi sosial dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu secara topikal, teoritikal, dan mandiri.
9. Studi deviasi dari perspektif sosiologi ini memiliki sifat kausalita, memaknai fenomena dengan berdasarkan analisis sebab akibat, empirik diskriptif.
10. Bila seorang awam memaknai sebuah perilaku manusia menyimpang maka akan muncul jenis-jenis penyimpangan yang diketahui sebagaimana yang dipahami, diamati atau bahkan dialami baik oleh diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya.

11. Deviasi sosial dapat dipahami dengan dua perspektif, yaitu perspektif sosiologi yang tradisional dan modern.
12. Inti pengertian dari deviasi adalah penyimpangan terhadap norma atau *norm violation*.
13. Kelompok modernis juga megutarakan pengertian deviasi secara relatif sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh ahli-ahli.
14. Tingkah laku dianggap discredit apabila sebutan yang diberikan oleh masyarakat kepada orang atau kelompok lain yang bertingkah laku demikian.
15. Secara garis besar, deviasi sosial dapat diartikan sebagai *norm violation* dan sebagai *social definition* atau sebutan sosial, label sosial.
16. Perkembangan keilmuan kajian deviasi sebagai ilmu yang mandiri melalui periodisasi sebagai berikut, periode pertama paradigma patologi sosial, periode kedua disorganisasi sosial, periode ketiga normatif, dan periode keempat disebut sebagai periode relatif.

BAB II

STUDI DEVIASI SEBAGAI KAJIAN AKTUAL, MANDIRI DAN MENARIK

Deviasi sosial sebagai sebuah kajian yang aktual, mandiri dan menarik oleh karena studi ini mengalami perkembangan dalam cara berpikir terhadap fenomena hingga menjadi kajian yang menarik khususnya dari perspektif sosiologis yang memunculkan periode-periode sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu. Sebagai kajian yang aktual oleh karena jenis-jenis perilaku yang dipandang telah melampaui batasan norma sebagaimana dimanifestasikan atau diharapkan atau diinginkan masyarakat, semakin jelas ditampilkan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas, sekaligus tidak jelas oleh karena batasan norma yang semakin kabur. Paradigma ini menunjukkan bahwa ambiguitas norma dari pandangan masyarakat pada umumnya adalah sangat tinggi.

Terdapat tiga terminologi dalam konsep deviasi atau *deviation* atau disebut penyimpangan pada umumnya lebih menekankan pada prosesnya; kedua *deviance* lebih dikategorikan sebagai obyek studi dari sosiologi deviasi yang sering dikontraversikan dengan konformitas serta ketiga adalah konsep deviant adalah individu yang melakukan penyimpangan terhadap norma. Ke tiga konsep atau terminologi tersebut

sering digunakan untuk membedakan siapa, bagaimana deviasi terjadi dan akibat apa saja yang dapat ditimbulkan oleh karena deviasi. Dalam konteks ini maka dalam menganalisis, membahas fenomena deviasi sebagai sebuah kajian akan menjadi lebih menarik, luas dan menjadi hal yang menarik untuk dipelajari sebagai solusi akan pemilihan tingkah laku yang baik atau tidak.

Apabila studi deviasi sosial ini menjadi cabang dari sosiologi khusus dari ilmu sosiologi maka analisis yang kausalitas, empirik deskriptif, maka fenomena deviasi ini tidak bisa lepas dari pembahasan tentang norma sosial, struktur dan proses sosial, unsur-unsur penting yang selalu dipahami sebagai unsur yang sangat berpengaruh terhadap terjadi tidaknya sebuah pelanggaran norma pada individu, kelompok maupun masyarakat pada umumnya.

Setiap masyarakat selalu memiliki ketiga unsur karena dengan demikian perubahan sosial juga menjadi fakta yang juga sering disebut sebagai bagian dari proses terjadinya pelanggaran terhadap norma. Dengan alasan tersebut pula maka pertanyaan apakah sebenarnya deviasi sosial itu, sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya terdapat perbedaan makna deviasi oleh awam maupun para ahli khususnya yang memiliki cara pandang sosiologis. Untuk

memudahkan dalam memahami deviasi sebagai pelanggaran terhadap norma dapat menggunakan empat cara, yaitu secara *statistikal* yang berarti pemahaman deviasi sebagai variasi atau penyimpangan dari rerata atau *average*. Deviasi adalah tingkah laku yang tidak sama, yang jarang, yang langka, asumsinya adalah apa yang umum itu adalah benar. Pengertian pertama terdapat kelemahannya, yakni bahwa masih ada golongan minoritas, orang yang tidak pernah melanggar hukum, norma, tidak pernah mencuri dan sebagainya termasuk ada orang jenius, debil, embisil, idiot termasuk devian adalah tidak benar.

Cara pemahaman kedua adalah *absolut* atau *mutlak*. Asumsinya, bahwa norma sosial itu mutlak ada, jelas, dimengerti oleh sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat tertentu, atau sesuatu yang dimengerti sebelumnya. Pelanggaran terhadap norma secara mutlak disebut deviasi dan yang tidak menyimpang tidak disebut deviasi. Norma sosial itu universal, artinya bahwa semua masyarakat mengerti mengenal konsep deviasi adalah pelanggaran terhadap norma, sehingga norma itu ada. Definisi tersebut masih diikuti di kalangan psikiater dan sebagian psikolog, misalnya kejahatan, alkoholisme, bunuh diri dan lain-lain dianalogikan dengan sebuah penyakit.

Cara pemahaman ke empat adalah norma sosial itu *universal*. Terminologi tersebut juga sering digunakan para psikiater atau psikolog yang menganalogikan deviasi seperti alkoholisme, bunuh diri sebagai penyakit, sedangkan secara relativistik deviasi sosial adalah tingkah laku atau kondisi yang dicap (dikategorikan) demikian oleh orang lain. Jadi tingkah laku atau kondisi hanya disebut deviasi apabila diberi cap demikian oleh masyarakat termasuk agen kontrol. Oleh karena itu perilaku demikian dicap deviasi, apabila pelakunya cenderung dicap devia dan ini umumnya mempunyai akibat negatif. Cara pemahaman seperti ini populer karena deviasi bersifat sosial dan interaksi antara pelaku dan masyarakat atau khalayak. Dalam hal ini deviasi bukan bawaan, tetapi tergantung khalayak. Kritik terhadap cara pandang seperti ini adalah apakah setiap pelanggaran terhadap norma yang lolos dari pengamatan orang lain, bukan deviasi? Seperti koruptor yang lolos dari pengamatan khalayak, melakukan pelacuran tetapi tersamar atau terselubung, melakukan tindakan perjudian dengan tersamar, dan lain-lain sebagainya.

Pemahaman selanjutnya adalah *normatif*. Deviasi adalah penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma atau *norm violation*. Norma adalah aturan sosial tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dipikirkan, dikatakan atau

diperbuat dalam waktu dan situasi tertentu. Pelanggaran norma sering menimbulkan sanksi dari masyarakat umumnya atau agen kontrol atau pengawasan sosial. Sanksi merupakan sebuah tekanan agar individu menyesuaikan dengan norma yang umumnya ada sebagai pedoman tingkah laku.

Terdapat dua konsep norma, yaitu sebagai penilaian terhadap tingkah laku, ini menunjuk tingkah laku atau keyakinan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, seperti pada saat tertentu tidak boleh merokok di ruangan ber AC atau di bus-bus umum. Dalam situasi apapun tidak merampok milik orang lain. Selain itu juga sebagai harapan atau ramalan terhadap tingkah laku, ini menunjuk pada keteraturan tingkah laku sesuai kebiasaan atau adat. Norma sosial itu bersifat sosial atau milik bersama. Sebagaimana pengertian tentang norma sebagai aturan sosial bagi semua anggota masyarakat tertentu atau norma dapat dikatakan sebagai milik bersama, maka sanksi terhadap pelanggaran norma juga dilalui dengan proses interaksi atau kesepakatan atau konsensus. Oleh karena norma itu memiliki fungsi atau peran sebagai patokan orang untuk berperilaku sebagaimana diharapkan, maka norma sosial yang muncul sebagai pedoman yang memudahkan orang untuk berperilaku demikian serta

norma itu adalah membatasi orang untuk tidak berperilaku demikian.

Dari pandangan Sigmund Freud seorang ahli psikologi atau psikoanalisis, pada dasarnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang karena manusia memiliki instink hewani, maka perilaku manusia yang melakukan hubungan seks dengan seekor binatang adalah sebuah bukti bahwa manusia cenderung menyimpang dengan pengembangan instink hewannya itu, namun mengapa tidak semua orang melakukan penyimpangan seks seperti itu karena ada norma yang menghambatnya untuk berperilaku demikian.

Sebaliknya dari sudut pandang sosiologi, individu melakukan pelanggaran norma oleh karena justru masyarakatlah (struktur) yang menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan. Penjelasanannya adalah bahwa pada situasi tertentu seorang individu atau kelompok melakukan penyimpangan oleh karena struktur sebagai penyebabnya. Masyarakat yang mengalami perkembangan-perkembangan di segala aspek yang memerlukan berbagai keterampilan hidup agar tetap survive, sementara ada orang atau kelompok-kelompok tertentu tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan maka deviasi mudah terjadi. Dengan kata lain,

masyarakat sering disebut sebagai gagal atau masyarakat mengalami disfungsi.

Secara umum dikatakan bahwa deviasi adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang tidak mendapatkan persetujuan sosial, sehingga penyimpangan tersebut menimbulkan sanksi negatif bila diketahui. Jadi kunci pokok dari definisi tersebut adalah konsep norma yang ada dalam masyarakat, diciptakan, dipertimbangkan, dikembangkan oleh masyarakat, berkaitan dengan struktur masyarakat, seperti stratifikasi dan deferensiasi sosial.

Selanjutnya masih terdapat unsur-unsur pokok dari definisi itu adalah deviasi sebagai tingkah laku yang berbeda dari tingkah laku pada umumnya, dinilai negatif atau *disvalued*, relatif atau tergantung pada opini khalayak yang menentukan, deferensiasi seperti umur, sekolah, ras, etnis, agama. Adapun dari segi stratifikasi seperti pendidikan, tingkat status sosial, ekonomi. Norma sosial atau institusi sosial dalam kaitannya dengan perilaku deviasi terjadi oleh karena pengaruh yang besar dari hubungan kelompok atau golongan atau kekuatan politik, sosial dan ekonomi sehingga muncul adanya *powerfull* dan *powerless*, ordinasi dan sub ordinasi, mayoritas dan minoritas.

Norma sosial pada dasarnya mengatur tingkah laku dan hubungan sosial dalam situasi tertentu. Norma sosial terdiri dari beberapa jenis, taraf, kekuatan dan sebagainya. Norma sosial sering disadari oleh individu, dipelajari atau diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi atau internalisasi agar dapat digunakan untuk memelihara keteraturan, ketertiban kelompok dalam masyarakat. Norma sosial dibedakan menurut proskriptif, artinya apa yang seharusnya tidak dilakukan atau larangan, dan preskriptif, artinya apa yang seharusnya dilakukan atau instruksi/perintah. Norma juga sangat berkaitan dengan peran sosial, seperti seorang bujangan, sebagai seorang suami atau isteri, anak. Norma sosial juga cenderung berbeda pada setiap kelompok oleh karena itu deviasi juga berbeda untuk setiap kelompok. Sementara itu deviasi itu tidak menetap atau dinamis tergantung pada jenis, reaksi negatif yang ditimbulkan, kondisi, norma yang berlaku dalam kelompok atau jenis norma yang dilanggar.

Lemert adalah seorang sosiologi kontemporer, menyebut deviasi sebagai deviasi primer dan sekunder. Disebut deviasi primer oleh karena pengaruh situasi dan tidak diikuti perubahan jati diri, *self concept*, peranan yang bersifat devian seperti perokok yang masih mencoba cara menghisap tetapi oleh karena sesuatu sebab tidak menjadikan rokok sebagai

kebiasaan selanjutnya. Sementara itu disebut deviasi sekunder oleh karena perilaku devian itu disadari individu tersebut telah mengadopsi peran sebagai devian dan berpartisipasi dalam *subculture* sehingga dalam proses belajarnya telah menjadikan deviasi itu sebagai merubah jati dirinya atau sering disebut menetap. Misalnya seorang yang oleh sesuatu sebab ia telah terjerumus ke dalam kehidupan malam atau disebut juga dengan prostitusi dan menjadikan prostitusi itu sebagai peran sosialnya, profesinya maka seseorang ini devian yang bersifat sekunder, karena telah merubah jati dirinya. Memasuki kehidupan deviasinya juga terjadi oleh karena tekanan sosial, ekonomi yang tidak ada pilihan lain.

Jadi deviasi baik primer maupun sekunder terjadi melalui suatu proses atau tahap-tahap seperti seorang remaja yang melihat kunci mobil tertinggal dalam mobil, yang menarik perhatiannya, dan terdorong untuk mencuri mobil. Proses itu dipengaruhi oleh pengalaman individu sebelumnya, misalnya menjadi salah satu anggota geng atau *delinquent subculture* setelah dewasa menjadi perampok sebagaimana pembunuhan dapat didahului oleh pencurian atau transaksi narkoba. Pembunuhan biasanya terjadi di antara orang yang sebelumnya saling mengenal secara lebih dekat. Tidak semua deviasi selalu memunculkan korban, seperti kecanduan

narkoba, alkoholisme, prostitusi, dan tidak semua deviasi diketahui oleh khalayak seperti transaksi melalui dunia maya, kecanduan narkoba, korupsi atau penyimpangan seksual.

Deviasi sosial sebagai pelanggaran norma. Secara obyektif tingkah laku itu bisa diobservasi, diamati. Tingkah laku yang melanggar norma bisa membahayakan, misalnya membunuh. Akan tetapi ada deviasi yang tidak membahayakan, misalnya meludah di sembarang tempat, berbicara cabul, jorok hingga tingkah laku devian yang melanggar norma masyarakat luas, misalnya melanggar norma-norma dalam Pancasila, peraturan lalu lintas dengan wilayah atau ruang lingkup RT, RW dalam kelas, dalam organisasi sosial dan lain-lainnya. Pengertian norma lebih luas dari hukum, misalnya bicara cabul, jorok, berdusta itu adalah deviasi, pelanggaran terhadap norma tetapi tidak melanggar hukum atau *law violation*. Sebaliknya mencuri, merampok, membunuh itu pasti melanggar norma tetapi juga sekaligus melanggar hukum. Norma sosial atau *rule* yang berarti *regularity in behavior recognized by members of a society*, berarti keteraturan tingkah laku yang dikenal anggota-anggota masyarakat.

Jadi deviasi berarti melanggar norma atau juga hukum sekaligus, sementara crime melanggar hukum tetapi pasti

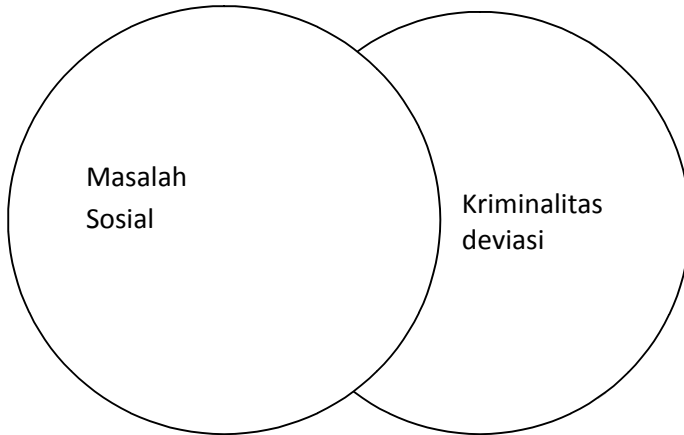
deviasi. Ilmu yang mempelajari deviasi secara luas cenderung diperdalam melalui sosiologi deviasi, sementara ilmu yang mempelajari sering disebut kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum (*law violation*), sebuah pelanggaran hukum yang relatif membahayakan khalayak, misalnya sebuah invasi atau agresi negara terhadap negara lain. Hukum memiliki sifat-sifat *closely formulated, highly obligatory, with strong negative sanctions and involving organized authority* (R. Firth). Secara umum hukum adalah sebagian dari norma yang dirumuskan secara tepat dan sangat mewajibkan dengan sanksi negatif oleh kekuasaan yang sah dalam hal ini pemerintah.

Studi deviasi yang menekankan pada pelanggaran terhadap norma ini dapat dilihat dari, (1) Jumlah deviasi atau banyak deviasi atau disebut juga dengan *rates of deviance*, misalnya per 1000 penduduk, bunuh diri di Yogyakarta dalam tahun 2000 ada sebanyak 15 orang dewasa dan 4 orang usia anak sekolah, dan seterusnya. Atau tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, misalnya tahun 2007 sebanyak 300 dan tahun 2008 sebanyak 400. Juga data tentang perceraian tahun 2006, 2007 atau 2008. Data-data seperti itu dapat kita peroleh dari lembaga-

lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan tinggi dan sebagainya. (2) Hal-hal apa saja yang dapat dikorelasi dengan deviasi. Misalnya keadaan ekonomi dengan perampokan; perampokan dengan pengangguran. (3) Apa akibat adanya deviasi, misalnya perampokan menyebabkan keresahan atau justru sebaliknya terjadi kekompakan menghadapi perampokan.

Deviasi sangat mungkin dapat dikaitkan dengan masalah sosial dan kriminalitas. Masalah sosial bukanlah deviasi atau deviasi bukan kriminalitas, atau masalah sosial tidak harus sama dengan deviasi. Masalah sosial merupakan kondisi yang ada dalam masyarakat yang dipandang negatif dan yang oleh pemerintah atau kelompok masyarakat akan diubah. Jenis-jenis masalah sosial yang juga deviasi adalah pengangguran, pelacuran, penyalahgunaan narkotik, akan tetapi masalah sosial yang bukan deviasi misalnya polusi udara, polusi lingkungan, masalah lalu lintas, masalah penyakit, gelandangan. Sementara itu, deviasi sosial yang juga kriminalitas (*law violation*) adalah pembunuhan, perampokan atau pencurian, penipuan. Deviasi bukanlah kriminalitas, tetapi kriminalitas pastilah deviasi sehingga masalah sosial dapat menyebabkan terjadinya deviasi atau kriminalitas tetapi deviasi tidak harus menjadi kriminalitas atau masalah sosial. Bila

digambarkan secara sederhana akan tampak pada gambar berikut.



Ringkasan

1. Deviasi sosial sebagai sebuah kajian yang aktual, mandiri dan menarik oleh karena studi ini mengalami perkembangan dalam cara berpikir terhadap fenomena hingga menjadi kajian yang menarik khususnya dari perspektif sosiologis yang memunculkan periodisasi.
2. Tiga terminologi dalam konsep deviasi, yaitu menekankan pada prosesnya, sebagai obyek studi dari sosiologi deviasi yang sering dikontroversikan dengan konformitas, individu yang melakukan penyimpangan terhadap norma.

3. Apabila studi deviasi sosial ini menjadi cabang dari sosiologi khusus maka analisisnya adalah kausalitas, dan empirik deskriptif.
4. Cara pemahaman absolut, berasumsi bahwa norma sosial itu mutlak ada, jelas, dimengerti oleh sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat tertentu, atau sesuatu yang dimengerti sebelumnya.
5. Pemahaman *normatif*, deviasi adalah penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma atau *norm violation*.
6. Terdapat dua konsep norma, yaitu sebagai penilaian terhadap tingkah laku, dan keyakinan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.
7. Sebaliknya dari sudut pandang sosiologi, individu melakukan pelanggaran norma dan justru masyarakatlah (struktur) yang menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan.
8. Secara umum deviasi adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang tidak mendapatkan persetujuan sosial, sehingga penyimpangan tersebut menimbulkan sanksi negatif bila diketahui.
9. Terdapat unsur-unsur pokok dari definisi deviasi, sebagai tingkah laku yang berbeda dari tingkah laku pada umumnya, dinilai negatif atau *disvalued*, relatif atau tergantung pada

opini khalayak yang menentukan, deferensiasi seperti umur, sekolah, ras, etnis, agama.

10. Norma sosial pada dasarnya mengatur tingkah laku dan hubungan sosial dalam situasi tertentu.
11. Deviasi primer dan sekunder terjadi melalui suatu proses atau tahap-tahapan.
12. Deviasi sosial sebagai pelanggaran norma, secara obyektif tingkah laku itu bisa diobservasi, dan diamati.
13. Deviasi melanggar norma dan sekaligus hukum, sementara kejahatan melanggar hukum tetapi pasti deviasi.
14. Deviasi sangat mungkin dapat dikaitkan dengan masalah sosial dan kriminalitas.

BAB III

PANDANGAN NORMATIF DAN RELATIVISTIK TENTANG DEVIASI

A. Pandangan Normatif

Pandangan normatif mempelajari deviasi sebagai pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma atau aturan sosial (*norm violation*). Norma itu mencakup norma masyarakat luas, norma kelompok kecil, norma organisasi sosial. Sementara itu kajian pelanggaran norma oleh individu, dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai siapa yang melakukan pelanggaran norma ? Apa karakteristik si pelanggar norma itu ? Mengapa seseorang melakukan pelanggaran norma ? Mengapa ada individu yang kadang-kadang saja tetapi ada yang berkali-kali melanggar norma ? Studi tentang deviasi sebagai pelanggaran norma berkaitan dengan studi tentang problem sosial, kriminologi dan *mental illness*.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa antara deviasi dan masalah sosial adalah berbeda, namun masalah sosial sangat mungkin berakibat terjadinya deviasi atau kriminalitas, sehingga ada perbedaan dan persamaan antara kriminalitas dan deviasi. Sedangkan *mental illness* lebih menekankan terjadinya problem emosional pada diri individu, tingkah lakunya tidak produktif, keputusannya tidak rasional.

Jadi sakit mental belum tentu deviasi dan deviasi belum tentu sakit mental.

Deviasi sebagai kajian ilmu sosial khususnya sosiologi berkaitan dengan struktur dan proses yang cenderung mempengaruhi seseorang melakukan deviasi, masalah sosial, kriminalitas atau sakit mental. Deviasi kadang dipertentangkan dengan konformitas, artinya orang yang melakukan deviasi berarti tingkah lakunya tidak konform. Konformitas (*conformity*) berarti *voluntary performance of an act because other also do it*. Voluntary dilakukan dari dalam, sukarela yakni tingkah laku yang dilakukan atas kehendak sendiri yang disebabkan oleh tingkah laku orang lain. Misalnya ikut-ikutan yang di depannya. Konformitas dilakukan secara spontan, melakukan sesuatu yang sama sesaat orang melakukan hal tertentu. Konformitas juga bisa dilakukan secara voluntary yakni melakukan secara sadar ingin menyesuaikan dengan orang lain. Pada umumnya tingkah laku manusia adalah konformitas.

Pandangan lain yang menyebutkan bahwa deviasi sebagai label, cap atau sebutan sosial berpusat pada dua pertanyaan pokok, yaitu (1) apa yang dicap sebagai deviasi itu. Pertanyaan pertama ini menunjuk pada muncul dan berkembangnya norma sosial dan label sosial untuk

melukiskan pelanggaran norma dan pelanggarnya. Ada yang mengutamakan sejarah berkembangnya norma-norma umum. Misalnya norma tentang penggunaan alkohol. Ada yang mengutamakan munculnya norma situasional misalnya norma tentang minum alkohol. Ada yang mengutamakan munculnya label sosial, misalnya tentang sebutan sakit mental. Dan (2) siapa yang dicap sebagai devian itu ? Pertanyaan ini lebih bermakna pada bagaimana sebutan/cap sebagai devian itu diterapkan dalam kasus/situasi khusus. Artinya, mengapa dari sekian banyak pelanggar norma, hanya individu/kelompok/golongan tertentu saja yang dicap. Dalam kondisi apa individu/individu-individu dicap telah melanggar norma. Mengapa ada individu yang dicap salah sebagai pelanggar norma.

ALUR PELANGGAR HUKUM



Dengan demikian bila dilihat antara siapa dan pada kondisi tertentu orang yang dianggap salah pada saat yang lain dapat berubah sama sekali atau tidak dinyatakan bersalah, sebaliknya individu yang sebenarnya tidak bersalah justru dapat dianggap salah, dan sangat mungkin menjadi terhukum dan dipenjara.

Berbeda dengan pandangan normatif tentang deviasi yang menekankan setiap individu yang melakukan pelanggaran norma masyarakat sesuai dengan kesepakatan sebagian besar anggota masyarakat, maka individu tersebut adalah deviasi. Namun pandangan kedua ini sifatnya relatif, karena disebut deviasi itu tergantung pada khalayak, masyarakat penguasa

yang memutuskan yang memberikan cap pada tingkah laku yang menyebut demikian. Jadi orang devian itu tidak ada. Dalam konsep ini tidak ada konsensus norma (norma itu tidak satu) karena masyarakat mereka masyarakat pluralistik, majemuk, modern atau golongannya bermacam-macam sehingga normanya bisa macam-macam, akibatnya kesepakatan norma tidak ada, dan apabila kesepakatan norma tidak ada (lemah) maka pelanggaran terhadap normapun tidak ada atau kabur. Misalnya makan daging babi atau daging anjing itu boleh atau tidak. Pada masyarakat tertentu menyatakan halal, tetapi pada masyarakat atau kelompok lain tidak halal. Punya isteri lebih dari satu itu boleh atau tidak? Pada kelompok tertentu tidak apa tetapi pada kelompok lain adalah tidak boleh.

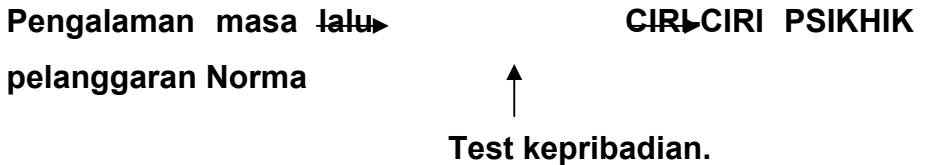
Pandangan tentang deviasi dapat dilengkapi dengan menggunakan taraf-taraf analisis, yaitu (1) Taraf analisis biologi dalam memandang deviasi sebagai pelanggaran norma, asumsinya adalah bahwa struktur/proses biologik menyebabkan pelanggaran norma dengan ciri-ciri kondisi biologik dengan pola pertama bahwa *ciri-ciri fisik* menjadi penyebab individu cenderung melakukan *pelanggaran norma*. Pola lain menyebutkan kondisi biologik dengan ciri-ciri fisik dan ciri psikik tertentu berpengaruh terhadap terjadinya

pelanggaran norma. *Caecar Lombroso*, seorang ahli dalam evolusi ragawi manusia menyatakan bahwa tingkah laku kriminal merupakan manifestasi kedudukan rendah dalam skala evolusi. Ciri-ciri fisik tertentu merupakan wujud evolusi tingkat rendah. Jadi ada hubungan antara ciri-ciri fisik dengan tingkah laku kriminal.

Enrico Ferri (murid Lombroso) selanjutnya menyatakan, bahwa ciri-ciri biologik itu diturunkan jadi perilaku menyimpang atau kriminalitas itu merupakan keturunan. Misalnya, bagaimana ciri-ciri fisik seseorang yang dengan dahi maju, rahang gigi besar, bentuk wajah tertentu memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang. Pola berpikir seperti ini pada waktu tertentu digunakan para sutradara film dengan membagi atau membuat wajah dengan karakter-karakter tertentu, jahat, baik, buruk, kasar perangai atau perilaku jahat lainnya. Konsep atau taraf berpikir terdapat kritik-kritik antara lain, yaitu teori itu tidak didukung data yang akurat, tidak dapat menjelaskan hubungan antara kondisi fisik dengan kriminalitas, jumlah abnormalita biologik kecil sedangkan jumlah kriminalitas banyak, tidak membicarakan deviasi sebagai label.

Taraf psikologik yang memandang deviasi sebagai pelanggaran norma, analisis ini berasumsi, bahwa

struktur/proses psikik menyebabkan pelanggaran norma. Bila diskemakan terlihat seperti yang di bawah ini.



Terdapat dua jenis teori psikologik, yaitu (1) Pelanggaran norma itu dilakukan oleh individu yang normal kepribadiannya, misalnya orang agresif melakukan pembunuhan, akan tetapi mengapa tidak semua orang tidak melakukan pelanggaran norma ? (2) Pelanggaran norma dilakukan oleh individu psikopatik (tidak memiliki *guilty feeling* atau rasa bersalah) dan individu ini mengalami abnormal. Artinya bahwa pelanggaran norma dapat dilakukan oleh individu yang normal tetapi juga individu yang abnormal.

Konsep berpikir tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa ciri-ciri psikik menjadi penyebab terjadinya pelanggaran norma. Kritik teori ini, yaitu (1) mengabaikan pengaruh situasi sosial, dan (2) mengabaikan deviasi sebagai label.

Taraf analisis sosiologik, memandang deviasi sebagai pelanggaran norma dan sebagai label. Asumsinya adalah bahwa struktur atau proses sosial menyebabkan terjadinya pelanggaran norma. Sigmud Freud ahli psikologi pernah

menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang, tetapi mengapa tidak semua orang melakukan pelanggaran norma ? Tentu saja karena ada norma dalam masyarakat. Masyarakat lah yang *menghambat* terjadinya perilaku menyimpang sebaliknya taraf analisis sosiologi justru memandang sebaliknya yakni masyarakat lah dengan struktur atau proses sosialnya justru yang mendorong terjadinya pelanggaran norma. Ketika struktur dan proses sosial dalam masyarakat mengalami gejolak, maka ada kalanya kelompok atau individu tertentu tidak mampu menyesuaikan norma-norma yang berkembang maka terjadi apa yang disebut pelanggaran norma.

Selain itu oleh karena secara struktur atau proses sosial yang memberi kesempatan secara terstruktur, sistematis atau ada peluang, maka kecenderungan terjadinya pelanggaran norma juga besar. Dalam hal ini terdapat dua versi, yaitu (1) Struktur sosial sebagai sumber pelanggaran norma dapat dilihat pada teorinya Robert K Merton (1938) yang menganalisis pelanggaran norma dengan melihat kesenjangan antara tujuan dan cara menyebabkan stress dan kemudian melakukan pelanggaran norma. (2) Durkheim (1951) menyatakan, bahwa kohesi sosial berkurang maka terjadi kekecewaan dan diikuti

dengan stress atau keterasingan sosial kemudian melakukan bunuh diri.

Proses sosial sebagai sumber pelanggaran norma (misalnya interaksi terus menerus), misalnya Becker (tokoh perspektif modern) menyebutkan, bahwa tahap-tahap kecanduan obat terlarang diawali dari belajar bagaimana mengkonsumsi obat-obat tersebut dan kemudian mengenal akibatnya yang diakhiri dengan benar-benar kecanduan, dan hal ini terjadi dalam situasi interaksi sosial. Kritik terhadap teori ini adalah konsep-konsepnya kerap kali kabur dan bukti-bukti penelitian sangat kurang.

Dengan tiga taraf analisis tersebut dapat memberi gambaran pada kita bahwa pelanggaran norma bisa terjadi oleh karena faktor biologik, psikologik dan sosiologik. Oleh karena buku pegangan ini adalah dari perspektif sosiologi maka teori-teori yang akan diperdalam pada bab-bab selanjutnya adalah dari perspektif sosiologik. Ketika perspektif sosiologik ini digunakan untuk menggambarkan, membahas atau menganalisa deviasi sebagai fenomena maka struktur dan proses sosial menjadi salah satu dasar pijaknya serta interaksi antara individu dengan individu, atau dengan kelompok terjadi maka berbagai kemungkinan bisa terjadi termasuk perilaku menyimpang, sehingga kecenderungan individu untuk

melakukan pelanggaran norma dapat terjadi oleh karena proses interaksi dan khususnya proses belajar.

Semua perilaku manusia yang memiliki cara hidup, *way or life* atau budaya ini diperoleh dari generasi ke generasi lain melalui proses belajar, demikian pula deviasi sebagai bagian dari *way of life* juga diperoleh, dilakukan melalui proses belajar. Oleh karena itu, pada bab ke 4 akan disajikan tentang deviasi dilihat sebagai sebuah proses, tidak ada satu individu pun yang pernah melakukan pelanggaran norma secara tiba-tiba atau *genetis* melainkan melalui proses belajar, proses interaksi dengan individu lain yang berlaku demikian.

Ringkasan

1. Pandangan normatif mempelajari deviasi sebagai pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma atau aturan sosial (*norm violation*).
2. Antara deviasi dan masalah sosial berbeda, namun masalah sosial sangat mungkin berakibat terjadinya deviasi atau kriminalitas, sehingga ada perbedaan dan persamaan antara kriminalitas dan deviasi.
3. Deviasi sebagai kajian sosiologi berkaitan dengan struktur dan proses yang cenderung mempengaruhi seseorang

melakukan deviasi, masalah sosial, kriminalitas atau sakit mental.

4. Pandangan lain yang menyebutkan bahwa deviasi sebagai label, cap atau sebutan sosial berpusat pada dua pertanyaan pokok, yaitu apa yang dicap sebagai deviasi, dan siapa yang dicap sebagai devian itu ?
5. Bila dilihat antara siapa dan pada kondisi tertentu orang yang dianggap salah, pada saat yang lain dapat berubah sama sekali dan tidak dinyatakan bersalah.
6. Pandangan normatif tentang deviasi yang menekankan setiap individu yang melakukan pelanggaran norma sesuai dengan kesepakatan sebagian besar anggota masyarakat, maka individu tersebut adalah deviasi.
7. Pandangan tentang deviasi dapat dilengkapi dengan menggunakan taraf-taraf analisis, yaitu analisis biologi dalam memandang deviasi sebagai pelanggaran norma.
8. *Enrico Ferri* menyatakan, ciri-ciri biologik itu diturunkan jadi perilaku menyimpang atau kriminalitas itu merupakan keturunan.
9. Taraf psikologik yang memandang deviasi sebagai pelanggaran norma, analisis ini berasumsi, struktur/proses psikhik menyebabkan pelanggaran norma.

10. Taraf analisis sosiologik, memandang deviasi sebagai pelanggaran norma dan sebagai label.
11. Secara struktur atau proses sosial yang memberi kesempatan secara terstruktur, sistematis atau ada peluang, maka kecenderungan terjadinya pelanggaran norma juga besar.
12. Proses sosial sebagai sumber pelanggaran norma, misalnya interaksi terus menerus.
13. Dengan tiga analisis tersebut, dapat memberi gambaran pada kita, pelanggaran norma bisa terjadi karena faktor biologik, psikologik dan sosiologik.
14. Semua perilaku manusia yang memiliki cara hidup, *way or life* atau budaya yang diperoleh dari generasi ke generasi melalui proses belajar, demikian pula deviasi sebagai bagian dari *way of life* juga diperoleh, dilakukan melalui proses belajar.

BAB IV

PROSES MENJADI DEVIAN

Dengan mengetahui tiga bab sebelumnya tentang deviasi baik sebagai pelanggaran norma baik secara normatif maupun relatif (yang teori-teorinya akan disajikan secara khusus pada bab-bab selanjutnya) maka dapat dikatakan, bahwa untuk menjadi devian memerlukan sebuah proses. Beberapa hal dapat disampaikan antara lain, yaitu (1) Tidak sekedar menyimpang dari norma tingkah laku dapat disebut deviasi. Deviasi terjadi ketika individu melakukan peranan sosial yang melanggar atau menyimpang norma. Proses mengadopsi peranan devian ini disebut proses menjadi devian. Proses ini diikuti pula oleh perubahan identitas dirinya. (2) Semua tingkah laku deviasi adalah tingkah laku manusia biasa (*human being behavior*), artinya proses menjadi devian atau tidak devian atau konvensional itu mengikuti prinsip yang sama.

Kemudian dilanjutkan dengan langkah ke (3) Devian itu *hipokrit* atau munafik, *ambiguity*, berwayuh hati, bermuka ganda maksudnya adalah dia melanggar norma tertentu, akan tetapi ia juga patuh terhadap norma yang lain. Tidak ada individu yang melakukan deviasi terus menerus di setiap situasi. Misalnya pencuri yang suka mengambil milik orang lain, tetapi ia jujur terhadap keluarganya. (4) Sama halnya unsur

kebudayaan, tingkah laku sosial itu dipelajari, berkembang melalui sosialisasi; merupakan produk interaksi sosial. Baik devian maupun non devian melakukan berbagai peranan sosial, yaitu tingkh laku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya di dalam kelompok tertentu. Peranan sosial ini juga berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan seseorang. (5) Proses sosialisasi terutama adalah proses mempelajari norma-norma dan peranan sosial, proses ini terjadi dalam interaksinya dengan individu lain. Proses melakukan peranan devian sama dengan proses melakukan peranan non devian. Individu menjadi devian apabila telah melakukan peranan devian dan memiliki identitas diri dengan devian. Misalnya seorang homoseks akan berpakaian, bertingkah laku, berbicara dan bergabung dengan kelompok homoseks.

Langkah terakhir, yaitu (6) Jika individu menjadi devian, maka deviasinya menjadi peranannya yang dominan atau *master role*. Peranan deviasinya yang dominan itu menyulitkan integrasi kembali ke dalam masyarakat. Misalnya bekas narapidana dan bekas pelacur sulit diterima kembali ke dalam masyarakat. (7) Devian kerap kali menimbulkan sanksi negatif dari masyarakat. Sanksi negatif ini menimbulkan noda atau *stigma* pada diri devian.

Devian berusaha mengelak, menghilangkan atau mengurangi stigma pada dirinya untuk menghindari penolakan masyarakat usaha-usaha itu, antara lain (a) Menyamar atau merahasiakan diri, devian merahasiakan deviasinya sehingga tidak diketahui oleh orang lain, misalnya seorang pecandu heroin berpakaian sedemikian rupa sehingga bekas-bekas jarum pada tubuhnya tidak nampak. (b) Memanipulasi situasi, devian mengusahakan agar situasi hidupnya nampak wajar. Misalnya, seorang homoseks hidup dalam kehidupan perkawinan dengan seseorang, meskipun ia tetap tertarik pada seks sejenisnya. Contoh lain panti-panti pijat yang digunakan untuk transaksi seks. (c) Rasionalisasi; devian memberikan alasan-alasan yang masuk akal untuk membela deviasinya, misalnya mencuri di supermarket dengan alasan supermarket itu keuntungannya terlalu besar. Menjadi pelacur dengan alasan tidak ada pekerjaan lain yang bisa diperoleh. Agresi militer Israel ke jalur Gaza juga menggunakan rasionalisasi atau alasan-alasan yang membenarkan kegiatan agresinya tersebut. (d) Berubah menjadi non devian. Devian menghentikan deviasinya dan melakukan peranan non deviasinya, misalnya seorang pelacur kemudian menikah dan membentuk keluarga biasa. Seorang mantan narapidana yang

kembali menjadi orang yang memiliki peran sosial di bidang keagamaan dan lain-lain.

Perubahan ini bisa juga dilaksanakan secara kolektif, misalnya kelompok homoseks atau waria memperjuangkan kepada pemerintah atau masyarakat agar eksistensinya diakui secara sah dalam undang-undang. Sekelompok pelacur juga memperjuangkan kepada pemerintah agar eksistensinya tetap dijaga atau diakui. Proses ini disebut deviasi tertier (Kitsuse, 1980 dalam Clinard Marshal) atau sebuah tekanan untuk mengubah tingkah laku deviasi menjadi tingkah laku yang diterima secara sosial (oleh masyarakat). Memasuki kelompok devian, dengan memasuki kelompok devian atau devian *sub culture* dimana devian menghindari sanksi negatif dari masyarakat. Dengan memasuki kelompok devian, ia mendapatkan simpati, dukungan dan persahabatan dari sesamanya. Misalnya kelompok homoseks, alkoholik, pecandu narkotika dan pelacur.

Ringkasan

1. Untuk menjadi devian memerlukan sebuah proses.
2. Beberapa hal dapat disampaikan antara lain, yaitu tidak sekedar menyimpang dari norma tingkah laku dapat disebut deviasi.

3. Semua tingkah laku deviasi adalah tingkah laku manusia biasa (*human being behavior*).
4. Devian itu *hipokrit* atau munafik, *ambiguity*, berwayuh hati, bermuka ganda maksudnya adalah dia melanggar norma tertentu, akan tetapi ia juga patuh terhadap norma yang lain.
5. Tingkah laku sosial itu dipelajari, berkembang melalui sosialisasi, dan merupakan produk interaksi sosial.
6. Proses sosialisasi terutama adalah proses mempelajari norma-norma dan peranan sosial, proses ini terjadi dalam interaksinya dengan individu lain.
7. Jika individu menjadi devian, maka deviasinya menjadi peranannya yang dominan atau *master role*.
8. Devian kerap kali menimbulkan sanksi negatif dari masyarakat, sanksi negatif ini menimbulkan noda atau *stigma* pada diri devian.
9. Devian berusaha mengelak, menghilangkan atau mengurangi stigma pada dirinya untuk menghindari penolakan masyarakat usaha-usaha itu, antara lain (a) Menyamar atau merahasiakan diri, devian merahasiakan deviasinya sehingga tidak diketahui oleh orang lain, (b) Memanipulasi situasi, devian mengusahakan agar situasi hidupnya nampak wajar, (c) Rasionalisasi, devian memberikan alasan-alasan yang masuk akal untuk membela

deviasinya, misalnya mencuri di super market dengan alasan super market itu keuntungannya terlalu besar. (d) Berubah menjadi non devian. Devian menghentikan deviasinya dan melakukan peranan non deviasinya, misalnya seorang pelacur kemudian menikah dan membentuk keluarga biasa.

10. Perubahan ini bisa juga dilaksanakan secara kolektif, misalnya kelompok homoseks atau waria memperjuangkan kepada pemerintah atau masyarakat agar eksistensinya diakui secara sah dalam undang-undang.

BAB V

SEJARAH PERKEMBANGAN STUDI DEVIASI

James D Orcutt (dalam Buku Clinard Marshal, 1989 dengan judul *The Sociology of Deviant Behavior*) menyatakan bahwa perkembangan studi deviasi dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap pertama periode patologi sosial, yang diawali abad XX sampai dengan Perang Dunia I, tahap kedua periode disorganisasi sosial pada awal tahun 1920 an sampai pertengahan tahun 1930 an, tahap ketiga periode normatif mulai tahun 1930 sampai 1930 an, dan tahap keempat periode relativistik mulai tahun 1960 an dan tahun 1970 an.

Pada periode patologi sosial dan disorganisasi sosial, studi deviasi belum membentuk disiplin ilmu yang mandiri, masih merupakan bagian dari sosiologi yang mempelajari masalah sosial atau *social problem*. Pada masa patologi sosial ini masyarakat dipandang sebagai mengalami keadaan kacau, anomi, sehingga seluruh permasalahan sosial juga menjadi kajian studi penyimpangan sosial. Demikian pula, kriminalitas juga masih menjadi bagian dari periode ini. Perilaku manusia yang menyimpang dari sistem norma dalam masyarakat itu adalah deviasi, namun pada periode patologi sosial, orang gila atau *mental illness* juga dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Berbeda dengan paradigma perilaku

menyimpang pada periode disorganisasi sosial, normatif dan relativistik, seorang yang disebut gila adalah sakit bukan menyimpang dan orang tersebut memerlukan pengobatan.

Periode normatif, sebagai kajian deviasi sosial mulai menjadi studi yang khusus, yaitu tentang perilaku menyimpang. Bahkan beberapa pakar manaruh perhatian yang lebih spesifik lagi, sehingga melahirkan kajian yang disebut sebagai kriminologi dan sosiologi psikiatri. Kajian mengenai perilaku menyimpang yang terjadi sebagai produk interaksi sosial antara individu dengan individu atau dengan kelompok dalam masyarakat menjadi disiplin yang mandiri terjadi pada periode relativistik.

A. Periode Patologi Sosial

Periode patologi sosial (awal abad XX – PD I) dapat dijelaskan secara tematik melalui beberapa langkah, yaitu pada awal perkembangannya para ahli teori ilmu sosial khususnya sosiologi di Amerika mulai tertarik pada masalah-masalah sosial yang timbul sebagai akibat terjadinya proses industrialisasi dan urbanisasi. Sosiologi pada saat itu dipandang memiliki kelebihan sebagai ilmu pengetahuan yang memfokuskan diri pada kemajuan perkembangan manusia dan dapat mencegah kemunduran kehidupan masyarakat kota.

Pada akhir abad 19 para sosiolog Amerika dipengaruhi oleh dua tokoh, yaitu *Auguste Comte* terutama pandangannya mengenai konsep *organismik*nya. Masyarakat dipandang sebagai organisme, yang artinya masyarakat itu relatif sederhana dengan sistem sosial yang sederhana, serba teratur, masing-masing elemen yang ada dalam masyarakat membentuk sebuah organisme yang bergerak sesuai dengan sistem aturan yang jelas. Sementara itu *Herbert Spencer*, sosiolog Amerika juga menjelaskan tentang konsep kemajuan masyarakat. Sebuah masyarakat dipandang mengalami kemajuan karena keberhasilan individu dalam beradaptasi terhadap lingkungannya.

Justu dari pendapat Herbert Spencer inilah muncul pandangan baru para ahli sosiologi tentang masalah sosial yang dianggapnya sebagai sebuah kegagalan adaptasi individu terhadap kehidupan masyarakat yang relatif teratur. Oleh karena itu, baik masalah sosial ataupun perilaku manusia yang mengalami kegagalan beradaptasi terhadap lingkungan ini dipandang sebagai sebuah patologi sosial dengan menitikberatkan pada patologi individual atau *maladjustment*. Cara mempelajari perilaku manusia pada periode patologi ini dengan menggunakan *case study* terutama terhadap individu yang mengalami patologik. Optimisme para ahli sosiologi pada

periode patologi sosial diguncang oleh peristiwa terjadinya Perang Dunia I dan sejak saat itu sosiologi berusaha menjadi ilmu pengetahuan yang netral dan obyektif.

Kelemahan konsep patologi sosial antara lain bahwa apa yang disebut patologi hanya tergantung pada pendapat peneliti, tidak didasarkan pada kriteria obyektif; sementara itu tulisan-tulisan tentang patologi sosial bercorak moralis; tulisan-tulisan patologi sosial juga tidak mampu merumuskan teori sosiologi yang khas tentang masalah sosial dan deviasi secara tegas dan jelas.

Buku acuan yang dapat menambah pemahaman tentang periode patologi dan juga periode yang lain adalah buku *Patologi Sosial*, ditulis oleh St.Vembriarto, pada tahun 1984 (edisi pertama). Dalam buku tersebut banyak mengungkap mengenai masalah disorganisasi sosial dan disorganisasi individual yang terjadi dalam masyarakat pada saat itu. Buku tersebut juga berisi mengenai kritik-kritik terhadap konsep sosial yang terjadi dalam masyarakat pada saat itu.

B. Periode Disorganisasi Sosial

Pada periode disorganisasi sosial ini (awal tahun 1920 sampai pertengahan tahun 1930 an), studi deviasi dan masalah sosial banyak diminati ahli sosiologi khususnya mazhab

Chicago yang mengubah paradigma berpikirnya dari yang moralis menjadi bercorak ilmiah. Mazhab ini memandang kemajuan kota sebagai akibat proses industrialisasi dan urbanisasi sebagai sebuah proses yang harus terjadi sebagaimana proses perubahan sebuah masyarakat. Justru karena terjadinya perubahan ini bagi mazhab Chicago dianggap sebagai sebuah fenomena menarik, menantang untuk dikaji meskipun pada periode ini masalah sosial masih menjadi kajian yang cukup diminati. Fenomena yang mengemuka di masyarakat pada saat terjadinya proses industrialisasi dan urbanisasi ini menjadi kajian yang empirik sebagai sifat kajiannya.

Masyarakat yang mengalami industrialisasi menjadikan individu-individu yang ada di dalamnya berusaha untuk melakukan adaptasi dan antara lain adalah urbanisasi. Proses adaptasi terhadap lingkungan yang baru ini tidak lepas dari upaya melepaskan diri dari norma-norma lama untuk menyesuaikan terhadap norma-norma yang baru. Dapat dipahami oleh karena masyarakat industri sangat berbeda dengan masyarakat agraris. Norma dan nilai pada masyarakat industri menuntut sistem norma yang baru sama sekali, sehingga pada saat ini banyak individu mengalami kegagalan

dalam menyesuaikan diri dengan norma dan nilai pada masyarakat industri.

Emile Durkheim sebagai pelopor mazhab Chicago ini mengemukakan pandangannya tentang fenomena bunuh diri sebagai bagian penting dalam mempelajari disiplin ilmu deviasi sebagai kajian yang mandiri. Durkheim mengamati fenomena tatkala masyarakat mengalami berbagai peristiwa oleh karena terjadinya perubahan struktur masyarakat dari yang agraris ke industri. Sebagian kelompok masyarakat tidak mengalami kesulitan atau kegagalan dalam menyesuaikan norma masyarakat industri tetapi sebagian kelompok lain justru sebaliknya atau tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dengan norma dan nilai masyarakat yang berbeda. Peristiwa ini ditandai dengan perilaku deviasi atau *suicide* atau bunuh diri. Kondisi ini oleh mazhab Chicago disebut disorganisasi sosial (oleh karena *suicide* terjadi pada individu-individu atau banyak individu secara fenomenal dalam masyarakat).

Sementara itu, WI Thomas dan Florian Zuamiesks menyebutnya sebagai disorganisasi pribadi atau personal atau berkurangnya kemampuan individu dalam kelompok dalam mengorganisasi keseluruhan hidupnya. Contoh dari penjelasan ini adalah ketika individu yang berasal dari desa tidak mampu

menyesuaikan diri untuk hidup di daerah perkotaan karena berbagai faktor, misalnya rendahnya pendidikan, ketidakmampuan beradaptasi di masyarakat kota atau tidak dimilikinya keterampilan yang dituntut masyarakat perkotaan maka individu tersebut tidak mampu melakukan reorganisasi dirinya sehingga melakukan tindakan-tindakan yang maladjustment atau deviasi atau perilaku-perilaku menyimpang misalnya bunuh diri, melakukan tindak melawan hukum. Jumlah kriminalitas atau pelanggaran terhadap norma lain menjadi salah satu indikator pada periode disorganisasi sosial. Teori-teori yang dikembangkan melalui mazhab Chicago ini diteruskan oleh para murid Emile Durkheim antara lain pada periode relativistik dengan teori pokoknya, yaitu teori label.

Untuk mempelajari studi disorganisasi sosial ini, metode penelitiannya antara lain *case study* atau *life history*, khususnya untuk memahami dampak yang diakibatkan oleh disorganisasi bagi kelompok masyarakat tertentu. Studi kasus dapat mengungkap kasus seseorang secara pribadi dan mendalam. Sejarah pribadi individu dapat tergambar secara keseluruhan, sehingga sejarah pribadi itu dapat mengungkap pribadi penyimpangan individu. Oleh karena itu, asumsi pada periode disorganisasi sosial ini adalah bahwa masyarakat pada saat itu adalah teratur, sederhana, maka normapun menjadi jelas, dan

karena norma jelas maka pelanggaran terhadap norma pun menjadi jelas.

Sebagai gambaran dari *Burgess* membagi kota Chicago menjadi lima zona, sebagai berikut zona *pertama* daerah pusat bisnis, zona *kedua* daerah transisi, daerah campuran, daerah kumuh atau *slum area*. Pada zona kedua ini mengalami disorganisasi sosial yang tinggi dan memiliki angka deviasi dan masalah sosial yang tinggi pula. Di daerah transisi ini atau daerah kumuh akan ditemui kelompok masyarakat dengan individu-individu yang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan terhadap norma. Dan mereka tidak mampu mengikuti perkembangan kota yang semakin banyak menuntut norma yang lebih spesifik, rumit atau kompleks. Akibatnya individu mengalami kegagalan dan akhirnya harus tinggal di daerah-daerah kumuh.

Zona *ketiga* dikenal dengan daerah tempat dimana para pekerja pabrik tinggal. Zona *keempat* adalah daerah pemukiman yang baik. Zona *kelima* adalah daerah commuter, dengan kelompok masyarakat yang khusus dan biasanya mereka telah pernah melakukan perpindahan wilayah atau urbanisasi untuk memperoleh tingkat atau kualitas hidup yang lebih baik dengan menjadi orang yang *mobile* secara tidak tetap atau berurbanisasi secara ulang-alik atau kembali ke daerah

asalah pada hari atau waktu tertentu. Semakin menjauh dari zona pertama, tingkat deviasinya semakin berkurang dan pada zona ke lima ini menurut Burgess, tingkat deviasinya adalah paling kecil.

Studi deviasi pada periode disorganisasi ini memiliki beberapa kelemahan antara lain kajian terhadap masalah sosial dan deviasi, antara lain (1) Masih bersifat menilai, mengartikan kehidupan yang baik sama dengan masyarakat yang stabil yang memiliki sistem organisasi yang sederhana dan jelas seperti masyarakat pedesaan. (2) Studi disorganisasi sosial ini juga menggunakan penalaran melingkar, tidak membedakan antara sebab dan akibat. Misalnya ketika menjelaskan tentang daerah kumuh dengan disorganisasi tidak dapat secara tegas apakah disorganisasi sosial menyebabkan terjadinya daerah kumuh. Sehingga kita tidak mengetahui bagaimana di daerah kumuh itu pasti ada disorganisasi ?

Sebaliknya studi disorganisasi sosial ini juga memiliki keunggulan, yaitu setidaknya fenomena masalah sosial dan deviasi dapat dikaji melalui perspektif sosiologik, karena menggunakan fakta empirik sebagai pembuktian teoritisnya. Kecuali itu studi disorganisasi sosial ini bersifat makro dalam penelitian empiriknya.

C. Periode Normatif

Studi deviasi pada periode normatif ini (tahun 1938 sampai tahun 1939) dipelopori oleh Robert K Merton dengan teori *anominya* dan Sutherland, yang juga seorang ahli kriminologi yang dikenal dengan teorinya *asosiasi deferensial* dengan sembilan dalil atau prinsip perilaku menyimpang yang memiliki pola tetap tetapi sangat kompleks. Melalui *statement-statement* atau pernyataan-pernyataan kedua ahli ini, kajian deviasi dengan obyek perilaku manusia yang menyimpang dengan model dan gaya penelitiannya dipandang sebagai kajian yang jelas, mapan atau mandiri secara ilmiah. Ciri-ciri perkembangan ilmu pada periode ini ada tiga, yaitu (1) ruang lingkungannya khusus, terbatas sehingga menjadi studi yang mandiri; (2) kedua teori dari ahli-ahli tersebut yaitu anomie dan asosiasi deferensial memiliki struktur keilmuan yang sistematis; (3) Baik Merton maupun Sutherland memandang deviasi sebagai gejala yang normal secara sosiologik.

Sumber tingkah laku deviasi bukan berasal dari jenis individu yang bersangkutan melainkan dari jenis tekanan lingkungan sosial. Tekanan ini yang diantaranya adalah norma-norma sosial atau nilai yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku deviasi terjadi karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang berorientasi pada perilaku kelompok. Justru struktur dan proses

dalam masyarakatlah menjadi penyebab terjadinya pelanggaran norma. Sementara itu menurut Shaw and Mac Kay, Sellin and Sutherland, konflik kepentingan dalam sistem nilai dan kebudayaan merupakan sumber deviasi.

Studi deviasi pada periode normatif disebutkan bahwa gejala deviasi dapat dipelajari secara obyektif yang artinya penyebab terjadinya tingkah laku adalah masyarakat itu sendiri. Disamping itu studi deviasi dipandang memiliki sifat *value free* atau bebas nilai, bebas nilai dan merupakan usaha yang murni ilmiah, oleh karena itu studi deviasi menjadi *kulminatif*.

Studi deviasi pada periode normatif ini kemudian berkembang sesuai dengan tuntutan akan kebenaran keilmuan, sehingga beberapa kelemahan studi deviasi pada periode ini adalah kajian deviasi hanya mendasarkan pada data-data sekunder atau *official record* dan karena mengandalkan data-data tersebut maka deviasi yang sesungguhnya mungkin tidak terungkap karena banyak yang tidak dicatat, dilaporkan atau tercatat oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga angka-angka deviasi tidak lebih besar dari yang sebenarnya (tidak sesuai dengan kenyataan). Kajian deviasi kemudian dikembangkan tidak hanya mengandalkan *official record* melainkan metode yang lain, misalnya *self report*, dengan mengandalkan pada laporan pribadi si pelaku deviasi, maka hasilnya akan sesuai

dengan apa yang sebenarnya terjadi. Data-data official record lebih menggambarkan tingginya kontrol sosial terhadap masyarakat lapisan bawah dan bukan tingginya pelanggaran norma yang sebenarnya. Kemandirian studi deviasi ditandai dengan munculnya buku Marshal B Clinard (1957 dan edisi berikutnya hingga pada edisi tahun 1989) dengan judul bukunya *Sociology of Deviant Behavior* yang sangat terkenal dan banyak digunakan sebagai referensi dalam menganalisis masalah sosial, kriminalitas dan terutama deviasi sebagai kajian yang mandiri khususnya dari sudut pandang sosiologi.

D. Periode Relativistik

Periode relativistik ini dimulai pada tahun 1960 an sampai 1970 an dengan tokoh-tokoh antara lain Kitsuse (1962); Erickson (1962) dan Becker (1963). Pada periode ini ditandai dengan dengan dominannya teori Label yang sebenarnya dimulai oleh Tannenbaum (1938), akan tetapi teori label justru banyak dikenal sebagai pencetusnya yaitu EM Lemert dalam buku berjudul *Social Pathology*, meskipun buku ini disebutnya sebagai menyesatkan atau *misleading*. Label menekankan bahwa pengalaman dicap sebagai devian atau *delinquent* akan menyebabkan orang tersebut menyandang karier devian.

Berbeda dengan pandangan kaum normatif terhadap perilaku menyimpang, yang karena kesepetakan terhadap

norma dipandang jelas sehingga pelanggaran terhadap norma juga jelas. Akan tetapi pada periode relativistik ini, asumsinya bahwa masyarakat pada periode relativistik ini adalah kompleks, kesepakatan terhadap norma tidak jelas, maka pelanggaran terhadap norma pun juga tidak jelas, artinya kepatuhan terhadap norma berkurang, atau lemah. Kondisi ini berakibat pada pandangan bahwa norma itu berwayuh hati, bermakna ganda atau *ambiguity*. Di satu sisi manusia cenderung patuh pada norma tertentu tetapi pada sisi lain tidak patuh terhadap norma lain. Seringkali norma menjadi relatif.

Pandangan relativistik ini menekankan perhatian utamanya bukan pada bentuk-bentuk perilaku manusia yang menyimpang melainkan pada proses bagaimana individu dicap atau diberi label sebagai devian. Karena kajian mengenai proses ini akan dapat mengungkap bentuk perilaku menyimpang itu secara lebih signifikan. Kajian proses perilaku menyimpang dapat mengungkap perilaku itu secara urut, langkah per langkah sehingga secara keseluruhan perilaku menyimpang dapat tergambar dan disini letak relativistiknya perilaku itu. Dan cap atau label akan melekat sesuai dengan kajian proses perilaku devian itu.

Ringkasan

1. James D Orcutt menyatakan, bahwa perkembangan studi deviasi dapat dibagi menjadi empat tahap.
2. Pada periode patologi sosial dan disorganisasi sosial, studi deviasi belum membentuk disiplin ilmu yang mandiri.
3. Periode normatif, sebagai kajian deviasi sosial mulai menjadi studi yang khusus, yaitu tentang perilaku menyimpang.
4. Periode patologi sosial (awal abad XX – PD I) dapat dijelaskan secara tematik melalui beberapa langkah.
5. Pada akhir abad 19 para sosiolog Amerika dipengaruhi oleh dua tokoh, yaitu *Auguste Comte* terutama pandangannya mengenai konsep *organismik*nya.
6. Pendapat Herbert Spencer memunculkan pandangan baru tentang masalah sosial yang dianggapnya sebagai sebuah kegagalan adaptasi individu terhadap kehidupan masyarakat yang relatif teratur.
7. Kelemahan konsep patologi sosial antara lain, apa yang disebut patologi hanya tergantung pada pendapat peneliti, tidak didasarkan pada kriteria obyektif.
8. Pada periode disorganisasi sosial, studi deviasi dan masalah sosial banyak diminati ahli sosiologi, khususnya mazhab Chicago yang mengubah paradigma berpikirnya dari yang moralis menjadi bercorak ilmiah.

9. Masyarakat yang mengalami industrialisasi menjadikan individu-individu yang ada di dalamnya berusaha untuk melakukan adaptasi dan antara lain adalah urbanisasi.
10. Mazhab Chicago mengemukakan pandangannya tentang fenomena bunuh diri sebagai bagian penting dalam mempelajari disiplin ilmu deviasi sebagai kajian yang mandiri.
11. WI Thomas dan Florian Zuamiesks menyebut disorganisasi pribadi atau personal atau berkurangnya kemampuan individu dalam kelompok dalam mengorganisasi keseluruhan hidupnya.
12. Untuk mempelajari studi disorganisasi sosial ini, metode penelitiannya antara lain *case study* atau *life history*, khususnya untuk memahami dampak yang diakibatkan oleh disorganisasi bagi kelompok masyarakat tertentu.
13. Sebagai gambaran dari *Burgess* membagi kota Chicago menjadi lima zona, sebagai berikut zona *pertama* daerah pusat bisnis, zona *kedua* daerah transisi, daerah campuran, daerah kumuh atau *slum area*.
14. Zona *ketiga* dikenal dengan daerah tempat dimana para pekerja pabrik tinggal.

15. Studi deviasi pada periode disorganisasi ini memiliki beberapa kelemahan antara lain kajian terhadap masalah sosial dan deviasi.
16. Sebaliknya studi disorganisasi sosial ini juga memiliki keunggulan, yaitu setidaknya fenomena masalah sosial dan deviasi dapat dikaji melalui perspektif sosiologik, karena menggunakan fakta empirik sebagai pembuktian teoritisnya.
17. Studi deviasi pada periode normatif ini (tahun 1938 sampai tahun 1939) dipelopori oleh Robert K Merton dengan teori *anominya* dan Sutherland, yang juga seorang ahli kriminologi yang dikenal dengan teorinya *asosiasi deferensial* dengan sembilan dalil atau prinsip perilaku menyimpang yang memiliki pola tetap tetapi sangat kompleks.
18. Sumber tingkah laku deviasi bukan berasal dari jenis individu yang bersangkutan melainkan dari jenis tekanan lingkungan sosial. Tekanan ini yang diantaranya adalah norma-norma sosial atau nilai yang ada pada masyarakat yang bersangkutan.
19. Studi deviasi pada periode normatif disebutkan bahwa gejala deviasi dapat dipelajari secara obyektif yang artinya

penyebab terjadinya tingkah laku adalah masyarakat itu sendiri.

20. Studi deviasi pada periode normatif ini kemudian berkembang sesuai dengan tuntutan akan kebenaran keilmuan.
21. Periode relativistik ini dimulai pada tahun 1960 an sampai 1970 an dengan tokoh-tokoh antara lain Kitsuse (1962); Erickson (1962) dan Becker (1963). Pada periode ini ditandai dengan dengan dominannya teori Label yang sebenarnya dimulai oleh Tannenbaum (1938), akan tetapi teori label justru banyak dikenal sebagai pencetusnya yaitu EM Lemert dalam buku berjudul *Social Pathology*.
22. Berbeda dengan pandangan kaum normatif terhadap perilaku menyimpang, yang karena kesepetakan terhadap norma dipandang jelas sehingga pelanggaran terhadap norma juga jela.
23. Pandangan relativistik ini menekankan perhatian utamanya bukan pada bentuk-bentuk perilaku manusia yang menyimpang melainkan pada proses bagaimana individu dicap atau diberi label sebagai devian.

BAB VI

METODE PENELITIAN STUDI DEVIASI

Menurut Edwin P. Hallander setiap studi ilmiah memiliki empat unsur, yaitu *pertama* satu himpunan fenomena yang dipelajari, dalam hal ini adalah gejala deviasi baik dalam arti normatif maupun relatif. *Kedua* sejumlah teori yaitu konsep atau pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memberi eksplanasi tentang gejala-gejala yang menjadi obyek kajiannya, misalnya teori anomie, teori konflik, teori label, teori kontrol dan lain sebagainya. *Ketiga* beberapa metode penelitian yaitu cara yang sistematis yang digunakan untuk mempelajari gejala-gejala yang menjadi obyek. Metode-metode penelitian ini yang akan dibahas pada bab VI ini secara lebih lengkap dan spesifik. *Keempat* kumpulan temuan dalam bentuk pengetahuan tentang gejala yang diselidiki. Kumpulan temuan itu biasanya termuat dalam *textbook* misalnya dalam Clinard & Meier dengan bukunya yang berjudul *Sociology of Deviant Behavior*, dan diterbitkan pada tahun 1989.

Secara garis besar metode penelitian studi deviasi ini sebagaimana ilmu pengetahuan yang lain dilalui melalui tahap-tahap tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau obyektif. Seringkali teori atas penjelasan suatu obyek tertentu memiliki kesenjangan dengan penerapannya.

Sebuah penerapan atau kebijakan sosial atau kebijakan sosial tidak sama dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Artinya sebuah kebijakan seringkali tidak dilalui oleh sejumlah tahapan. Kebijakan sosial sering diambil oleh karena peristiwa-peristiwa khusus untuk diambil sebuah keputusan. Namun secara umum sebuah kebijakan sosial atau implementasi kebijakan dapat diambil dengan melalui beberapa tahap. Adapun tahap-tahap itu, meliputi obyek studi dan *yang melahirkan teori* serta **bukti** atau dilakukan dengan penelitian (*research*) untuk **kebijakan sosial**. Oleh karena itu, sebuah obyek studi akan mudah dipahami dan dipelajari apabila melalui tahapan-tahapan tertentu. Ada gejala deviasi atau masalah, ada teori atau jawaban atas permasalahan. Ada *research* atau dengan metode penelitian dalam rangka menunjukkan bukti-bukti atas gejala tersebut, serta implikasi atau konsekuensi atas tahapan-tahapan yang dilalui tersebut di atas. Sebagai contoh dalam menentukan, menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan untuk masyarakat secara keseluruhan maka di dahului sebuah proses, dan proses itu biasanya diawali dengan gejala sosial atau permasalahan yang muncul dan memerlukan penanganan berupa kebijakan-kebijakan tertentu. Proses tersebut adalah seperti yang diuraikan di atas. Akan tetapi tidak semua kebijakan sosial diambil dengan melalui tahapan-tahapan

tertentu, oleh karena sifat peristiwa atau permasalahannya cukup mendesak atau karena memerlukan tindakan yang cepat. Misalnya, dampak bencana alam, atau karena untuk mengatasi keresahan, kerawanan sosial yang terjadi.

Obyek studi dalam kajian ini, misalnya deviasi dalam hal ini pelanggaran norma, tingkah laku sosiopatik atau *deviant behavior*. Obyek studi ini juga bisa berupa permasalahan sosial, suatu permasalahan adalah suatu situasi yang tidak diharapkan namun ada di dalam masyarakat dan oleh karenanya memerlukan solusi untuk mengatasinya.

Teori adalah suatu rangkaian pernyataan atau preposisi yang saling berkaitan yang digunakan untuk menerangkan kejadian atau suatu hal yang menjadi obyek studi. Eksplanasi adalah menjelaskan, menerangkan. Aspek eksplanasi terdiri dari logika dan substantif (isinya harus benar). Logika berarti secara ringkas dapat diterangkan sosiologismenya. Misalnya, jika pengangguran meningkat, maka pelanggaran norma juga meningkat, di negara A pengangguran mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu antara tahun 2000 – 2005.

Secara substantif , eksplanasi harus berisi hubungan sebab akibat. Dalam perspektif sosiologi, sifat kausalitas atau hubungan sebab akibat menjadi karakteristik penelitian kajian-kajian yang sosiologis. Teori akan menjadi mapan, kuat dan

bahkan menjadi sebuah bangunan ilmu apabila melalui teori, sesuatu dapat dibuktikan secara empirik tetapi sebaliknya sebuah teori juga dapat didahului dengan adanya asumsi (asumsi berarti tidak selalu harus dibuktikan).

Asumsi ada dua, yaitu implisit atau yang tersirat dan eksplisit atau apa yang tertulis. Contoh asumsi dalam studi deviasi sosial, yaitu masyarakat yang teratur, kalau masyarakat itu teratur, maka norma sosial juga jelas. Masyarakat itu tidak teratur, sehingga norma sosial juga kabur, selalu berubah dan tidak konsisten, norma hanya sebagai label saja. Individu adalah makhluk yang pasif, tingkah lakunya ditentukan oleh lingkungan. Individu adalah makhluk yang aktif atau makhluk yang menentukan dirinya sendiri.

Research dapat juga dikatakan sebuah penyelidikan dalam rangka menunjukkan bukti. *Research* atau penelitian adalah observasi yang sistematis terhadap fenomena sosial yang menjadi obyek kajiannya.

Observasi dalam studi deviasi dapat meliputi, yaitu *official Record* atau data-data yang bersifat kuantitatif, data-data sekunder yang berupa statistik, dokumen resmi atau *record* tidak sama dengan dokumen (verbal) data yang bersifat kualitatif. *Record* dalam metode penelitian deviasi sosial ini adalah dokumen yang bersifat statistik, misalnya angka-angka

dalam penelitian statistik yang menunjuk jumlah kejadian, misalnya kriminalitas, angka-angka kemiskinan, angka-angka tindak kekerasan (KDRT) dan lain lain, dari tahun ke tahun pada masyarakat tertentu. Sementara dokumen bisa berupa catatan yang berupa pernyataan.

Record memiliki beberapa kegunaan antara lain, (a) besarnya kasus, (b) mengetahui tingkat pertumbuhan, (c) mengetahui distribusi kasus, seperti jenis kelamin, asal daerah desa dan kota, umur, agama, dan lain lain serta (d) untuk mengetes suatu teori, misalnya jika bunuh diri banyak dilakukan oleh orang yang tidak menikah menurut Emile Durkheim.

Official record banyak digunakan oleh para ahli studi deviasi yang mengandalkan angka-angka statistik dari data-data sekunder, misalnya Robert Merton dalam menganalisa fenomena kesenjangan sosial dalam masyarakat dalam kaitannya dengan pelanggaran norma.

Official record dalam beberapa hal memiliki kelemahan antara lain, yaitu (a) bahwa angka-angka dalam record atau statistik selalu lebih kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Sumber *official record* ini adalah dari laporan masyarakat dan deteksi petugas. (b) statistik seringkali bias, karena waktu dan tempat. (c) biasanya yang tercatat itu adalah golongan lapisan bawah.

Self Report atau laporan pribadi. *Self report* pada dasarnya merupakan sebuah laporan pribadi dari pelaku atau yang dianggap telah melakukan pelanggaran norma tentang mengapa, apa dan bagaimana pelanggaran norma itu dimaknai sendiri oleh pelaku. Sebagai contoh, melalui catatan-catatan atas perilaku menyimpangnya diberikan kepada pihak tertentu atau peneliti untuk dipergunakan sebagai bahan analisa terhadap fenomena.

Contoh lain adalah bagaimana kita bisa melihat tayangan televisi atas fakta atau fenomena yang diungkap tentang penjualan daging sapi glondongan, penjualan makanan yang daur ulang atau dengan zat-zat tertentu sebagai pengawet, dan lain lain. Yang semuanya dilaporkan secara langsung, meski wajah pelapor disamarkan atau dibuat tidak jelas dalam tayangan program, namun apa yang dilakukan sebagaimana diketahui sebagai sebuah pelanggaran norma telah dilaporkan secara pribadi.

Oleh karena itu, *self report* tersebut dapat diungkap melalui metode wawancara ataupun angket yang akan diisi secara pribadi oleh pelaku pelanggaran norma. Dalam *self report* yang diperoleh melalui wawancara memiliki beberapa kelemahan antara lain: pelanggaran tidak sesuai dengan kenyataan; masalah sampling dan jawaban seringkali tidak

jujur. Sementara itu kelemahan menggunakan angket dapat terjadi karena: subyek yang labil, kelupaan, pelanggaran berat sulit diungkap dan jika responden buta huruf.

Direct observation atau pengamatan langsung dapat terdiri dari observasi yang alamiah atau eksperimen. Biasanya observasi alamiah dalam kajian deviasi dan masalah sosial dapat berlangsung dengan partisipasi dan non partisipasi. Eksperimen dapat dilakukan melalui laboratorium dan di lapangan. Observasi terhadap perilaku menyimpang misalnya fenomena narkoba, homoseksual, pelacuran (prostitusi) dapat dilakukan dan memiliki kelemahan antara lain: mengubah situasi tidak wajar, kemampuan peneliti terbatas, memakan waktu, tidak semua penelitian dapat diteliti dengan cara ini.

Penelitian melalui eksperimen dapat dilakukan di lapangan misalnya tentang kejujuran. Penelitian di laboratorium, misalnya untuk mengetahui tingkah laku agresif, dengan melakukan eksperimen terhadap anak-anak yang diminta melihat sebuah film tentang perlakuan ibu yang sedang menghukum anaknya. Setelah itu anak-anak diberi sebuah boneka, dan dari sana dapat dilihat bagaimana tingkah laku anak terhadap boneka yang dipegangnya. Apakah ada pengaruh film terhadap perilaku agresif anak terhadap sesuatu? Metode eksperimen ini memiliki kelemahan yaitu

eksperimen tidak bisa dilakukan untuk deviasi yang berat selain hasil eksperimen sering tidak cocok.

Kebijakan Sosial atau *social policy*, tidak sama dengan kebijaksanaan atau *wisdom* adalah sebuah keputusan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan masalah. Penelitian kebijakan, seringkali kebijakan dapat diambil terlebih dahulu, karena masalahnya mendesak, atau masyarakat sudah tidak sabar lagi. Sebagai contoh ketika masyarakat mengalami keresahan karena terjadinya gejala prostitusi maka diambil keputusan untuk lokalisasi gejala tersebut, supaya kontrolnya mudah, kemudian baru dilakukan serangkaian penelitian lokalisasi dengan berbagai teknik untuk dilihat sisi positif dan negatifnya. Kebijakan sosial biasanya berpikir secara etiologik, karena kebijakan sosial berarti kita memanipulasi (bukan sebuah kejahatan). Kebijakan ini diambil untuk mencegah, memperbaiki, mengubah dan mengurangi kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masalah atau kajian deviasi bisa diteliti, misalnya kejahatan dalam dunia maya. Selain itu biaya penelitian besar. Oleh karena itu seringkali kebijakan diambil terlebih dahulu tanpa dilakukan proses penelitian.

Kesenjangan antara penelitian dan kebijakan di atasi dengan, teknologi sosial atau rekayasa sosial. Nilai sosial

adalah keputusan diambil dengan nilai yang matang. Kekuatan sosial dapat diambil berdasarkan keputusan pemerintah yang sedang berkuasa. Akan tetapi kekuatan sosial juga sering tidak bisa dilakukan.

Misalnya ketika ahli sosiologi menemukan bahwa krisis ekonomi global maka fenomena sosial juga terjadi antara lain angka kemiskinan meningkat, pengangguran, angka bunuh diri meningkat, masalah sosial lain atau drop out juga meningkat, maka apa yang bisa dilakukan? Tentu dengan memperbaiki keadaan ekonomi, akan tetapi juga belum tentu begitu saja dapat dilakukan oleh bidang ekonomi karena ekonomi Indonesia tergantung ekonomi dunia. Fenomena kesenjangan penghasilan juga menyebabkan kejahatan, maka harus dilakukan pemertaan pendapatan yang tentu saja secara makro sangat sulit dilakukan. Maka sebuah kebijakan sosial yang diambil akan selalu menimbulkan pro dan kontra, senang atau tidak senang, dirugikan atau merugikan. Apabila kejahatan di muka bumi ini benar-benar dihapuskan, maka polisi tidak terlalu senang karena kehilangan pekerjaan.

Ringkasan

1. Studi ilmiah memiliki empat unsur, pertama satu himpunan fenomena yang dipelajari, kedua sejumlah teori, ketiga

beberapa metode penelitian, keempat kumpulan temuan dalam bentuk pengetahuan tentang gejala yang diselidiki.

2. Secara garis besar metode penelitian studi deviasi ini sebagaimana ilmu pengetahuan yang lain dilalui melalui tahap-tahap tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau obyektif.
3. Obyek studi dalam kajian ini, misalnya pelanggaran norma, tingkah laku sosiopatik atau *deviant behavior*.
4. Teori adalah suatu rangkaian pernyataan atau preposisi yang saling berkaitan yang digunakan untuk menerangkan kejadian atau suatu hal yang menjadi obyek studi.
5. Secara substantif, eksplanasi harus berisi hubungan sebab akibat. Dalam perspektif sosiologi, sifat kausalitas atau hubungan sebab akibat menjadi karakteristik penelitian kajian-kajian yang sosiologis.
6. Asumsi ada dua, yaitu implisit atau yang tersirat dan eksplisit atau apa yang tertulis.
7. *Research* dapat juga dikatakan sebuah penyelidikan dalam rangka menunjukkan bukti.
8. Observasi dalam studi deviasi dapat meliputi, *official record* atau data-data yang bersifat kuantitatif, data-data sekunder yang berupa statistik, dokumen resmi atau *record* tidak sama dengan dokumen (verbal) data yang bersifat kualitatif.

9. *Record* memiliki beberapa kegunaan antara lain, (a) besarnya kasus, (b) mengetahui tingkat pertumbuhan, (c) mengetahui distribusi kasus, (d) mengetes suatu teori.
10. *Official record* banyak digunakan oleh para ahli studi deviasi yang mengandalkan angka-angka statistik dari data-data sekunder.
11. *Official record* dalam beberapa hal memiliki kelemahan antara lain, (a) angka-angka dalam record atau statistik selalu lebih kecil dari kenyataan yang sebenarnya, (b) statistik seringkali bias, (c) biasanya yang tercatat adalah golongan lapisan bawah.
12. *Self report* atau laporan pribadi pelaku yang dianggap telah melakukan pelanggaran norma, apa dan bagaimana pelanggaran norma dimaknai sendiri oleh pelaku.
13. *Self report* dapat diungkap melalui metode wawancara ataupun angket yang akan diisi secara pribadi oleh pelaku pelanggaran norma.
14. *Direct observation* atau pengamatan langsung dapat terdiri dari observasi yang alamiah atau eksperimen.
15. Penelitian melalui eksperimen dapat dilakukan di lapangan misalnya tentang kejujuran, di laboratorium misalnya untuk mengetahui tingkah laku agresif.

16. Kebijakan sosial atau *social policy*, tidak sama dengan kebijaksanaan atau *wisdom* adalah sebuah keputusan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan masalah.
17. Kesenjangan antara penelitian dan kebijakan di atasi dengan, teknologi sosial atau rekayasa sosial.
18. Misalnya ketika ahli sosiologi menemukan krisis ekonomi global, maka fenomena sosial yang terjadi adalah angka kemiskinan, pengangguran, bunuh diri meningkat, dan masalah sosial lain atau drop out juga meningkat, dan apa yang bisa dilakukan?

BAB VII

KAJIAN DEVIASI SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF TRADISIONAL

A. Deviasi Dipandang Sebagai Tingkah Laku Manusia yang Melanggar Norma

Setiap masyarakat memiliki sistem norma sebagai pedoman setiap anggota masyarakat untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh atau sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Norma sebagai satu set aturan memiliki dua fungsi yaitu pertama sebagai aturan yang memberi kemudahan atau yang menyediakan fasilitas bagi anggota masyarakat untuk berperilaku demikian, dan yang kedua membatasi manusia dalam berperilaku agar sesuai dengan sistem sistem norma yang berlaku. Setidaknya norma itu muncul atas kebutuhan dasar manusia dalam berperilaku ekonomi atau *economic*, pendidikan atau *education*, agama atau *religi*, keluarga atau *family*, dan politik atau *politic*. Melalui satu set norma tersebut, manusia dalam interaksinya dalam masyarakat dapat terjadi sebuah harmoni sosial atau sebuah keteraturan dalam berperilaku. Umumnya manusia atau individu dalam interaksinya dengan individu atau kelompok lain untuk tujuan tertentu atau disebut juga dengan *main goalnya* dengan menyesuaikan norma-norma yang berlaku disebut sebagai *konformitas*. Sebaliknya ada individu atau kelompok tertentu

dalam mencapai tujuannya tidak dapat menyesuaikan norma yang berlaku disebut *deviasi*.

Terkadang dalam implementasinya, norma tidak sepenuhnya menjadi pedoman, karena sangat terpengaruh oleh kehendak pribadi individu. Artinya, di satu sisi individu dalam berperilaku sangat patuh tetapi dari sisi yang lain sangat tidak patuh atau melakukan pelanggaran norma. Sebagai contoh seorang pencuri bagi masyarakat umum adalah seorang devian akan tetapi ia sangat setia dan jujur pada anak, istri atau keluarganya. Oleh karena itu, bagi individu norma memiliki sifat yang *ambiguiti*, berwayuh hati, bermuka dua atau ganda. Ketika norma tidak lagi menjadi patokan atau lemah maka pelanggaran norma pun juga mudah terjadi. Norma itu muncul sebagai sebuah kesepakatan dan fungsional, dan ketika norma mengalami *disfungsional* maka yang terjadi adalah pelanggaran norma.

Ketika individu dalam berperilaku tidak sesuai dengan norma yang berlaku, menurut definisi dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma disebut juga *norm violation*. Norma sebagaimana juga *values* atau nilai memiliki fungsi terhadap yang lain. Norma ekonomi memiliki aturannya sendiri untuk mengatur manusia dalam berperilaku ekonomi, demikian pula halnya dengan norma pendidikan, keluarga, agama atau

politik. Apabila salah satu norma mengalami perubahan, pergeseran maka norma yang lainpun juga mengalami perubahan. Contoh, saat ini sistem norma ekonomi sedang mengalami perubahan karena dampak terjadinya krisis keuangan global yang dimulai dari negara kuat seperti Amerika. Pergeseran atau krisis ekonomi yang terjadi sangat berpengaruh terhadap setiap pengambilan keputusan negara-negara lain secara politik, ekonomi dan bahkan sistem pendidikan pun juga mengalami perubahan. Hal senada juga dapat terjadi pada sistem norma keluarga atau agama. Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga yang sebenarnya memiliki fungsi dalam pengembangan kepribadian melalui pendidikan agama, namun karena perkembangan masyarakat, maka keluarga bukan satu-satunya lembaga yang dapat menjadi tempat pengembangan anak dalam berperilaku agama, melainkan sudah ada substitusi atau lembaga pengganti dalam pendidikan agama, yaitu pesantren-pesantren, pondok, sekolah minggu dan sebagainya. Analoginya adalah bahwa norma yang lain memiliki fungsi yang sama terhadap yang lain. Demikian pula halnya dengan nilai atau *values*, adalah sesuatu yang diyakini oleh sebagian besar anggota masyarakat itu ada dan dijunjung tinggi sebagai milik bersama untuk tujuan bersama pula misalnya kejujuran, rasa keadilan, disiplin, tanggungjawab,

visioner, kerja sama. Nilai-nilai tersebut memiliki sifat yang universal, bahwa setiap masyarakat memiliki nilai tersebut sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi. Dalam keluarga, sekolah atau di lembaga-lembaga lain satu set norma dan sistem nilai tersebut disosialisasikan dan diinternalisasikan dalam setiap anggota masyarakat melalui proses belajar.

Segala unsur yang ada dalam masyarakat seperti norma dan nilai tersebut adalah bagian dari kebudayaan dan kebudayaan adalah *way of life of a society* akan dimiliki, dialihgenerasikan secara turun temurun menurut Koentjaraningrat hanya dapat berlangsung melalui proses belajar bukan genetis. Oleh karena itu, pendidikan formal maupun non formal dan informal menjadi salah satu sarana berkembangnya kebudayaan dalam hal ini norma dan nilai. Seorang bayi yang baru saja lahir bila dimasukkan ke kolam tidak bisa berenang, karena renang sebagai salah satu aktivitas hanya dapat dilakukan karena proses belajar, berbeda dengan ikan begitu lepas dari perut induknya langsung bisa berenang. Hanya manusia yang memiliki kebudayaan dan akal serta budi untuk mengembangkan unsur-unsur budaya yang sekiranya dapat memiliki fungsi terhadap kelangsungan hidup, sementara hewan tidak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap unsur kebudayaan adalah sistem norma dan nilai memiliki fungsi terhadap sistem secara keseluruhan. Sebaliknya apabila unsur itu tidak lagi memiliki fungsi maka akan lenyap atau hilang. Penjelasan tersebut dipertegas dalam terori Strukturalis Fungsionalisme atau disebut juga dengan S/F yang diperkenalkan oleh seorang sosiolog bernama Emile Durkheim yang mengatakan bahwa setiap unsur dalam masyarakat akan ada apabila memiliki fungsi terhadap kehidupan, seperti halnya kejahatan, pembunuhan, prostitusi atau perjudian. Ketiga unsur tadi setidaknya muncul sejak sejarah manusia mulai ada. Artinya ketiga unsur tadi memiliki fungsi terhadap yang lain. Pembunuhan adalah unsur yang terus ada setidaknya memiliki fungsi bagi kepolisian yang akan terus ada pekerjaan untuk menyelidik kasus pembunuhan. Disamping itu unsur itu ada setidaknya akan menjadi sarana bagi semakin mempererat kekompakan masyarakat untuk bersatu dan memperkuat kohesi dalam mencegah terjadinya kejahatan. Demikian pula halnya dengan prostitusi dan perjudian paling tidak memiliki fungsi bagi sebagian anggota masyarakat yang bekerja sebagai pelacur atau setidaknya menjadi katup pengaman bagi orang yang menyukai prostitusi maupun perjudian. Durkheim berpendapat bahwa penjahat dipandang sebagai makhluk yang

memiliki peranan sosial, jadi devian tidak lagi dipandang sebagai patologi yang harus disembuhkan, melainkan justru dipelajari apa sumbangannya terhadap masyarakat. Bukan berarti pernyataan ini menyetujui adanya kejahatan, akan tetapi pernyataan ini hendak menegaskan bahwa di masyarakat terdiri dari banyak kelompok yang saling berkaitan bahkan saling menguntungkan. Analoginya adalah bahwa masing-masing komponen memiliki fungsi terhadap yang lain, atau seperti halnya tubuh manusia yang terdiri dari beberapa komponen, masing-masing memiliki kontribusi terhadap yang lainnya.

Sesuatu dikatakan memiliki fungsi apabila sesuatu tersebut memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat, seperti fungsi anggota badan manusia. Bila sesuatu tersebut mengalami kegagalan fungsi atau disfungsi, maka sesuatu itu akan hilang. Sebagai contoh, keris yang dalam budaya Jawa memiliki fungsi ganda, misalnya sebagai simbol status, fungsi sebagai senjata barangkali akan tergeser oleh simbol-simbol status yang lain, atau sebagai senjata menjadi tidak lagi fungsional karena tergeser oleh senjata lain yang lebih cepat, akurat dan mematikan. Keadaan ini akan terjadi oleh perkembangan masyarakat dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Tampak bahwa keris masih digunakan mungkin

bukan lagi senjata dalam arti yang sebenarnya melainkan menjadi barang seni atau keramat yang disimpan. Atau juga masih berfungsi sebagai senjata yang ampuh dalam seni pewayangan atau ketoprak. Bagi kaum fungsionalis, semua bentuk aktivitas baik yang konvensional maupun devian yang terjadi secara berulang dan bertahan dipandang sebagai sesuatu yang berfungsi bagi masyarakat. Demikian pula kondisi miskin dan kaya, masih saling berfungsi satu terhadap lainnya.

Bila menilik pada pelopor awal berkembangnya sosiologi deviasi sejak teori S/F atau Strukturalis Fungsionalisme ini menurut teori ini masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang terpadu dan teratur, artinya setiap individu dalam masyarakat dianggap sepakat tentang nilai-nilai pokok, misalnya makna Pancasila, NKRI, UUD'45 dan sebagainya. Umumnya masyarakat memiliki kesepakatan atau konsensus sosial atau mengakui bersama tentang sesuatu. Menurut teori ini, struktur sosial dapat digunakan untuk menilai atau merealisasikan nilai tujuan masyarakat. Berdasarkan strukturalis fungsionalisme ini pola-pola tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat memiliki bentuk. Misalnya Institusi agama, memiliki fungsi terhadap institusi ekonomi, kapitalisme di Eropa. Bentuk protestanisasi menimbulkan kapitalisme di Eropa. Dalam

analogi sosiologi, fungsi dibedakan menjadi dua menurut Robert Merton, yaitu *fungsi manifest* dan *fungsi latent*.

Fungsi manifest, artinya pola tingkah laku yang oleh sebagian besar masyarakat memang diharapkan, memiliki fungsi sebagaimana masyarakat berharap. Sementara itu fungsi latent, sebenarnya unsur dalam masyarakat tidak diharapkan lagi ada namun pada kenyataannya muncul sebagaimana fungsi yang lain. Misalnya, sebuah gedung diskotik, *cafe* atau *club* didirikan sebagai sebuah bisnis yang sangat digemari masyarakat karena memberi fasilitas untuk kebutuhan kebugaran, relaksasi, hiburan atau sekedar mengendorkan kejenuhan-kejenuhan, karena secara manifest fasilitas itu diperlukan untuk tujuan yang baik. Namun seiring tercapainya tujuan masyarakat untuk memperoleh kemudahan, juga sangat mungkin terjadi hal-hal yang sangat jauh dari harapan masyarakat, misalnya fasilitas itu digunakan untuk transaksi narkoba. Ada hal-hal yang bersifat manifest tapi juga terjadi fungsi-fungsi latennya. Contoh lain, warung internet saat ini begitu banyak muncul karena masyarakat menghendaki pengetahuan, informasi dan komunikasi yang cepat, akurat dan murah, namun demikian juga terjadi transaksi seks, atau perbuatan-perbuatan lain yang di luar batas tata susila yang ada.

Fungsionalisme yang lain, yakni Kingsley Davis dengan bukunya yang berjudul *The Sociology of Prostitution* juga menjelaskan mengapa prostitusi terdapat di semua masyarakat. Ia mengatakan untuk menjaga ketertiban masyarakat, maka seksualitas harus dibatasi oleh tujuan sosial, yaitu melahirkan dan mendidik anak. Jadi praktek seksualitas yang sah harus terjadi dalam ikatan keluarga. Akan tetapi karena hakekatnya seksualitas manusia itu liar, maka prostitusi itu berfungsi menyalurkan kebutuhan seksual yang interpersonal dan darurat di luar keluarga. Prostitusi merupakan pemuasan seks manusia tanpa adanya ikatan yang macam-macam. Menurutnya keluarga dan prostitusi institusi yang komplementer.

Teori Fungsional-struktural adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial. Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer.

Pokok-pokok para ahli dari aliran strukturalis fungsionalisme ini telah banyak merumuskan dan mendiskusikan dan menuangkan ke berbagai ide dan gagasan dalam mencari paradigma tentang teori strukturalis fungsionalisme, sebut saja George Ritzer (1980), Margaret M.

Poloma (1987), dan Turner (1986). Soetomo (1995) mengatakan apabila ditelusuri dari paradigma yang digunakan, maka teori ini dikembangkan dari paradigma fakta sosial. Tampilnya paradigma ini merupakan usaha sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru lahir agar mempunyai kedudukan sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. <http://adjhee.wordpress.com/2007/11/08/teori-fungsional-struktural/-ftn2>.

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori *fungsional structural*, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini atau teori *fungsional structural* menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran

dari para penganutnya. <http://adjhee.wordpress.com/2007/11/08/teori-fungsional-struktural/-ftn3>.

Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme-struktural merupakan suatu yang 'berbeda', hal ini disebabkan karena Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut menurut Durkheim memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat "patologis" <http://adjhee.wordpress.com/2007/11/08/teori-fungsional-struktural/-ftn4>. Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai ekuilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan social. <http://adjhee.wordpress.Com/2007/11/08/teori-fungsional-struktural/-ftn5>.

Pada awal berkembangnya studi sosiologi deviasi yang ditandai oleh teori strukturalisme dan fungsionalisme, masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang terpadu dan

teratur, orang sepakat tentang nilai-nilai yang pokok dan ada konsensus sosial serta diikuti dengan nilai yang diakui bersama. Menurut teori ini struktur sosial untuk menilai dan merealisasikan nilai tujuan masyarakat. Menurut S/F atau teori struktural fungsional, pola tingkah laku yang berlaku di masyarakat memiliki bentuk, misalnya institusi agama, mempunyai fungsi terhadap institusi yang lain, ekonomi berfungsi untuk kapitalisme di Eropa. Protestanisme menimbulkan kapitalisme di Eropa. Sebagaimana disebutkan bahwa Fungsi menurut Robert K Merton, dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi *manifest* dan fungsi *Latent*.

Fungsi *manifest* adalah pola-pola tingkah laku yang diharapkan dan dikenal dalam masyarakat, fungsi yang secara nyata diakui. Contoh, institusi agama berfungsi untuk mempertahankan moral masyarakat, Ilmu pendidikan formal merupakan jalan yang resmi untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Contoh lain, ketika pemerintah hendak mendatangkan turis, sehingga menciptakan sesuatu yang menarik para turis, dengan *club*, restoran ini adalah fungsi manifest, akan tetapi dibalik itu mungkin timbul prostitusi terselubung. Fungsi *latent* atau tersembunyi fungsi yang tidak nampak, tidak dikenal, misalnya mekanisme politik dapat menyebabkan seseorang mencapai jenjang yang tinggi tanpa melalui demokrasi.

Seseorang yang aktif dalam kegiatan politik, akhirnya mampu menjadi anggota DPR, menteri dan sebagainya.

Menurut teori struktural fungsional atau S/F, konsensus sosial itu jelas, maka landasan sosialnya juga jelas. Maka pelanggaran norma itu sebagai obyek studi. Jadi deviasi sebagai *norm violation* atau pelanggaran norma. Konsensus sosial pada umumnya terjadi pada masyarakat yang teratur. Akan tetapi menurut teori label, masyarakat itu tidak teratur sehingga tidak sama dengan konsensus.

Dalam studi deviasi ini terdapat dua aliran, yaitu (1) pelanggaran norma dipandang sebagai pencerminan dari gangguan tata sosial atau *social orde*. Pencerminan dari retaknya integrasi sosial, misalnya fenomena pelacuran sebagai akibat keretakan masyarakat. Gejala sosial yang abnormal. (2) pelanggaran norma sebagai gejala yang normal sebagaimana gejala-gejala yang lain, bukan sesuatu hal yang istimewa, oleh karena itu dipelajari sebagai hal yang biasa saja.

Sementara itu dalam teori struktural fungsional atau S/F ini bersumber dari seorang sosiolog Perancis yang lebih dikenal lagi dengan nama Emile Durkheim yang karya-karyanya sangat berpengaruh pada akhir abad 19 an dan awal 20 an, dan masih berpengaruh hingga sekarang. Dari sebab itu, Emile Durkheim dapat dipandang sebagai perintis Sosiologi Deviasi. Durkheim

sangat tertarik pada transformasi perubahan masyarakat, dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang disebut transformasi sosial pada abad 19 an atau awal abad 20 an. Di Indonesia mulai abad 21 an. Sementara di Korea sangat cepat menjadi masyarakat industri, hanya dengan waktu 30 tahun an, mungkin masyarakat Korea lebih homogen, bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Pada masyarakat agraris, umumnya orang melakukan kegiatan yang sama. Oleh karena itu, pembagian kerja sangat sederhana atau disebut juga dengan *division of labor*, maka nilai-nilai aspirasi atau tujuan hidup menjadi relatif sama. Dengan demikian kesadaran kolektif atau kebersamaan juga kuat, akibatnya masyarakat menjadi utuh dan terpadu, sebuah pelanggaran terhadap norma dipandang dengan jelas.

Setelah masyarakat mengalami urbanisasi, industrialisasi, maka pembagian kerja menjadi kompleks, sehingga kesadaran kolektif menjadi lemah dan ini semua mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, karena mereka berbeda dalam ide, aspirasi, tujuan, maka kontrol sosial juga lemah.

Perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri ini disebut dengan deregulasi sosial bila dilihat pada masyarakat seperti ini konsensus sosial lemah, sehingga

pelanggaran norma tidak jelas dan kontrol sosial pun menjadi lemah. Ada dua sumber deregulasi sosial yang menyebabkan melemahnya kontrol sehingga dengan longgar melakukan pelanggaran norma, yaitu *egotisme* dan *anomie*. *Egotisme* adalah gejala yang menunjuk hubungan antara individu dan masyarakat dimana individu relatif bersifat merdeka, mandirian dan tidak terikat pada masyarakat, dengan demikian individu tersebut kurang atau sukar diatur dalam masyarakat. Misalnya orang yang tidak kawin lebih merdeka, mandiri bila dibandingkan mereka yang kawin. *Anomie* adalah perubahan sosial yang cepat menjadi sebab dari bunuh diri. Angka bunuh diri muncul pada situasi masyarakat yang kacau baik pada saat masyarakat tingkat ekonomi meningkat maupun menurun. Akan tetapi angka bunuh diri atau *rate of suicide* akan menurun atau menjadi lebih rendah apabila keadaan ekonomi stabil. Dalam keadaan kedua ekonomi tersebut akan terjadi gap atau kesenjangan antara tujuan dan cara. Gap atau kesenjangan inilah yang menyebabkan terjadinya deviasi. Teori-teori Durkheim memandang deviasi sebagai gejala sosial.

Durkheim adalah seorang sosiologik dan Freud adalah seorang psikologik. Durkheim lebih memandang deviasi terjadi sebagai produk dari pengaruh lingkungan, sedangkan pandangan Freud, dorongan individu dalam diri manusia

terdapat faktor dari dalam atau lebih dikenal lagi dengan sebutan intrinsik.

Pada dasarnya studi deviasi sosial terdapat dua teori besar, yaitu (1) teori tradisional yang melakukan eksplanasi gejala deviasi dengan diuraikan sebab akibatnya atau etiologiknya secara nyata atau realitas. (2) teori modern yang memahami dan menafsirkan gejala deviasi dari mencari makna. Contohnya adalah dalam mempelajari homoseksualitas. Secara tradisional dilihat mengapa, bagaimana pada masa kecilnya dengan kajian teori anomie, asosiasi dan teori kontrol. Secara modern dilihat mengapa seseorang itu homoseksual, mengapa masyarakat memberi cap orang itu sebagai homoseksual, yang disisihkan, orang aneh dan ini dimaknai dengan kajian teori label, fenomenologi dan konflik.

Teori tradisional yang berkembang melalui teori anomie, pertama kali diperkenalkan oleh Durkheim, sebagai gejala sosial atau kekacauan sekelompok orang, atau kekacauan masyarakat. Anomia sebagai gejala atau kekacauan individual. Dalam membicarakan anomie dikenal tiga versi atau bentuk teori, yaitu (1) teori kesenjangan antara tujuan dan cara yang dikembangkan oleh Robert K Merton. (2) teori frustrasi status yang dikembangkan oleh Albert Cohen, dan (3) teori *differensial illegitimate opportunity* yang dikembangkan oleh Cloward dan

Ohlin. Teori Merton menjadi teori pokoknya sementara teori-teori yang lain sebagai modifikasi pemikiran Merton.

Robert K Merton, sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas tentang teori-teori fungsionalisme, ia dalam hal ini Merton adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini. Mengakui bahwa pendekatan ini atau pendekatan dengan teori fungsional struktural telah membawa kemajuan bagi pengetahuan sosiologis.

Merton telah mengutip tiga postulat yang ia kutip dari analisa fungsional dan disempurnakannya, diantaranya, yaitu (1) postulat pertama adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain.

Postulat kedua atau (2) adalah fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan. Dan (3) postulat ketiga, adalah *indispensability* yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan system sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur dalam artian tidak memiliki kejelasan, penelitian, belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan.

Pengaruh teori ini dalam kehidupan sosial, Talcott Parsons dalam menguraikan teori ini menjadi sub-sistem yang berkaitan menjelaskan bahwa diantara hubungan fungsional-struktural cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis, yaitu (1) pencarian pemuasan psikis, (2) kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis, dan (3) kebutuhan untuk beradaptasi

dengan lingkungan organis-fisis, dan usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.

Sebaliknya masing-masing sub-sistem itu, harus memiliki empat prasyarat fungsional yang harus mereka adakan, sehingga bias diklasifikasikan sebagai suatu istem. Parsons menekankan saling ketergantungan masing-masing sistem itu ketika dia menyatakan , “ secara konkrit, setiap sistem empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individu konkrit yang tidak merupakan sebuah organisme, kepribadian, anggota dan sistem sosial, dan peserta dalam sistem *cultural* “. [.http://adjhee.wordpress.com/2007/11/08/teori-fungsional-struktural/](http://adjhee.wordpress.com/2007/11/08/teori-fungsional-struktural/)- ftn1.

Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.

Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Yang mengartikan bahwa

functionalisme struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Karena sistem cenderung ke arah keseimbangan maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

Kai T Ericson mengemukakan fungsi deviasi dalam masyarakat yang pada dasarnya mengikuti cara berpikir Emile Durkheim, pendapatnya bahwa devian diperlukan dalam masyarakat untuk memungkinkan kita mengenal batas-batas normatif masyarakat. Dengan demikian deviasi membantu memelihara stabilitas masyarakat. Cara berpikir fungsionalisme dari Durkheim merupakan pelopor dalam pemikiran sosiologi deviasi, dan masih digunakan hingga kini.

Ringkasan

1. Setiap masyarakat memiliki sistem norma sebagai pedoman setiap anggota masyarakat untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh anggota masyarakat.
2. Melalui satu set norma, manusia dalam interaksinya dapat terjadi sebuah harmoni sosial atau keteraturan dalam berperilaku. .

3. Dalam implementasinya, norma tidak sepenuhnya menjadi pedoman, karena sangat terpengaruh oleh kehendak pribadi individu.
4. Ketika individu dalam berperilaku tidak sesuai dengan norma yang berlaku, menurut definisi dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma disebut *norm violation*.
5. Nilai atau *values*, adalah sesuatu yang diyakini sebagian besar anggota masyarakat itu ada dan dijunjung tinggi sebagai milik bersama untuk tujuan bersama.
6. Segala unsur yang ada dalam masyarakat seperti norma dan nilai adalah bagian dari kebudayaan dan kebudayaan adalah *way of life of a society* akan dimiliki, dialihgenerasikan secara turun temurun.
7. Unsur kebudayaan adalah sistem norma dan nilai memiliki fungsi terhadap sistem secara keseluruhan.
8. Sesuatu dikatakan memiliki fungsi apabila sesuatu tersebut memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat.
9. Teori Strukturalis Fungsionalisme, masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang terpadu dan teratur.
10. Fungsi manifest, artinya pola tingkah laku yang oleh sebagian besar masyarakat memang diharapkan, memiliki fungsi sebagaimana masyarakat berharap.

12. Teori Fungsional-Struktural adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial.
14. Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial.
16. Teori Fungsionalisme-Struktural merupakan suatu yang 'berbeda', hal ini disebabkan karena masyarakat modern sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri.
17. Teori Strukturalisme dan Fungsionalisme, memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terpadu dan teratur, orang sepakat tentang nilai-nilai pokok dan ada konsensus sosial serta diikuti dengan nilai yang diakui bersama.
19. Menurut teori Struktural Fungsional, konsensus sosial itu jelas, maka landasan sosialnya juga jelas.
20. Dalam studi deviasi terdapat dua aliran, pelanggaran norma dipandang sebagai pencerminan dari gangguan tata sosial atau *social orde*, dan pelanggaran norma sebagai gejala yang normal.
21. Dalam teori Struktural Fungsional ini bersumber dari seorang sosiolog Perancis yang dikenal dengan nama Emile Durkheim karya-karyanya sangat berpengaruh pada

akhir abad 19 an dan awal 20 an, dan masih berpengaruh hingga sekarang.

22. Pada masyarakat agraris, umumnya orang melakukan kegiatan yang sama, maka nilai-nilai aspirasi atau tujuan hidup menjadi relatif sama.
23. Setelah masyarakat mengalami urbanisasi, industrialisasi, maka pembagian kerja menjadi kompleks, sehingga kesadaran kolektif menjadi lemah dan ini semua mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.
24. Perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri disebut deregulasi sosial bila dilihat pada masyarakat seperti ini konsensus sosial lemah.
26. Studi deviasi sosial terdapat dua teori besar, teori tradisional dan teori modern yang memahami dan menafsirkan gejala deviasi dari mencari makna.
27. Teori tradisional berkembang melalui teori anomie, sebagai gejala sosial atau kekacauan sekelompok orang, atau kekacauan masyarakat.
29. Tiga postulat analisa fungsional yang disempurnakan, postulat pertama adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh

bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi.

30. Postulat kedua adalah fungsionalisme universal yang menganggap seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Dan postulat ketiga, *indispensability*, dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting.
31. Pengaruh teori ini dalam kehidupan sosial, diantara hubungan fungsional-struktural cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis, yaitu pencarian pemuasan psikis, kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-fisis.
32. Sebaliknya masing-masing sub-sistem itu, harus memiliki empat prasyarat fungsional yang harus mereka adakan, sehingga bias diklasifikasikan sebagai suatu istem.

33. Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.
34. Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial.
35. Devian diperlukan dalam masyarakat untuk memungkinkan kita mengenal batas-batas normatif masyarakat.

Pandangan Tradisional dan Modern Tentang Deviasi

1. Pandangan tradisional mendasarkan diri pada tiga asumsi, deviasi secara intrinsik bersifat nyata, deviasi merupakan kenyataan obyektif, deviasi merupakan akibat dari yang menjadi penyebabnya.
2. Deviasi disebut secara intrinsik nyata, artinya tingkah laku deviasi secara hakiki berbeda dengan tingkah laku konformitas.
3. Deviasi sebagai gejala sosial memiliki dua pemahaman pokok, deviasi sebagai pelanggaran norma, deviasi sebagai label.
4. Kondisi ini memunculkan tiga versi teori, yaitu teori tingkah laku kejahatan menunjukkan evolusi manusia pada tingkat rendah, dalam plasma darah manusia ada faktor yang menyebabkan timbulnya *ciri-ciri fisik* dan *ciri-ciri psikik* yang memunculkan tingkah laku deviasi, teori kromosom Y 1.3/1000 (per mil) maka orang yang memiliki kelebihan Y ini keadaannya lebih agresif atau besar dan suka melakukan kriminalitas maka dengan adanya kelebihan kromosom Y ini kecenderungan orang melakukan kejahatan ini adalah analisa biologik.

5. Analisa-analisa tersebut tidak seluruhnya benar, meskipun secara perkembangan keilmuan telah membantu untuk melakukan analisa-analisa kajian deviasi. Maka berikut dapat dilihat beberapa kelemahan analisa biologik dalam kajian deviasi, yaitu (1) teori-teori biologik ini kurang didukung oleh penelitian dan data, (2) teori tersebut tidak dapat menjelaskan ciri-ciri biologik dengan pelanggaran norma, (3) kelainan biologik itu jumlahnya relatif kecil, sementara yang melakukan kejahatan jumlahnya banyak, (4) teori biologik ini tidak membahas deviasi sebagai label. Analisa biologik ini dapat ditelusuri strukturnya dari sifat-sifat biologiknya atau warna kulit.

6. Analisa psikologik, memulainya dengan pengalaman masa lalu atau dengan simbol X menyebabkan sifat psikik juga dengan perubahan simbol X, sehingga terjadi pelanggaran norma (X). Hubungan antara pengalaman masa lalu, sifat psikik, pelanggaran norma dibuat analisa-analisa. Sifat psikiknya dapat dilakukan dengan tes kepribadian secara psikologi. Sebagai contoh, apakah orang yang suka membunuh memiliki sifat agresif ? Biasanya keputusan atau tes dilakukan oleh seorang psikolog atau seorang psikiater atau

psikoanalisis, yang dapat dilihat dari pengalaman masa lalu seseorang cenderung melakukan pelanggaran norma. Sebuah eksperimen tentang seorang gadis panggilan atau disebut dengan *call girl*, berdasarkan psikoanalisa tingkah laku itu dipengaruhi oleh masa lalu, jadi sikap menolak si ibu pada waktu anak masih kecil, sebagai alasan ekonomi atau karena si ibu waktu itu belum dewasa.

7. Analisa psikologik memiliki versi-versi, yaitu (1) tingkah laku devian dilakukan oleh orang yang berkepribadian normal, misalnya orang itu memiliki sifat agresif akan tetapi ia adalah normal yang menimbulkan sifat suka membunuh atau menyiksa orang lain, atau karena sifat ketergantungan, misalnya homoseks. (2) deviasi itu disebabkan oleh kepribadian yang abnormal, misalnya psikopatik. Artinya orang ini tidak memiliki rasa bersalah atau *guilty feeling* atau tidak memiliki kepribadian yang baik tentang norma.
8. Beberapa kelemahan taraf analisis psikologik terhadap deviasi sosial adalah (1) seringkali tidak bisa diketahui mana sebab, mana akibat, misalnya antara geng terhadap kecaduan narkoba atau sebaliknya, (2) bahwa

analisis pada taraf ini hanya memandang deviasi sebagai pelanggaran, tidak membicarakan deviasi sebagai label atau memang tidak meneliti deviasi sebagai label, (3) analisa ini mengabaikan pengaruh situasi sosial, (4) analisis taraf psikologik juga tidak bisa menyimpulkan bahwa semua yang melakukan pembunuhan itu memiliki sifat agresif, atau tidak semua orang yang agresif itu membunuh. Jadi analisis psikologik lebih banyak berpandangan secara historik, sedangkan analisis sosiologik lebih banyak menggunakan aspek situasi sosial sebagai penyebab terjadinya pelanggaran norma atau secara ahistori dengan kata lain dalam situasi yang bagaimana ia sekarang.

9. Dari pandangan psikologik tentang deviasi, bahwa selain karena pengalaman masa lalu sebagai penyebab terjadinya deviasi, manusia juga sebagai adalah makhluk yang heriditer, yang memiliki nafsu-nafsu, namun mengapa tidak semua manusia berbuat jahat atau mengikuti nafsunya saja, misalnya untuk melakukan kejahatan, karena masyarakatlah yang menghambat ada aturan, norma yang menyebabkan manusia tidak devian. Sebaliknya dari pandangan sosiologik, masyarakatlah

secara struktur yang justru menyebabkan terjadinya deviasi, masyarakat memberi kesempatan atau mendorong orang untuk melakukan deviasi. Secara sosiologik, analisis secara sosiologik ini berasumsi bahwa struktur dan proses sosial merupakan penyebab terjadinya pelanggaran norma.

10. Penjelasannya ini secara lebih mendalam adalah struktur sebagai penyebab terjadinya pelanggaran norma menurut teori anomie oleh Robert K Merton (dalam Clinard D Marshall, 1989). Struktur dan proses dalam masyarakat oleh Merton dimaknai terdapat kesenjangan antara tujuan dan cara, dan hal ini menyebabkan terjadinya stress dan selanjutnya terjadi pelanggaran norma.
11. Emile Durkheim memandang, jika hubungan sosial dalam masyarakat berkurang, maka individu mengalami kekecewaan, dan menimbulkan keterasingan atau *alienasi* dan lebih jauh lagi akibatnya terjadi bunuh diri atau dikatakan dengan *suicide*. Bentuk deviasi bunuh diri ini yang menjadi point penting analisa Durkheim, misalnya ketika menjelaskan tentang disorganisasi sosial

(baca buku St.Vembriarto 1984, dalam buku Patologi Sosial).

12. Proses sosial menurut Howard Baker dalam St.Vembriarto (1984) mengatakan bahwa seseorang yang mengalami kecanduan narkoba atau mariyuana melalui sebuah proses atau tiga tahap, yaitu (1) belajar menghisap dengan betul; (2) mulai mengenal, dan ke (3) baru kecanduan.
13. Beberapa kelemahan dan kelebihan analisis sosiologik tentang deviasi. Analisis sosiologik memiliki kelebihan, yaitu membicarakan deviasi sosial dan juga masalah sosial baik sebagai pelanggaran norma maupun sebagai label. Contoh teori yang dikemukakan oleh Howard Baker.
14. Sementara itu analisis sosiologik juga memiliki kelemahan antara lain, (1) analisis sosiologik sering menggunakan konsep-konsep yang kabur, misalnya konsep stress, disorganisasi sosial atau disorganisasi pribadi, keterasingan dan lain lain. Yang dalam hal ini masih sering rancu dalam pilihan konsep atau kejadiannya. (2) Teori-teori yang muncul kurang didukung fakta-fakta dan penelitian empirik, misalnya

Merton hanya mengandalkan dokumen resmi atau sekunder data dari *official record*.

15. Dari berbagai referensi diketahui bahwa semua aliran atau teori dari perspektif tradisional ini memiliki kecenderungan sebagai sosiologik positivistik, artinya fenomena sosial khususnya kajian deviasi ini menekankan pada ukuran atau standard-standard tertentu, sementara aliran modern cenderung ke sosiologi humanistik, menekankan pada perilaku manusia sebagaimana adanya yang diinterpretasikan secara relatif atau sebagaimana individu itu pahami.

B. Teori Anomie (Teori Kesenjangan Antara Tujuan dan Cara)

51. Merton menulis teorinya melalui buku *Social Theory and Social Structure*. Teori Merton ini pada intinya menentang teori psikoanalisa S Freud. Menurut S Freud tingkah laku kriminal dan patologik dilakukan atas dorongan hewaniah – biologik seperti nafsu seksual, kriminal, membunuh dan sebagainya sudah ada dalam diri setiap individu sejak lahir atau *heriditer*, menurut S Freud justru masyarakat menghambat adanya deviasi. Mengapa orang tidak bisa melakukan hubungan seks seenaknya, karena masyarakat membuat dan memiliki aturan-

aturan yang sifatnya menghambat, sifat-sifat aturan tersebut dilatihkan sejak masa kanak-kanak, yaitu melalui proses pendidikan atau sosialisasi.

52. Sedangkan menurut Merton, justru masyarakatlah yang mendorong adanya deviasi sosial. Mengapa orang melakukan deviasi, karena masyarakat mempengaruhinya, masyarakat ngiming-imingi, mengapa sering terjadi pelanggaran norma seksualitas, karena sering terdapat komersialisasi seks. Oleh karena itulah, Merton menyusun teori anomie yang masih berpengaruh hingga sekarang. Misalnya, seseorang yang mempunyai tujuan tertentu dengan cara tertentu, misalnya menghalalkan semua cara.

53. Merton sebagaimana dikemukakan di atas mengikuti cara berpikir Durkheim dan teorinya berorientasi pada kelas. Konsep-konsep Merton juga menjelaskan keterkaitan antara kelas sosial tertentu dengan kecenderungannya melakukan cara-cara tertentu dalam beradaptasi. Adanya perbedaan kelas sosial menimbulkan adanya perbedaan antara tujuan dan cara yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Kelas dalam struktur sosial masyarakat yang berbeda-beda ini memiliki konsekuensi terhadap perbedaan kesempatan untuk mencapai tujuannya. Asumsinya adalah bahwa masyarakat kelas bawah atau *lower class* misalnya memiliki kesempatan yang lebih kecil

dibandingkan kelas atas. Keadaan ini berdampak pada tidak meratanya kesempatan dan sarana yang ada dalam masyarakat, ketidakmeratanya kesempatan ini pula yang menimbulkan gejala stress, frustrasi dan selebihnya pelanggaran norma atau deviasi untuk mencapai tujuan.

54. Dalam buku *sociology of deviant behavior* karangan Clinard dan Marshall (1989), Merton menyebutkan bahwa masyarakat Amerika sangat mendewakan sukses di segala bidang. Sukses menjadi aspirasi, nilai yang tinggi dan semua orang ingin mencapai sukses itu. Sukses menjadi dambaan semua orang, dari semua lapisan dari tinggi, menengah hingga paling bawah. Akan tetapi cara yang halal ternyata tidaklah terbuka untuk semua orang atau semua lapisan. Menurut Merton, di Amerika Serikat timbul etos bahwa semua orang bisa jadi presiden (terutama) sejak A. Lincoln menjadi presiden. Di Indonesia fenomena pemilihan presiden hingga pilkades juga menjadi cita-cita, akan tetapi tidak semua orang jadi presiden namun pada orang-orang tertentu sajalah yang akhirnya dapat memenangkan berbagai pilihan tersebut. Demikian juga keinginan untuk menjadi seorang sarjana, hingga saat ini masih relatif terbatas karena untuk masuk menjadi mahasiswa S1 di sebuah perguruan tinggi pun harus memenuhi persyaratan tertentu misalnya harus memiliki sejumlah besar uang. Oleh

karena itu, ternyata tidak semua orang yang ingin jadi sarjana dapat tercapai keinginannya itu.

55. Dengan uraian di atas, maka orang yang berasal dari lapisan bawah tidak bisa menggunakan cara-cara yang halal, karena pilihan cara yang digunakan hampir tidak terbuka, tertutup atau sempit bagi masyarakat kalangan menengah hingga bawah. Maka cara yang tidak halal sajalah yang terkadang digunakan, dan hal inilah yang muncul terjadinya deviasi, penyimpangan terhadap norma terjadi karena kesenjangan antara tujuan dan cara.

56. Dari seluruh teori Merton, maka anomilah yang menyebabkan terjadinya deviasi. Jika seseorang mengalami kesenjangan atau disebut juga dengan anomie, maka reaksinya tidaklah sama antara individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok lain. Misalnya ketika A mengalami kesenjangan maka menggunakan cara yang halal atau ketika B mengalami kesenjangan maka cara yang digunakan adalah tidak halal. Cara yang tidak halal ini disebut *Innovation*. Sementara apabila cara yang digunakan untuk mencapai sukses atau untuk mengatasi kesenjangan adalah dengan cara yang halal maka individu atau kelompok tersebut dikatakan sebagai *conformity*.

57. Menurut Robert K Merton, terdapat lima kemungkinan reaksi atau bentuk adaptasi, yaitu seperti tabel di bawah ini.

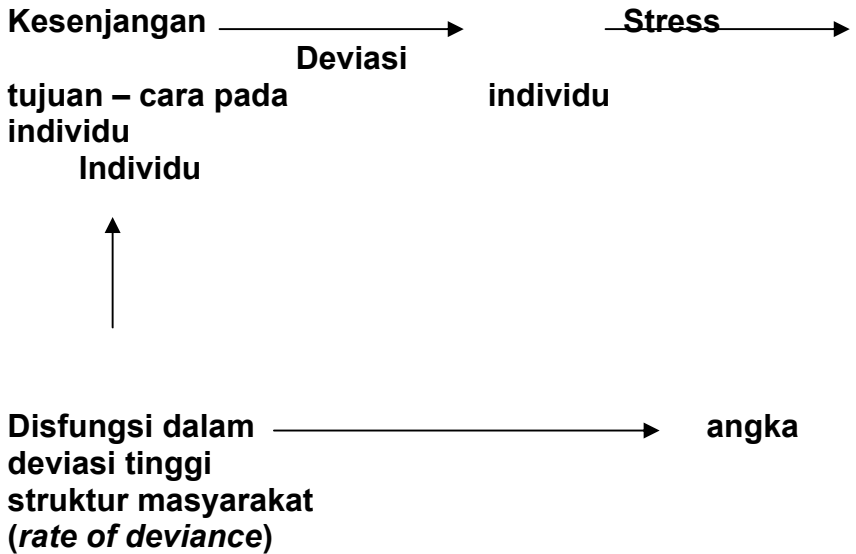
**TABEL
BENTUK ADAPTASI**

No	Bentuk Adaptasi	Tujuan	Cara yang Diinstitusikan
1	Conformity	+ (sukses)	+ (halal, kerja keras)
2	Innovation	+	-
3	Ritualism	- (nrimo)	+ (jujur)
4	Retreatist	-	-
5	Rebellion	± (sukses yang lain dari yang lain)	±

58. Siapa yang melakukan bentuk-bentuk adaptasi tersebut, yaitu pertama kelompok *conformity* kebanyakan orang atau sebagian besar orang. Kedua, kelompok *Innovation* yang mendorong golongan devian dan menurut Merton adalah orang-orang dari lapisan bawah, mengapa? Kesempatan dan jalan untuk mencapai sukses relatif lebih sempit hal ini dalam penelitian dengan metode *official record* nya atau data sekunder atau statistik adalah orang-orang dari lapisan bawah. Di media masa atau koran dapat diketahui bahwa orang-orang yang melakukan deviasi karena dorongan ekonomi atau kesulitan ekonomi.

59. Yang ketiga, kelompok *Ritualism* terhadap kelompok menengah terutama pegawai negeri yang merasa nrimo atau cukup dengan apa yang didapatnya. Atau mungkin terjadi pada mahasiswa yang nrimo dengan hasil studinya pokoknya lulus dengan selamat. Keempat, kelompok *Retreatis* adalah kelompok orang yang mengundurkan diri atau mengasingkan diri dari masyarakat, misalnya gelandangan, tuna wisma, pecandu narkoba yang mungkin lebih nyaman hidup bersama dengan kelompoknya saja. Kelima, kelompok *Rebellion* adalah golongan yang melakukan bentuk-bentuk pemberontakan terhadap pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah atau kelompok yang tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat lokal, nasional maupun dunia seperti kelompok terorisme, kelompok partai komunis di Indonesia, kelompok seperti ini dianggap sebagai kelompok yang menentang cita-cita masyarakat, mereka menginginkan ideologi lain selain Pancasila sebagai ideologi dan lambang negara; kelompok-kelompok yang menentang NKRI dan ingin membangun bangsa atau negara berdasarkan ideologi yang diyakini mampu mengganti Pancasila. Kelompok ini bisa ditemukan di Filipina dengan kelompok Moro nya. Kelompok-kelompok ini sering disebut sebagai kelompok garis keras atau fundamentalis; ekstrim kiri maupun ekstrim kanan.

60. Apabila diskemakan teori Robert K Merton adalah sebagaimana berikut, yaitu :



Dikatakan disfungsi disebabkan oleh suatu unsur yang tidak berjalan dengan baik, misalnya dalam keluarga seharusnya seorang ayah atau orang tua bertindak sebagai kepala keluarga, tetapi hampir tidak pernah di rumah atau bermain judi.

61. Versi teori lain atas kesenjangan antara tujuan dan cara adalah teori Robert K Merton ini diikuti oleh Albert Cohen dengan teorinya yang disebut teori Frustrasi Status dan terkenal sekitar tahun 1965 menurut Cohen, semua lapisan masyarakat ingin mencapai status dan analog dengan istilah Merton mengenai “sukses” tetapi tidak semua orang dapat

mencapainya, lapisan masyarakat bawah cenderung melakukannya dengan cara deviasi.

62. Anak-anak lapisan bawah seperti buruh tani, buruh-buruh lain mencapai status dengan sekolah, akan tetapi sekolah mendasarkan diri pada golongan menengah ke atas, akibatnya anak-anak golongan bawah ini mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebudayaan sekolah. Misalnya, sekolah menuntut untuk membaca, sedangkan anak-anak golongan bawah untuk membeli buku juga sulit sehingga mereka mengalami kegagalan atau mungkin *drop out*. Apabila keadaan ini berlanjut maka terjadi frustrasi. Dengan statemen seperti ini maka teori Cohen disebut sebagai teori frustrasi status. Cohen selanjutnya menyebutkan bahwa akibat dari kondisi ini maka deviasi juga dapat terjadi bahkan kelompok ini seringkali membentuk *sub-sub culture delinquent*. *Sub-sub culture* ini cenderung terjadi kesukaan terhadap berkelahi, agresif atau cenderung menggunakan kekuatan fisik untuk mengatasinya atau bukan dengan prestasi akademi.

63. Perbedaan Robert K Merton dan teori Albert Cohen tentang delinquent, yaitu (1) Teori Merton bersifat *utilitaristik*, yaitu tingkah laku deviasi itu mempunyai tujuan untuk memiliki

sesuatu sedang menurut Cohen bukan mengambil untuk dimiliki melainkan untuk dirusak (*vandalisme*), tingkah laku yang destruktif demi untuk merusak itu sendiri. (2) Pada Teori Merton tingkah laku devian itu dilakukan oleh individu, sedangkan Cohen menggunakan kelompok sebagai unit analisisnya. (3) Menurut Merton, kesenjangan menyebabkan deviasi, pada Cohen, kesenjangan menyebabkan frustrasi status baru kemudian menyebabkan deviasi. Jadi skemanya sama.

64. Persamaan Teori Robert K Merton dan Albert Cohen, yaitu (1) Kelompok lapisan bawah cenderung melakukan deviasi dalam mencapai tujuan daripada lapisan di atasnya. (2) Masyarakat dianggap gagal. teori-teori Merton cocok untuk kajian kenakalan remaja.

65. Teori *Defferensial Illegitimate opportunity*, teori ini dirumuskan oleh Richard Clowards dan Ohlin. Kedua ahli ini menginduk atau menerima teori "Merton" yang menyatakan bahwa kesenjangan menyebabkan deviasi bagi masyarakat lapisan bawah. Disebut sebagai menginduk dan setuju dengan preposisi Merton karena masyarakat lapisan bawah kesempatan untuk meraih sukses atau status adalah kecil, oleh karena itu mereka mencapainya dengan cara yang tidak sah atau dengan *illegitimate*.

66. Perbedaan Robert K Merton dan R Cloward dan Ohlin, yaitu masyarakat golongan lapisan bawah ini dalam menghadapi kesenjangan tidak otomatis menjadi devian sebagaimana teori Merton. Bila seseorang mengalami kesenjangan, maka



Menurut Cloward dan Ohlin, orang mengalami kesenjangan menghadapinya dengan cara yang tidak sah (*elligitimate*). *Criminal subculture*, seperti merampas, korupsi, mencuri akan tetapi tidak semua orang melakukannya, ada juga yang disebut dengan *conflict subculture* (Clowards). *Retreatist* adalah gagal dalam melakukan adaptasi. Bahkan mengundurkan diri dari masyarakat, misalnya menjadi gelandangan (ini disebut dengan kelompok *double failure* atau gagal ganda). Jadi terletak pada kesempatannya yang dapat berbeda-beda atau disebut juga dengan *opportunity*.

67. Mengapa golongan ketiga ini disebut gagal ganda, karena mengejar sukses dengan cara yang sah tidak bisa, mencapai dengan cara yang tidak sah juga gagal, atau sering disebut sebagai manusia yang kalah dalam peperangan. Jadi skema

Cloward, menggunakan teori pokoknya dari Merton terhadap kesenjangan menimbulkan deviasi.



Perbedaan Merton, Cohen dan Cloward dan Ohlin, yaitu menurut mereka (1) deviasi bersifat kolektif atau kelompok atau *subculture*, (2) kesenjangan menyebabkan deviasi, dan (3) kelompok lapisan bawah cenderung melakukan deviasi untuk mencapai tujuannya.

68. Kritik terhadap teori anomie ini menunjuk pada sisi kelemahan dan kelebihan. Kelemahan teori Anomie, yaitu (1) tidak ada bukti yang cukup bahwa orang dari lapisan bawah cenderung melakukan deviasi, memang benar statistik resmi bahwa *crime* atau kejahatan banyak dilakukan golongan lapisan bawah, tetapi statistik resmi tersebut tidak *reliabel* sebab penegak hukum cenderung melihat lapisan bawah saja. Statistik resmi tidak *valid*, sebab statistik itu tidak menggambarkan deviasi yang sebenarnya atau angkanya tidak pernah cocok. (2) Tidak ada bukti yang kuat bahwa lapisan bawah mempunyai aspirasi yang sama dengan lapisan menengah dan lapisan atas. Seperti kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, apakah cita-cita tukang becak sama

dengan pegawai tinggi, menurut Merton sama padahal belum tentu sama. Menurut penelitian, lapisan bawah dan lapisan atas mempunyai aspirasi yang berbeda. Meskipun semua orang dapat memperoleh dorongan itu namun tidak semua orang memanfaatkannya.

69. Asumsi Merton bahwa semua orang menganut nilai yang sama, adalah juga tidak benar, tidak semua orang mempunyai tujuan sukses yang sama. Dalam masyarakat yang pluralistik, teori anomie ini tidak kuat, misalnya karena golongan minoritas mempunyai nilai sendiri-sendiri, misalnya minoritas suku, agama atau budaya lain. Terlalu menonjolkan anak-anak lapisan bawah sebagai cenderung melakukan kenakalan atau *delinquent* karena kesempatan suksesnya terbatas.

70. Keunggulan teori anomie ini dapat dilihat beberapa pandangan, yaitu (1) menurut teori ini, deviasi bersumber pada masyarakat. (2) Kesenjangan antara tujuan dan cara benar-benar merupakan variabel untuk memperkuat deviasi, hanya deviasi itu tidak dibatasi pada golongan lapisan bawah saja.

C. Teori Asosiasi Deferensial atau *Defferential Association*

71. Teori ini bermula dari studi disorganisasi sosial dengan pikiran pokoknya adalah disorganisasi sosial menyebabkan kriminalitas atau deviasi. Industrialisasi sebagai salah satu

sumbernya, di bawah ini adalah skema terjadinya proses deviasi.



Dalam skema di atas dapat terlihat dengan jelas, urbanisasi dan kriminalitas saling keterkaitan. Dimana banyak terjadi urbanisasi, karena industrialisasi maka kriminalitas juga akan terjadi di tempat tersebut. Dengan sendirinya terjadi suatu masyarakat yang disorganisasi sosial di dalamnya, maka akan ada kontrol sosial dalam masyarakat tersebut. Dan akan muncul tingkah laku deviasi, karena kontrol masyarakat tersebut.

72. Ilmu-ilmu kriminalitas dipelajari oleh ahli-ahli dari Chicago. Teori asosiasi deferensial ini dipelopori oleh Sutherland dalam bukunya yang berjudul *Principle of Criminology*, dan ia mengembangkan teorinya sejak tahun 1934, karena Edwind Sutherland ini tertarik pada dua gejala, yaitu (1) gejala mengenai angka kejahatan, dan (2) gejala mengenai kejahatan individual. Mengapa angka kejahatan itu berbeda pada kelompok-kelompok manusia, sebagai contoh di kota kejahatan

lebih banyak terjadi dari pada di desa. Kejahatan yang dilakukan laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

73. Perbedaan angka kejahatan bersumber pada apa yang disebut *deferential group organization*. Dalam masyarakat terdapat dua macam kelompok, yakni (1) kelompok tradisi kriminal dengan angka-angka kriminalitas yang cukup tinggi, gejala ini menerangkan angka kriminalitas kelompok, akan tetapi teori ini tidak dikembangkan lebih lanjut. (2) Kelompok tradisi anti kriminal, pertanyaannya adalah mengapa ada individu yang kriminal dan yang anti kriminal. Menurut Sutherland, kriminalitas individu bersumber dari asosiasi deferensial, teori inilah yang kemudian dikembangkan.

74. Asosiasi mempunyai dua pandangan, yaitu suatu organisasi atau kelompok yang terorganisir secara kelompok yang mempunyai tujuan secara khusus dan spesifik. Dan pola interaksi yang relatif menetap. Teori Sutherland ini dirumuskan ke dalam 9 dalil atau pernyataan yang dipandang sebagai prinsip belajar tentang deviasi khususnya kriminalitas, yaitu (1) tingkah laku kriminal itu dipelajari, jadi tidak bersifat hafalan atau diturunkan sebagaimana teorinya Lombroso. (2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Dirinci oleh Sutherland bahwa tingkah laku kriminal dipelajari dengan tingkah laku yang lain. Komunikasi ini

bersifat verbal dan non verbal. Komunikasi adalah transmisi informasi, pikiran, sikap, emosi dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain terutama melalui simbol-simbol.

75. Dan ke (3) bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam pergaulan yang akrab dalam kelompok. Pengaruh dapat terjadi baik secara personal maupun interpersonal; langsung maupun tidak langsung. (4) Jika tingkah laku kriminal dipelajari proses belajar itu mencakup : teknik melakukan kejahatan dari yang simple ke kompleks; arah daripada motif/dorongan atau alasan serta sikap terhadap kejahatan. (5) Arah motif mendorong kejahatan itu dipelajari dari pengaruh suka atau tidak suka terhadap hukum dari orang-orang disekitarnya. Sikap terhadap hukum, akan terjadi menghormati, ambivalen, dan menghina.

76. Kemudian yang ke (6) seseorang menjadi *delinquent* atau nakal karena pengaruh kesukaan terhadap pelanggaran hukum lebih besar daripada pengaruh tidak suka terhadap pelanggaran hukum. Dalil ke enam ini adalah inti dari teori Sutherland. Dalam pergaulan, seseorang dapat bergaul dengan bermacam-macam orang, jika seseorang lebih banyak bergaul dengan pola kejahatan atau *criminal pattern* daripada pola-pola anti kejahatan, maka ia akan menjadi kriminal. Murid

Sutherland yang bernama Cressey, menjelaskan lebih lanjut mengenai pola kejahatan bahwa (a) pola kejahatan tidak sama dengan orang-orang yang berwatak jahat. Pola kriminal adalah tingkah laku kriminal atau yang menyukai pelanggaran hukum (law violation) sedangkan deviasi (norm violation). Jadi orang yang melanggar hukum pasti juga melanggar norma, akan tetapi orang yang melanggar norma belum tentu melanggar hukum. Oleh karena norma lebih luas daripada hukum. (b) Kontak dengan pola kriminal akan lebih dominan daripada dengan pola anti kriminal akan menjadikan seseorang itu kriminal, artinya bahwa tidak setiap kontak otomatis menyebabkan kriminal. Jadi semuanya tergantung mana lebih dominan. Jika bergaul dengan anti kriminal lebih besar maka akan menjadi kriminal, dan bila pola kriminal lebih besar dari anti kriminal maka cenderung menjadi kriminal. Teori ini lebih cocok untuk kajian kriminal individual seperti yang dikembangkan Sutherland.

77. Dan yang ke (7) asosiasi deferensial ini berbeda dalam hal frekuensi, kedalaman, prioritas, dan intensitasnya atau bagaimana sifat pergaulan dengan tanda petik masih famili atau orang lain. (8) Proses belajar tingkah laku kriminal dengan bergaul dengan pola-pola kriminal yang terdapat dalam setiap bentuk proses belajar. Tingkah laku kriminal isinya berbeda

atau kadang-kadang berlawanan dengan anti kriminal tetapi cara mempelajarinya atau mekanismenya adalah sama. Sebagai contoh memukul bola kasti sama dengan memukul kepala manusia untuk membunuh. Belajar tingkah laku yang baik dan buruk mekanismenya bisa sama. (9) Tingkah laku kriminal dan anti kriminal dapat merupakan perwujudan atau ekspresi dan tujuan yang sama, mekanismenya berbeda. Contohnya adalah untuk memperoleh uang harus dengan kerja keras yang dilakukan kaum anti kriminal, dan dengan mencuri oleh kelompok kriminal.

78. Kesimpulannya adalah *differential group organization* atau tradisi kriminalistik atau *criminalistic tradition* dipergunakan untuk menjelaskan kriminalitas kelompok. Hal ini untuk menjawab mengapa orang laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan; mengapa di kota lebih banyak terjadi kejahatan serta untuk menjelaskan tentang jumlah kejahatan atau disebut juga dengan *rate of criminalistic behavior*, sedangkan asosiasi deferensial untuk menerangkan kriminalitas individu. Beberapa ahli antara lain Glaser dengan *teori differential identification* mengatakan bahwa teori Sutherland ini terlalu mekanistik, karena menggambarkan seakan-akan jika seseorang bergaul dengan kejahatan, otomatis menjadi jahat padahal tidak seperti itu, mengapa tidak otomatis menjadi jahat? Karena individu

mempunyai kemampuan untuk menghindari, menolak kejahatan. Disamping Glaser, terdapat juga ahli lain, yaitu Burges dan Akess, mereka berdua mengemukakan teori yang disebut *Defferental reinforcement* dan berdasarkan *reinforcement* ini terdapat *dalil the law of defferential inforcement*, artinya apabila seseorang menghadapi sejumlah pilihan, dia cenderung memilih perbuatan yang paling memberikan kepuasan.

79. Teori asosiasi deferensial ini mendapat kritik dari berbagai pihak, yaitu (1) teori tersebut hanya dapat diterapkan untuk menjelaskan kejahatan kelompok, tidak untuk kejahatan individual, misalnya kejahatan pemalsuan cek, yang tergolong *white color crime* atau kejahatan yang dilakukan dalam lapangan pekerjaan atau malpraktek. (2) Teori asosiasi deferensial yang mengatakan jika pengaruh tingkah laku kriminal lebih besar dari pengaruh tingkah laku anti kriminal menjadi sebab terjadinya tingkah laku kriminal sukar dibuktikan, padahal ini adalah inti. Suatu teori akan kuat apabila dapat dibuktikan atau diverifikasi. Pernyataan pola tingkah laku kriminal lebih kuat tingkah laku anti kriminal menimbulkan ekses. (3) Menurut Daniel, identifikasi menyebabkan deviasi. Hubungan ini sukar dibuktikan karena bisa terjadi sebaliknya. (4) Kritik juga diberikan kepada Burgess dan Akess, yang

hanya membenarkan untuk kriminalitas yang pernah berlaku. Meski demikian teori asosiasi deferensial tetap memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian.

D. Teori Kontrol Sosial.

80. Teori kontrol sosial pada dasarnya beranggapan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama yakni berperilaku menyimpang dan tidak menyimpang. Benar dan salahnya perilaku manusia sangat bergantung pada kondisi masyarakat serta kesepakatan masyarakat atas standard perilaku manusia itu sendiri yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

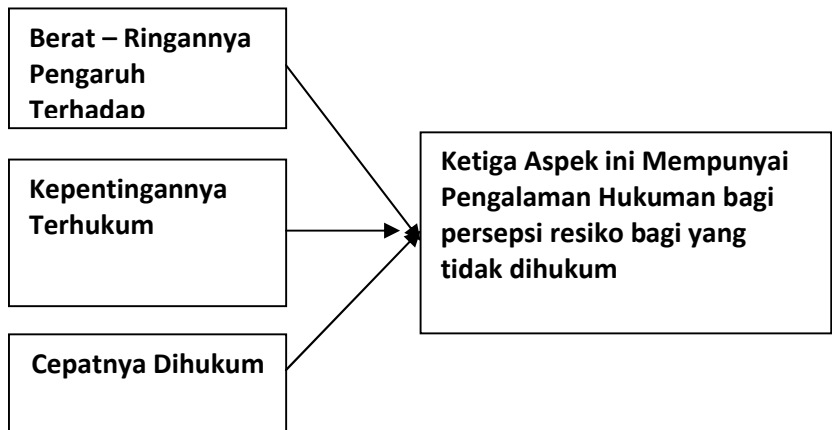
81. Teori ini mengakui akan adanya tiga hal dalam mengontrol tingkah laku sosial, yaitu (1) bahwa tata sosial atau *social order* itu dapat diketahui dengan jelas, (2) maka pelanggaran norma dapat diketahui dengan jelas atau dengan mudah pula, (3) bahwa teori ini berpikir secara kausal atau sebab akibat.

82. Teori anomie mengatakan bahwa struktur masyarakat menjadikan penyebab terjadinya deviasi, yang dijelaskan dengan terdapatnya kesenjangan antara tujuan dan cara. Sedangkan teori asosiasi deferensial lebih banyak menggali keterlibatan pada kelompok atau pola kelakuan deviasi yang menyebabkan keterlibatan kelompok deviasi.

83. Dalam teori kontrol sosial dapat menarik semua orang menimbulkan banyak orang untuk melakukan, tetapi mengapa hanya sedikit yang melakukan, oleh karena itu adanya kontrol sosial. Teori kontrol sosial ini merupakan perluasan teori disorganisasi sosial. Yang di dalamnya terdapat dua macam kontrol sosial, yaitu (1) kontrol sosial yang bersifat bathiniah, dan norma-norma serta aturan dalam masyarakat yang diinternalisasikan dalam diri manusia. Norma-norma ini menjadi patokan benar – salahnya suatu tingkah laku. Norma disosialisasikan dan dinternalisasikan oleh individu dalam masyarakat dalam masing-masing kondisi lingkungan yang bersangkutan. Seorang anak menginternalisasi kriminalitas bila hidup dalam kelompok penjahat, bila kontrol bathiniah lemah maka seseorang dapat melakukan deviasi. (2) Kontrol Sosial Lahiriah. Kontrol sosial jenis ini juga penting karena kontrol sosial ini yang menghambat terjadinya pelanggaran norma. Misalnya, fenomena prostitusi yang terjadi pada penganggur atau bujangan dan pekerja atau telah berstatus menikah, maka akan lebih banyak yang mengawasi, suami atau isteri, anak-anak, atasan, teman dan lain-lain. Sebaliknya bila individu itu masih bujangan maka tidak banyak yang mengawasi, alasannya orang yang menganggur, bujangan diasumsikan lebih bebas melakukan deviasi, karena kontrol sosialnya lemah.

84. Sykes dan Matza, menyebutkan bahwa kuatnya peranan kontrol batiniah sedangkan Hirschi menekankan perpaduan antara kontrol batiniah dan lahiriah. Pada umumnya tokoh-tokoh agama lebih menekankan kontrol batiniah. Kontrol sosial lahiriah, dalam bentuk institusional, misalnya dalam keluarga, sekolah dan pemerintah.

85. Dalam teori kontrol sosial ini seperti teori yang disebut teori pencegahan atau disebut juga dengan *Deterrence Theory* yang berasumsi bahwa devian itu bersifat rasional, artinya ia mementingkan untung dan rugi. Menurut teori *deterrence* ini hukum negara dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu (1) berat-ringannya pengaruh terhadap, (2) kepentingan terhukum, dan (3) cepatnya dihukum. Ketiga aspek ini mempunyai pengalaman hukuman bagi persepsi resiko yang tidak dihukum. Bila dibuat sebuah skema akan terlihat seperti di bawah ini.



86. Maksudnya adalah setiap pelanggaran hukum menjadi pembelajaran bagi yang tidak melanggar hukum, misalnya norma pemakaian helm saat berkendara. Ketika seseorang didenda oleh petugas kepolisian lalu lintas oleh karena tidak menggunakan helm atau tidak membawa surat-surat yang diperlukan saat berkendara maka bagi orang lain yang melihat peristiwa tersebut dapat digunakan sebagai pembelajaran yang positif agar membawa perlengkapan saat berkendara. Semakin berat pasti memiliki pengaruh yang relatif cepat terhadap pihak lain.

87. Terdapat tiga versi teori kontrol sosial, yaitu (1) teori penahanan yang dikembangkan oleh Reckless, (2) teori kontrol yang dikembangkan oleh Nye, dan (3) teori ikatan pada masyarakat yang dikembangkan oleh Hirschi. Teori penahanan

atau *deterrence theory*, dari Reckless yang memperkenalkan teori penahanan diawali dengan penelitian terhadap anak-anak SD di Ohio. Sekolah dasar atau SD itu terdiri dari anak-anak baik dan kelompok anak nakal. Anak-anak yang baik memiliki penahanan diri atau internal yang baik, tanggungjawab yang baik, sedangkan pada kelompok anak nakal sebaliknya. Dari sisi anak-anak yang baik juga terdapat pengawasan dari orang tua, teman dan hal ini disebut sebagai penahanan eksternal. Sedangkan pada anak-anak nakal, nilai penahanan eksternalnya lemah. Teori penahanan ini merupakan teori yang menjelaskan tentang penahanan pada diri individu baik yang internal dan eksternal memiliki kekuatan dalam mencegah terjadinya deviasi atau pelanggaran terhadap norma. Semakin besar kemampuan mengendalikan diri terhadap deviasi semakin rendah kecenderungan orang untuk melakukan deviasi.

88. Teori kontrol sosial atau *social control theory*, yang dikembangkan oleh Nye, sebagai pelopor teori kontrol mengungkapkan bahwa ada kekuatan pendorong pada diri manusia untuk melakukan deviasi. Nye semata-mata mendasarkan diri pada teori S Freud yang mengatakan bahwa manusia memiliki instink hewaniah menjadi satu-satunya pendorong. Bahwa semua manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran norma, akan tetapi tidak semua

melakukan, karena ada kontrol sosial. Masyarakat melakukan kontrol sosial untuk menahan kecenderungan terjadinya deviasi sehingga individu menjadi patuh terhadap negara. Jika kontrol sosial lemah, maka deviasi akan terjadi.

89. Ada beberapa tipe atau bentuk teori kontrol sosial, yaitu (1) kontrol internal yang berjalan secara langsung, sosialisasi melalui nilai-nilai, norma oleh orang tua kepada anak-anaknya dan menginternalisasikan menjadi kata hatinya. (2) Kontrol internal tidak langsung, apabila hubungan afektif antara orang tua atau orang dewasa dan anak-anak sudah merupakan kontrol tidak langsung. (3) Kontrol eksternal yang langsung, dipercayakan pada institusi-institusi seperti para guru, polisi, jaksa, hakim, penegak hukum yang lain. Misalnya dapat berupa ancaman, ejekan, penjara atau pengucilan.

90. Dalam dunia orang dewasa, norma itu berwayuh hati, ambiguity (memiliki makna lebih dari satu) sehingga dapat diberi arti macam-macam. Oleh karena itu Gary Marx, teori kontrol dalam menjelaskan kontrol sosial sebagai pencegahan terhadap deviasi lupa bahwa kontrol sosial itu justru dapat menyebabkan deviasi, sebagai contoh adalah seorang polisi lalu lintas seharusnya berfungsi sebagai kontrol sosial tetapi justru sering menimbulkan pungli. Dan seorang jaksa juga

penegak hukum namun justru terlibat dalam korupsi atau kasus penyuapan.

91. Kritik terhadap teori Kontrol, yaitu (1) Penelitian yang membuktikan, deviasi ini ditujukan pada anak-anak dan remaja (kenakalan) tidak ada bukti empirik untuk deviasi orang dewasa. (2) Meneliti tentang lemahnya deviasi-remaja delinquent. (3) Lebih cocok untuk menjelaskan deviasi pada anak-anak dan remaja, tetapi kurang cocok untuk kajian deviasi orang dewasa.

Teori Ikatan pada Masyarakat (*Bond Theory*)

92. Teori ini dimunculkan oleh Travis Hirschi, memang benar bahwa setiap manusia memiliki dorongan hewaniah, tetapi tidak semua mengembangkan instink hewaniahnya itu oleh karena ada ikatan dengan masyarakat. Nye memandang hubungan individu secara sosiologik tentang bagaimana masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap individu (faktor eksternal). Sementara itu Hirschi memandang hubungan individu dengan individu lain secara psikologik bagaimana individu mengikatkan diri dengan masyarakat.

93. Terdapat empat bentuk atau tipe ikatan dengan masyarakat, yaitu (1) *attachment*, ikatan kasih sayang, artinya hubungan individu dengan masyarakat dalam bentuk individu mencintai,

menghormati, menyukai orang tua, guru, sekolah, teman, pemerintah dll. Attachment ini menunjuk pada kemampuan seseorang untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika attachment sudah terbentuk maka seseorang akan peka terhadap pikiran, perasaan, kehendak orang lain pula. Ada dua jenis attachment yaitu total dan partial. Attachment total apabila seseorang berhasil melepaskan ego dalam dirinya sehingga yang muncul adalah rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan ini kemudian mendorong seseorang untuk patuh pada aturan sebab jika melanggar berarti telah menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan attachment partial, merupakan hubungan seseorang dengan orang lain yang tidak didasarkan pada peleburan ego tetapi karena hadirnya pihak lain yang mengawasi. Dengan demikian attachment total akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi. Sedangkan attachment partial akan menimbulkan kepatuhan jika ada orang lain yang mengawasinya. (2) *A Commitment* → tanggungjawab, individu melakukan kegiatan-kegiatan yang konvensional misalnya belajar, kerja bakti, taat, kerja sosial dan lain-lain. Apabila seorang individu diberi tanggungjawab maka kemungkinan akan berperilaku sebagaimana seharusnya. (3) *Involvement* (ikatan keterlibatan). Keterlibatan secara nyata dalam keseharian, konvensional seperti sekolah berarti

kesempatan untuk melakukan pelanggaran terhadap norma tidak ada lagi. (4) *Moral Belief* (ikatan keyakinan moral). Individu mempunyai kekuatan moral antara lain, sikap menghargai pemerintah, polisi, penegak hukum dan terhadap hukum itu sendiri. Jika keterikatan secara moral keyakinan ini semakin kuat maka akan konformitas, akan tetapi jika ikatannya lemah maka terjadi deviasi. Ada hubungan positif antara keempat ikatan dengan konformitas, artinya semakin kuat ikatan maka semakin kuat konformitas.

Ringkasan

BAB VIII

STUDI DEVIASI SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MODERN

A. Teori Label

Selama tahun 1960 an sejumlah sosiolog mempersoalkan asumsi mengenai norma, dan mereka berasumsi; bahwa norma itu muncul dan berubah, norma-norma itu konflik. Oleh karena itu, mereka merumuskan kembali objek penelitian sosiologi deviasi, maka pelanggaran norma lalu dipersoalkan lagi. Sejak itu sejumlah sosiolog mendefinisikan, deviasi sebagai sebutan sosial atau cap yang sering juga disebut *deviance as social definition* yang digunakan oleh sekelompok orang terhadap orang lain. Teori mereka ini berpusat pada dua pertanyaan, yaitu apakah deviasi itu ? Siapakah yang dicap sebagai devian ?

Pertanyaan pertama mengarahkan teori dan penelitian tentang, norma sosial dan katagori sosial, yang digunakan mencap orang lain sebagai devian. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah mengapa norma tentang pemakaian alkohol berbeda di berbagai negara ? mengapa norma sosial dan deviasi tergantung pada situasi spesifik ? Mereka berpendapat bahwa norma yang bersifat umum kerap kali berwayuh arti atau bermakna ganda dalam mengarahkan tingkahlaku dalam

situasi spesifik. Misalnya, sebutan sakit jiwa sebagai kategori sosial, dulu dianggap termasuk setan, dan jahat, akan tetapi sekarang dianggap sakit, perlu perawatan. Jadi mengenai apa yang disebut deviasi, menunjukkan studi tentang munculnya norma sosial dan kategori sosial yang digunakan untuk melukiskan deviasi. Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang disebut devian ? Pertanyaan ini menunjuk kepada proses, yang mana kategori sosial yang sudah ada diterapkan seseorang dalam situasi spesifik. Menurutnya dari sejumlah banyak individu yang melanggar norma, hanya sebagian saja yang dicap sebagai devian oleh keluarga, teman, masyarakatnya, atau penguasa. Mengapa ada orang yang tidak melanggar norma dicap sebagai devian, dalam kondisi yang bagaimana seseorang dicap sebagai devian. Ini lebih mengarah pada pertanyaan benar atau salah. Dicap sebagai devian dapat bermakna benar atau salah, dan mempunyai akibat bagi hubungan sosialnya, seperti terhadap keluarga, persahabatan, kedudukan dalam masyarakat, dan lain-lain. Juga dalam hal pelanggaran hukum, hanya sebagian pelanggaran hukum yang diketahui, ditahan, diadili, dan dijatuhi hukuman.

Studi tentang deviasi sebagai sebutan sosial berpusat pada pertanyaan sebagai berikut: apakah deviasi itu ? Dalam

hal ini, apakah norma sosial yang umum dan yang situasional, dan bagaimana munculnya ? Apakah kategori sosial dan cap yang digunakan untuk melukiskan devian, dan bagaimana munculnya ? Apakah hukum dan kategori hukum yang digunakan untuk melukiskan pelanggar hukum dan bagaimana munculnya ? Pertanyaan pertama, siapakah devian itu ? Untuk ini yang perlu dilihat adalah siapakah yang dicap oleh masyarakat sebagai pelanggar norma ? Apa akibat yang dialami oleh seseorang yang dicap sebagai pelanggar norma itu ? Siapa yang dicap sebagai pelanggar hukum, dan apa akibat dari sebutan itu ? Teori label lebih mempelajari masyarakat dari sudut proses sosial dari pada struktur sosialnya, dan dalam skala mikro atau skala terbatas. Deviasi sebagai cap sosial atau disebut juga dengan *social definition* dan dipelopori oleh Edwin Lamert (1967) yang berasumsi bahwa masyarakat itu pluralistik dan norma itu temporer dan muncul sebagai akibat proses sosial karena berbagai kelompok bersaing untuk berdominasi.

Dalam persaingan itu beberapa norma kelompok menjadi norma masyarakat, sebagian menjadi hukum dalam masyarakat, lalu sebagian orang dicap sebagai devian atau pelanggar norma dan sebagai kriminal atau pelanggar hukum. Ia membedakan deviasi primer dan sekunder dalam teorinya.

Deviasi primer adalah deviansi yang tidak mempengaruhi struktur psikik dan peranan sosial individu, tidak menetap, disebabkan oleh berbagai macam kondisi, bersifat *poligenetik*. Deviasi sekunder adalah deviasi yang merupakan respon terhadap kondisi yang disebabkan oleh reaksi masyarakat terhadap deviasi primer, menetap dan mempengaruhi struktur psikik dan peranan sosial individu, sebagai bentuk membela diri atau adaptasi terhadap reaksi-reaksi masyarakat terhadap deviasi primer.

Deviasi sekunder selalu berasal dari deviansi primer, tetapi tidak setiap deviasi primer berkembang menjadi deviasi sekunder. Teori Lamert menitik beratkan kepada studi tentang deviasi sekunder. Menurutnya dicap secara publik sebagai devian menimbulkan stigma atau noda dan akan mempengaruhi akibat pada hubungan sosial dan kesempatan, seperti merugikan pergaulan, kesempatan kerja, mempengaruhi konsep diri sebagai devian sebagaimana cap yang diberikan oleh masyarakat, reaksi masyarakat terhadap deviasi primer menyebabkan deviasi menjadi menetap.

Pada tahun 1960 an Howard Becker, John Kitsuse, dan Kai Erikson menafsirkan deviasi sebagai interaksi simbolik. Interaksi simbolik menganut keyakinan sama dengan sosiolog

humanistik yang umumnya dianut oleh sosiolog modern. Menurut interaksi simbolik, manusia itu makhluk yang sadar, mempunyai perasaan, berfikir, dan berefleksi. Hebert Blumer yang lebih menekankan sebab interaksi simbolik, manusia yang aktif bertindak terhadap objek yang dihadapi. Tingkah laku manusia sifatnya dinamik atau tidak statik yang terus menerus berubah sesuai dengan konteks interaksi. Bila mereka berinteraksi sosial, mereka saling memberikan makna atas perbuatan masing-masing, dan makna itu akan dipergunakannya dalam pergaulannya yang akan datang.

Dalam menafsirkan tingkah laku deviasi, teori label mendasarkan diri pada ide pokok interaksi simbolik, yaitu kata "interaksi", berarti bahwa tingkah laku deviasi adalah tingkah laku bersama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yaitu antara pihak yang disebut devian, dan pihak yang disebut konformitas. Kata simbolik, berarti dalam interaksi antara devian dengan konformis itu masing-masing saling memberikan makna atas perbuatan mereka. Makna itu mengandung interpretasi dan definisi atas masing-masing perbuatan mereka. Hal ini berarti bahwa makna atau simbol, atau isyarat, atau interpretasi, atau definisi, dan atau label lebih penting dari perbuatannya itu sendiri. Lebih jauh Becker and Erikson (Orcutt JD, 1983) mengatakan,

Of the three labeling theorists we are discussing in this section, only Becker and Erikson (and not Kitsuse) deal extensively with the problem of secondary deviance. It is important to point out that neither of these theorists bases his analysis of this problem strictly on Lemert's early, symbolic interactionist analysis of secondary deviation (1951). In fact, Lemert's more recent criticism of labeling theory as "crude sociological determinism" (1972: 16) appears to have been inspired primarily by differences between his treatment and the Becker-Erikson treatment of this particular analytical problem.

Teori label menggunakan ide interaksi simbolik itu untuk menerangkan tingkah laku deviansi. Kitsuse mengatakan perbuatan itu sendiri tidak akan membedakan antara devian dan non devian, melainkan interpretasi dari satu pihak kepada pihak yang lain itulah yang memberikan bentuk atau label deviasi. Teori label mengatakan deviasi itu bukan sesuatu yang statis, melainkan merupakan proses dinamik dari interaksi simbolik. Jadi, teori label tidak bersifat etiologik atau kausal. Ada tiga pertanyaan pokok dalam teori ini, yaitu siapa menerapkan label devian kepada siapa? Apa akibat pelabelan itu bagi individu yang dikenainya? Apa akibat pelabelan itu bagi individu yang menerapkannya?

Siapa memberikan label kepada siapa? Menurut kaum labelis, yang memberikan label atau cap adalah pihak yang mempunyai kekuatan hukum dan golongan konvensional,

seperti polisi, hakim dan atau jaksa, pejabat negara, dokter jiwa atau psikiater, dan petugas-petugas lain dari institusi yang melaksanakan kontrol sosial. Sebaliknya, yang dicap atau dilabel sebagai devian adalah pihak yang lemah, seperti kriminal, *delinquent* atau kenakalan, pecandu narkotik, prostitut, penderita penyakit jiwa, dan lain-lain sebagainya. Pihak yang kuat adalah orang kaya, berkedudukan, kulit putih yang dapat memberikan cap atau label itu. Sebaliknya golongan miskin, rakyat kecil, kulit hitam yang menjadi sasaran label itu. Mereka ini yang biasanya ditangkap, diadili, dan dihukum.

Akibat dari pe-label-an, yaitu pihak yang dicap atau dilabel dan pihak mencap. Teori label itu lebih banyak menyoroti pihak yang dicap daripada pihak yang mencap. Menurut teori label dalam hal ini pihak yang dicap, dicap sebagai devian mempunyai akibat negatif terhadap yang bersangkutan. Akibat dicap atau dilabel, yang bersangkutan akan memandang dirinya sebagai devian, dengan demikian mereka akan melanjutkan deviasinya.

Mencap atau melabel orang lain dalam hal ini pihak yang mencap mempunyai akibat positif bagi yang mencap menurut Erikson – masyarakat atau kelompok atau individu. Dengan mencap individu lain melanggar norma, berarti mengeluarkan

individu tersebut dari kelompoknya. Dengan mencap individu sebagai penjahat, maka anggota konvensional yang lain akan, (1) mengetahui perbedaan antara baik dan jahat, sehingga mereka akan memihak yang baik dan menyingkirkan yang jahat, (2) orang yang dicap jahat akan memberi pelajaran kepada golongan konvensional bagaimana rasanya digolongkan sebagai penjahat, (3) adanya individu atau kelompok yang dicap sebagai devian menyebabkan masyarakat lain mengalami akibat positif, hal itu akan berakibat terpilihnya ikatan sosial dan tata sosial dalam masyarakat.

Kritik-kritik terhadap teori label, teori label menjadi populer dikalangan sosiologi, tetapi tidak terlepas pula dari kritik, seperti (1) teori label tidak dapat menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut, (a) mengapa suatu jenis devian berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lain, (b) mengapa beberapa orang terlibat pada deviasi tertentu sedangkan orang lain tidak, dan (c) mengapa suatu deviasi disebut deviasi pada suatu masyarakat, tetapi pada masyarakat lain tidak.

Teori label memandang, kritik tersebut meleset sebab teori teori label sama sekali tidak bersifat *etiologik*. Tetapi tokoh-tokoh teori label akhir-akhir ini juga berpandangan

etiologik. Perubahan pandangan itu nampak dalam studi mereka mengenai sebab-sebab deviasi sekunder. Meskipun Lemert, sebagai pelopor teori label, berpendapat bahwa menjadi devian sekunder adalah proses interaksi aktif, namun para pengikutnya cenderung berpendapat bahwa menjadi devian sekunder adalah bersifat pasif.

Hal tersebut dikritik Francis Piven, devian itu pada hakekatnya bersikap aktif terhadap reaksi masyarakat. Juga teori label dikritik karena dianggap menyelewengkan kenyataan dan terlalu memandang sederhana proses terjadinya deviasi karier. Semua kelemahan humanistik yang mendasari teori label. Teori label memandang golongan yang berkuasa cenderung memberi label kepada golongan yang lemah sebagai devian, ini benar. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa golongan menengah dan atas juga menjadi devian.

Kritik yang ke (2) dalam pandangan teori label, dicap sebagai devian mempunyai akibat negatif dan hal itu akan mendorong deviasi lebih lanjut. Tetapi persyaratan ini tidak selalu didukung oleh data penelitian. Menurut Davide Farrington, *delinquent* atau nakal yang dicap secara publik hanya sedikit menjadi lebih *delinquent* atau nakal. Dan menurut Charles Tittle, angka residivis yang dilepaskan dari penjara

bergerak antara 24 – 68 % dengan rata-rata 44 % angka mana dipandang tidak tinggi. Tetapi angka 44 % itu menunjukkan akibat dari pelabelan atau pemberian cap. Akibat dari pelabelan terhadap deviasi lebih lanjut lebih cocok diterapkan pada devian yang tidak punya kekuatan daripada devian yang mempunyai kekuatan, misalnya *white-collar criminal*.

Kritik yang ke tiga (3) pelabelan mempunyai akibat positif bagi pihak yang memberikan label, yaitu memperkuat tata sosial dan stabilitas sosial. Hal tersebut benar hanya terbatas pada dua alasan, yaitu (a) karena pihak yang mencap ada pada posisi yang kuat sedang yang dicap pada posisi yang lemah, (b) dengan menghukum devian yang lemah maka pihak yang kuat tidak akan melakukan deviasi seperti pihak yang kuat tidak akan melakukan deviasi seperti pihak yang lemah. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa pihak yang berkuasa tidak akan melakukan deviasi. Mereka melakukan deviasi yang lebih canggih dan tersamar. Hal ini disebabkan karena perhatian masyarakat tertuju kepada deviasi dari golongan yang lemah.

Dalam pandangan Erikson, kejahatan menyebabkan stabilitas dan solidaritas masyarakat menguat. Sedangkan dalam pandangan John Conklin, kejahatan memperlemah solidaritas sosial. Sebagai bukti ia ambil contoh kota kecil

Boise, kota itu diguncang skandal homoseks antara orang dewasa dengan anak-anak. Kejadian ini berakibat, semua orang bujangan dicurigai, polisi dinilai tidak becus, dan semua anak-anak dicurigai. Yang dimaksud Erikson, solidaritas dikalangan golongan konvensional. Pemberian label kepada golongan yang lemah menyebabkan penegak hukum lebih banyak memusatkan perhatian kepada pihak yang lemah sehingga deviasi dari pihak golongan yang kuat bisa lolos dari perhatian mereka.

Ringkasan

1. Mereka merumuskan kembali objek penelitian sosiologi deviasi, maka pelanggaran norma lalu dipersoalkan lagi. Sejak itu sejumlah sosiolog mendefinisikan, deviasi sebagai sebutan sosial atau cap yang sering juga disebut *deviance as social definition* yang digunakan oleh sekelompok orang terhadap orang lain.
2. Pertanyaan pertama mengarahkan teori dan penelitian tentang, norma sosial dan katagori sosial, yang digunakan mencap orang lain sebagai devian. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah mengapa norma tentang pemakaian alkohol berbeda di berbagai negara ? mengapa norma sosial dan deviasi tergantung pada situasi spesifik ? Mereka berpendapat bahwa norma yang bersifat umum kerap kali berwayuh arti atau bermakna ganda dalam mengarahkan tingkahlaku dalam situasi spesifik. Misalnya, sebutan sakit jiwa sebagai kategori sosial, dulu dianggap kemasukan setan, dan jahat, akan tetapi sekarang dianggap sakit, perlu perawatan. Jadi mengenai apa yang disebut deviasi, menunjukkan studi tentang munculnya norma sosial dan kategori sosial yang digunakan untuk melukiskan deviasi. Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang

disebut devian ? Pertanyaan ini menunjuk kepada proses, yang mana kategori sosial yang sudah ada diterapkan seseorang dalam situasi spesifik. Menurutnya dari sejumlah banyak individu yang melanggar norma, hanya sebagian saja yang dicap sebagai devian oleh keluarga, teman, masyarakatnya, atau penguasa. Mengapa ada orang yang tidak melanggar norma dicap sebagai devian, dalam kondisi yang bagaimana seseorang dicap sebagai devian. Ini lebih mengarah pada pertanyaan benar atau salah. Dicap sebagai devian dapat bermakna benar atau salah, dan mempunyai akibat bagi hubungan sosialnya, seperti terhadap keluarga, persahabatan, kedudukan dalam masyarakat, dan lain-lain. Juga dalam hal pelanggaran hukum, hanya sebagian pelanggar hukum yang diketahui, ditahan, diadili, dan dijatuhi hukuman.

3. Studi tentang deviasi sebagai sebutan sosial berpusat pada pertanyaan sebagai berikut: apakah deviasi itu ? Dalam hal ini, apakah norma sosial yang umum dan yang situasional, dan bagaimana munculnya ? Apakah kategori sosial dan cap yang digunakan untuk melukiskan devian, dan bagaimana munculnya ? Apakah hukum dan kategori hukum yang digunakan untuk

melukiskan pelanggar hukum dan bagaimana munculnya ? Pertanyaan pertama, siapakah devian itu ? Untuk ini yang perlu dilihat adalah siapakah yang dicap oleh masyarakat sebagai pelanggar norma ? Apa akibat yang dialami oleh seseorang yang dicap sebagai pelanggar norma itu ? Siapa yang dicap sebagai pelanggar hukum, dan apa akibat dari sebutan itu ? Teori label lebih mempelajari masyarakat dari sudut proses sosial dari pada struktur sosialnya, dan dalam skala mikro atau skala terbatas. Deviasi sebagai cap sosial atau disebut juga dengan *social definition* dan dipelopori oleh Edwin Lamert (1967) yang berasumsi bahwa masyarakat itu pluralistik dan norma itu temporer dan muncul sebagai akibat proses sosial karena berbagai kelompok bersaing untuk berdominasi.

4. Dalam persaingan itu beberapa norma kelompok menjadi norma masyarakat, sebagian menjadi hukum dalam masyarakat, lalu sebagian orang dicap sebagai devian atau pelanggar norma dan sebagai kriminal atau pelanggar hukum. Ia membedakan deviasi primer dan sekunder dalam teorinya. Deviasi primer adalah deviansi yang tidak mempengaruhi struktur psikik dan peranan sosial individu, tidak menetap, disebabkan oleh berbagai

macam kondisi, bersifat *poligenetik*. Deviasi sekunder adalah deviasi yang merupakan respon terhadap kondisi yang disebabkan oleh reaksi masyarakat terhadap deviasi primer, menetap dan mempengaruhi struktur psikis dan peranan sosial individu, sebagai bentuk membela diri atau adaptasi terhadap reaksi-reaksi masyarakat terhadap deviasi primer.

5. Deviasi sekunder selalu berasal dari deviansi primer, tetapi tidak setiap deviasi primer berkembang menjadi deviasi sekunder. Teori Lamert menitik beratkan kepada studi tentang deviasi sekunder. Menurutnya dicap secara publik sebagai devian menimbulkan stigma atau noda dan akan mempengaruhi akibat pada hubungan sosial dan kesempatan, seperti merugikan pergaulan, kesempatan kerja, mempengaruhi konsep diri sebagai devian sebagaimana cap yang diberikan oleh masyarakat, reaksi masyarakat terhadap deviasi primer menyebabkan deviasi menjadi menetap.
6. Pada tahun 1960 an Howard Becker, John Kitsuse, dan Kai Erikson menafsirkan deviasi sebagai interaksi simbolik. Interaksi simbolik menganut keyakinan sama dengan sosiolog humanistik yang umumnya dianut oleh

sosiolog modern. Menurut interaksi simbolik, manusia itu makhluk yang sadar, mempunyai perasaan, berfikir, dan berefleksi. Hebert Blumer yang lebih menekankan sebab interaksi simbolik, manusia yang aktif bertindak terhadap objek yang dihadapi. Tingkah laku manusia sifatnya dinamik atau tidak statik yang terus menerus berubah sesuai dengan konteks interaksi. Bila mereka berinteraksi sosial, mereka saling memberikan makna atas perbuatan masing-masing, dan makna itu akan dipergunakannya dalam pergaulannya yang akan datang.

7. Dalam menafsirkan tingkah laku deviasi, teori label mendasarkan diri pada ide pokok interaksi simbolik, yaitu kata "interaksi", berarti bahwa tingkah laku deviasi adalah tingkah laku bersama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yaitu antara pihak yang disebut devian, dan pihak yang disebut konformitas. Kata simbolik, berarti dalam interaksi antara devian dengan konformis itu masing-masing saling memberikan makna atas perbuatan mereka. Makna itu mengandung interpretasi dan definisi atas masing-masing perbuatan mereka. Hal ini berarti bahwa makna atau simbol, atau isyarat, atau interpretasi, atau definisi, dan atau label lebih penting

dari perbuatannya itu sendiri. Lebih jauh Becker and Erikson (Orcutt JD, 1983) mengatakan,

Of the three labeling theorists we are discussing in this section, only Becker and Erikson (and not Kitsuse) deal extensively with the problem of secondary deviance. It is important to point out that neither of these theorists bases his analysis of this problem strictly on Lemert's early, symbolic interactionist analysis of secondary deviation (1951). In fact, Lemert's more recent criticism of labeling theory as "crude sociological determinism" (1972: 16) appears to have been inspired primarily by differences between his treatment and the Becker-Erikson treatment of this particular analytical problem.

8. Teori label menggunakan ide interaksi simbolik itu untuk menerangkan tingkah laku deviansi. Kitsuse mengatakan perbuatan itu sendiri tidak akan membedakan antara devian dan non devian, melainkan interpretasi dari satu pihak kepada pihak yang lain itulah yang memberikan bentuk atau label deviasi. Teori label mengatakan deviasi itu bukan sesuatu yang statis, melainkan merupakan proses dinamik dari interaksi simbolik. Jadi, teori label tidak bersifat etiologik atau kausal. Ada tiga pertanyaan pokok dalam teori ini, yaitu siapa menerapkan label devian kepada siapa ? Apa akibat pelabelan itu bagi individu yang dikenainya ? Apa akibat pelabelan itu bagi individu yang menerapkannya ?

9. Siapa memberikan label kepada siapa ? Menurut kaum labelis, yang memberikan label atau cap adalah pihak yang mempunyai kekuatan hukum dan golongan konvensional, seperti polisi, hakim dan atau jaksa, pejabat negara, dokter jiwa atau psikiater, dan petugas-petugas lain dari institusi yang melaksanakan kontrol sosial. Sebaliknya, yang dicap atau dilabel sebagai devian adalah pihak yang lemah, seperti kriminal, *delinquent* atau kenakalan, pecandu narkotik, prostitut, penderita penyakit jiwa, dan lain-lain sebagainya. Pihak yang kuat adalah orang kaya, berkedudukan, kulit putih yang dapat memberikan cap atau label itu. Sebaliknya golongan miskin, rakyat kecil, kulit hitam yang menjadi sasaran label itu. Mereka ini yang biasanya ditangkap, diadili, dan dihukum.
10. Akibat dari pe-label-an, yaitu pihak yang dicap atau dilabel dan pihak mencap. Teori label itu lebih banyak menyoroti pihak yang dicap daripada pihak yang mencap. Menurut teori label dalam hal ini pihak yang dicap, dicap sebagai devian mempunyai akibat negatif terhadap yang bersangkutan. Akibat dicap atau dilabel, yang bersangkutan akan memandang dirinya sebagai

devian, dengan demikian mereka akan melanjutkan deviasinya.

11. Mencap atau melabel orang lain dalam hal ini pihak yang mencap mempunyai akibat positif bagi yang mencap menurut Erikson – masyarakat atau kelompok atau individu. Dengan mencap individu lain melanggar norma, berarti mengeluarkan individu tersebut dari kelompoknya. Dengan mencap individu sebagai penjahat, maka anggota konvensional yang lain akan, (1) mengetahui perbedaan antara baik dan jahat, sehingga mereka akan memihak yang baik dan menyingkirkan yang jahat, (2) orang yang dicap jahat akan memberi pelajaran kepada golongan konvensional bagaimana rasanya digolongkan sebagai penjahat, (3) adanya individu atau kelompok yang dicap sebagai devian menyebabkan masyarakat lain mengalami akibat positif, hal itu akan berakibat terpilihnya ikatan sosial dan tata sosial dalam masyarakat.

12. Kritik-kritik terhadap teori label, teori label menjadi populer dikalangan sosiologi, tetapi tidak terlepas pula dari kritik, seperti (1) teori label tidak dapat menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut, (a) mengapa suatu jenis

devian berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lain, (b) mengapa beberapa orang terlibat pada deviasi tertentu sedangkan orang lain tidak, dan (c) mengapa suatu deviasi disebut deviasi pada suatu masyarakat, tetapi pada masyarakat lain tidak.

13. Teori label memandang, kritik tersebut meleset sebab teori teori label sama sekali tidak bersifat *etiologik*. Tetapi tokoh-tokoh teori label akhir-akhir ini juga berpandangan *etiologik*. Perubahan pandangan itu nampak dalam studi mereka mengenai sebab-sebab deviasi sekunder. Meskipun Lemert, sebagai pelopor teori label, berpendapat bahwa menjadi devian sekunder adalah proses interaksi aktif, namun para pengikutnya cenderung berpendapat bahwa menjadi devian sekunder adalah bersifat pasif.

14. Hal tersebut dikritik Francis Piven, devian itu pada hakekatnya bersikap aktif terhadap reaksi masyarakat. Juga teori label dikritik karena dianggap menyelewengkan kenyataan dan terlalu memandang sederhana proses terjadinya deviasi karier. Semua kelemahan humanistik yang mendasari teori label. Teori label memandang golongan yang berkuasa cenderung

memberi label kepada golongan yang lemah sebagai devian, ini benar. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa golongan menengah dan atas juga menjadi devian.

15. Kritik yang ke (2) dalam pandangan teori label, dicap sebagai devian mempunyai akibat negatif dan hal itu akan mendorong deviasi lebih lanjut. Tetapi persyaratan ini tidak selalu didukung oleh data penelitian. Menurut Davide Farrington, *delinquent* atau nakal yang dicap secara publik hanya sedikit menjadi lebih *delinquent* atau nakal. Dan menurut Charles Tittle, angka residivis yang dilepaskan dari penjara bergerak antara 24 – 68 % dengan rata-rata 44 % angka mana dipandang tidak tinggi. Tetapi angka 44 % itu menunjukkan akibat dari pelabelan atau pemberian cap. Akibat dari pelabelan terhadap deviasi lebih lanjut lebih cocok diterapkan pada devian yang tidak punya kekuatan daripada devian yang mempunyai kekuatan, misalnya *white-collar criminal*.

16. Kritik yang ke tiga (3) pelabelan mempunyai akibat positif bagi pihak yang memberikan label, yaitu memperkuat tata sosial dan stabilitas sosial. Hal tersebut benar hanya terbatas pada dua alasan, yaitu (a) karena pihak yang mencap ada pada posisi yang kuat sedang

yang dicap pada posisi yang lemah, (b) dengan menghukum devian yang lemah maka pihak yang kuat tidak akan melakukan deviasi seperti pihak yang kuat tidak akan melakukan deviasi seperti pihak yang lemah. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa pihak yang berkuasa tidak akan melakukan deviasi. Mereka melakukan deviasi yang lebih canggih dan tersamar. Hal ini disebabkan karena perhatian masyarakat tertuju kepada deviasi dari golongan yang lemah.

17. Dalam pandangan Erikson, kejahatan menyebabkan stabilitas dan solidaritas masyarakat menguat. Sedangkan dalam pandangan John Conklin, kejahatan memperlemah solidaritas sosial. Sebagai bukti ia ambil contoh kota kecil Boise, kota itu diguncang skandal homoseks antara orang dewasa dengan anak-anak. Kejadian ini berakibat, semua orang bujangan dicurigai, polisi dinilai tidak becus, dan semua anak-anak dicurigai. Yang dimaksud Erikson, solidaritas dikalangan golongan konvensional. Pemberian label kepada golongan yang lemah menyebabkan penegak hukum lebih banyak memusatkan perhatian kepada pihak yang lemah sehingga deviasi dari pihak golongan yang kuat bisa lolos dari perhatian mereka.

BAB IX

TEORI FENOMENOLOGI

Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan bentuk atau tipe subjek yang ditemui Lexy J Moleong, (2007). Fenomenologi diartikan sebagai, yaitu (1) pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal, (2) suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang yang dikatakan Husserl dalam Moleong, (2007). Menurut Moleong, peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Inkuiri fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti.

Menurut Smith fenomenologi Husserl adalah sebuah upaya untuk memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama. Secara literal fenomenologi adalah studi tentang fenomena, atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi kita di dalam pengalaman subjektif, atau tentang bagaimana kita mengalami segala sesuatu di sekitar

kita. Setiap orang pada dasarnya pernah melakukan praktek fenomenologi. Ketika anda bertanya “Apakah yang aku rasakan sekarang?”, “Apa yang sedang kupikirkan?”, “Apa yang akan kulakukan?”, maka sebenarnya anda melakukan fenomenologi, yakni mencoba memahami apa yang anda rasakan, pikirkan, dan apa yang akan anda lakukan dari sudut pandang orang pertama.

Hal ini berangkat dari arti asal kata fenomenologis, yaitu fenomena atau gejala alamiah. Jadi para fenomenolog berusaha memahami fenomena yang melingkupi subyek yang diamatinya. Sehingga yang ditekankan adalah aspek subyektif dari perilaku orang. Para fenomenolog berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.

Jadi yang ditekankan dalam fenomenologi adalah pemahaman terhadap pengalaman subyektif atas peristiwa dan kaitan-kaitannya yang melingkupi subyek. Sebagai contoh, penelitian mengenai fenomena komunikasi yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Peneliti berusaha memahami bagaimana

penerima pesan merespon setiap pesan yang disampaikan. Dari hasil pengamatan, peneliti menemukan fakta bahwa penerima pesan memiliki pengalaman negatif atau buruk terhadap pesan-pesan yang (ternyata) tak dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pula pandangan mereka terhadap kredibilitas pemberi pesan atau komunikator. Terhadap pemberi pesan yang memiliki kredibilitas rendah tersebut, setiap pesan yang disampaikan selalu direspon secara negatif dapat juga dikatakan tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, pesan-pesan yang menyertakan pembuktian langsung dan nyata, membuat penerima pesan segera merasakan kebenaran pesan tersebut sehingga kepercayaan pun dapat muncul seketika. Dari fenomena tersebut, peneliti memunculkan teori atau model Komunikasi Berasa, yakni model komunikasi dengan pembuktian langsung dan nyata sehingga setiap pesan yang disampaikan langsung dirasakan kebenarannya oleh penerima pesan.

Contoh lain penelitian fenomenologi adalah penelitian biografis tentang grup musik Slank, untuk memahami pengalaman kreatif kesenimanannya mereka dan bagaimana mereka memandang peristiwa-peristiwa negatif (terlibat narkoba, seks bebas, dan lain-lain) yang menimpa mereka

maupun seniman-seniman lain, serta bagaimana mereka mengatasinya. Fenomenologi berusaha memahami budaya lewat pandangan pemilik budaya atau pelakunya. Menurut paham fenomenologi (Endraswara S, 2010), ilmu bukanlah *values free*, bebas nilai dari apa pun, melainkan *values bound*, memiliki hubungan dengan nilai. Aksioma dasar fenomenologi adalah: (a) kenyataan ada dalam diri manusia baik sebagai individu maupun kelompok selalu bersifat majemuk atau ganda yang tersusun secara kompleks, dengan demikian hanya bisa diteliti secara holistik dan tidak terlepas-lepas; (b) hubungan antara peneliti dan subyek inkuiri saling mempengaruhi, keduanya sulit dipisahkan; (c) lebih ke arah pada kasus-kasus, bukan untuk menggeneralisasi hasil penelitian; (d) sulit membedakan sebab dan akibat, karena situasi berlangsung secara simultan; (e) inkuiri terikat nilai, bukan *values free*.

Jika fenomenologi fokus pada pemahaman terhadap pengalaman subyektif atas suatu peristiwa, maka interaksi simbolik fokus pada *penafsiran* terhadap pemaknaan subyektif yang muncul dari hasil interaksi dengan orang lain atau lingkungannya. Hal tersebut dapat dipahami, karena menurut Phillipson (Walsh,1972:121) istilah fenomena itu berkaitan dengan suatu persepsi yaitu kesadaran. Fenomenologi akan

berupaya menggambarkan fenomena kesadaran dan bagaimana fenomena itu tersusun. Dengan adanya kesadaran ini, tidak mengherankan jika pemerhati kebudayaan dan pelaku budaya juga memiliki kesadaran tertentu terhadap yang mereka alami. Pengalaman yang dipengaruhi oleh kesadaran itu, pada saatnya akan memunculkan permasalahan baru dan di antaranya akan terkait dengan ihwal seluk beluk kebudayaan itu sendiri.

Interaksi simbolik adalah interaksi yang memunculkan makna khusus dan menimbulkan interpretasi atau penafsiran. Simbolik berasal dari kata 'simbol' yakni tanda yang muncul dari hasil kesepakatan bersama. Bagaimana suatu hal menjadi perspektif bersama, bagaimana suatu tindakan memberi makna-makna khusus yang hanya dipahami oleh orang-orang yang melakukannya, bagaimana tindakan dan perspektif tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi subyek, semua dikaji oleh para interaksionis simbolik. Jadi peneliti berusaha 'memasuki' *proses* pemaknaan dan pendefinisian subyek melalui metode observasi partisipan. Hal yang tidak kalah penting dalam interaksi simbolik adalah pengonsepsian diri subyek. Bagaimana subyek melihat, memaknai dan

mendefinisikan dirinya berdasarkan definisi dan makna yang diberikan orang lain.

Contoh dalam penelitian mengenai Iklan dan Prostitusi. Subyek menggunakan 'iklan panti pijat' sebagai media (simbol) penawaran jasa prostitutifnya. Subyek yang lain memanfaatkan 'tampil di cover majalah pria' sebagai media lain penawaran atau komunikasi pemasaran jasa prostitutifnya. Subyek yang lain lagi 'menjual diri' dengan tampil di situs jejaring sosial Friendster dengan foto-foto yang 'mengundang' sebagai media komunikasi pemasaran atau iklan jasa prostitutifnya. Bagaimana subyek membentuk simbol-simbol pengiklanan diri tersebut, bagaimana pelanggan dapat menangkap makna simbol-simbol tersebut sehingga terjadi interaksi dan transaksi 'gelap' dengan menggunakan simbol-simbol eksklusif lain, bagaimana subyek memandang dan mendefinisikan diri mereka berdasarkan pandangan orang lain, apakah mereka lebih senang disebut pelacur, pelacur kelas atas, escort, pemijat plus, model plus, atau sekadar 'teman jalan'? Adakah istilah-istilah dan bahasa-bahasa isyarat tertentu yang mereka gunakan? Bagaimana dengan keluarga dan teman-teman mereka di luar lingkungan prostitutif mereka? Apakah mereka menyembunyikan profesi mereka atau terbuka? Berapa banyak

pelanggan dan penghasilan mereka dari hasil beriklan? Adakah pengaruh iklan terhadap kenaikan penghasilan mereka? Digunakan untuk apa saja penghasilan mereka? Lebih banyak untuk membantu perekonomian diri dan keluarga, atau lebih banyak untuk bersenang-senang?

Jadi, perbedaan mendasar antara fenomenologi dan interaksi simbolik muncul dari makna katanya sendiri “fenomena dan interaksi”. Fenomenologi bertumpu pada *pemahaman* terhadap pengalaman subyektif atas gejala alamiah (*fenomena*).

Dalam kajian deviasi, perspektif fenomenologi ini pada akhir tahun 1960 an sejumlah ahli sosiologi melangkah lebih jauh dari teori label. Mereka mengembangkan teori fenomenologi ini yang sedikit berbeda dengan teori label yang menekankan deviasi dilihat dari reaksi masyarakat terhadap deviasi dan dampaknya terhadap devian maupun pihak yang memberi label (cap/definisi sosial). Sementara itu fenomenologi menekankan kajian tentang reaksi devian terhadap deviasinya sendiri. Pandangan positivistik yang dianut para tokoh tradisional memandang deviasi secara obyektif dan deterministik, artinya devian dipandang sebagai obyek yang

ditentukan oleh kekuatan-kekuatan dari lingkungannya, pandangan ini berpikir secara kausalitas (berpikir sebab akibat).

Teori fenomenologi dalam studi deviasi sebagaimana uraian di atas memandang bahwa pengalaman subyektif devian merupakan inti realitas deviasi, sedangkan positivis tidak. Perbedaan pandangan ini berdasarkan dua alasan, yaitu (1) keduanya mempunyai pandangan yang berbeda tentang manusia: positivis memandang manusia sebagai objek yang pasif yang tingkahlakunya ditentukan oleh kekuatan lingkungannya ini dikatakan dengan *determinisme*: fenomenologist memandang manusia sebagai subjek yang aktif yang menentukan tingkahlakunya sendiri dan ini disebut dengan *volantarisme*. Perbedaan antara determinisme dengan volantarisme secara filsafat tidak dapat dibuktikan secara empirik. (2) dalam pandangan fenomenologist, makna fenomena deviasi itu secara fundamental mengandung masalah, artinya di dalamnya terkandung ketidak pastian dan ketidaksesuaian pendapat tentang makna deviasi itu.

Ketidak pastian dan ketidaksesuaian pendapat itu dialami sendiri oleh positivis dalam usaha mereka memahami deviasi secara objektif. Misalnya, dokter – homoseksual – petugas statistik berbeda pendapat tentang bunuh diri, pada hal

positivis mengandalkan diri pada mereka. Kematian yang disebabkan oleh diri sendiri yang direncanakan disebut bunuh diri. Tetapi direncanakan atau tidak sulit dibuktikan jika yang bersangkutan sudah meninggal. Perbedaan pendapat tentang bunuh diri dan kematian mendadak, karena deviasi itu maknanya bersifat problematik, tidak pasti, dan memang konflik, maka kaum positivis tidak bisa mencapai esensi dari fenomena deviasi. Jadi apa yang dianggap objektif (sama bagi semua orang) itu menyesatkan.

Di dalam fenomenologi (Reza A.A Wattimena, 2010) konsep makna (*meaning*) adalah konsep yang sangat penting. "Makna", demikian tulis Smith tentang Husserl, "adalah isi penting dari pengalaman sadar manusia.." Pengalaman seseorang bisa sama, seperti ia bisa sama-sama mengendari sepeda motor. Namun makna dari pengalaman itu berbeda-beda bagi setiap orang. Maknalah yang membedakan pengalaman orang satu dengan pengalaman orang lainnya. Makna juga yang membedakan pengalaman yang satu dan pengalaman lainnya. Suatu pengalaman bisa menjadi bagian dari kesadaran, juga karena orang memaknainya. Hanya melalui tindak memaknailah kesadaran orang bisa menyentuh dunia sebagai suatu struktur teratur (*organized structure*) dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Namun begitu menurut

Husserl, makna bukanlah obyek kajian ilmu-ilmu empiris. Makna adalah obyek kajian logika murni (*pure logic*). Pada era sekarang logika murni ini dikenal juga sebagai semantik (*semantics*). Maka dalam arti ini, fenomenologi adalah suatu sintesis antara psikologi, filsafat, dan semantik (atau logika murni).

Pendapat bahwa makna fenomena deviasi itu bersifat problematik tidak baru. Pendapat itu telah dikemukakan oleh teori label. Tetapi fenomenologi melangkah lebih lanjut lagi tentang hakekat makna itu. Douglas membedakan dua macam makna, yaitu (1) makna abstrak (*abstract meaning*) adalah suatu makna yang terkait dengan fenomenon tertentu terlepas dari situasi konkrit dimana komunikator terlibat, (2) makna situasional (*situated meaning*) adalah makna yang terkait dengan situasi konkrit dimana komunikator terlibat.

Makna abstrak menunjukkan kepada idea objektif yang digunakan oleh positivis pada tingkahlaku yang dipelajarinya. Makna situasional menunjuk interpretasi subjektif dari devian terhadap tingkahlakunya sendiri. Ide objektif tentang devian hakekatnya adalah ide ilmiahnya sendiri yang jauh berbeda dengan konteks pengalaman langsung devian. Dengan demikian ide objektif dari positivisme tentang deviasi tidak

dapat mencapai makna yang sebenarnya daripada pengalaman subjektif devian.

Hanya interpretasi subjek dari devian mengenai pengalamannya sendiri yang dapat mencapai realitas deviasi. Menurut pendapat pakar fenomenologi, untuk memahami kenyataan fenomena devian kita harus mendasarkan diri kepada interpretasi subjektif daripada pengalaman subjektif devian sendiri. Tetapi keterlibatan pakar fenomenologi terhadap pandangan subjektif itu bersifat total dan mutlak. Mereka tidak selalu setuju dengan interpretasi subjektif devian. Pengalaman subjektif dapat memberikan gambaran salah, sebab devian tidak selalu mengetahui apa yang dikatakannya sendiri.

Dengan demikian pakar fenomenologi secara objektif harus menilai interpretasi devian tentang pengalamannya sendiri, memisahkan antara yang benar dan yang salah. Pakar fenomenologi berpendirian bahwa pendirian objektif mereka berbeda dengan pendirian positivis, yaitu (2) proposisi, metode dan pengetahuan mereka, (2) pakar fenomenologi berusaha menghapus dari pikiran mereka pengertian ilmiah dan keyakinan pribadi mereka, sehingga mampu menangkap makna pengalaman subjektif devian. Pendekatan subjektif mereka disebut reduksi fenomenologik, penggolongan fenomenologik, pendevian teoritik.

Penerepan Fenomenologi menurut Douglas menggunakan teori fenomenologi untuk menganalisis bunuh diri. Matza menggunakan teori fenomenologi untuk menganalisis penyalahgunaan marijuana. Douglas mengatakan, meskipun agama, hukum, dan nilai budaya mengutuk bunuh diri, kebanyakan orang tidak menekankan tanggung jawab seseorang yang membunuh dirinya sendiri. Mereka malah menyalahkan keluarga, famili, majikan, atau masyarakat sebagai penyebab seseorang untuk bunuh diri. Menyadari akan makna itu menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri untuk menarik perhatian akan pertolongan orang lain atau cara untuk membuat orang lain merasa bersalah. Melalui analisisnya itu Douglas menerapkan faham *voluntarisme*, yaitu bahwa manusia itu mempunyai kehendak merdeka, mempunyai tujuan atau makna yang direfleksikan dalam mengkonstruksi makna bunuh diri, dan ia berbuat sesuai dengan makna yang dikonstruksi itu.

Dalam menganalisis penyalahgunaan marijuana Matza menekankan kesadaran individu dalam memilih menjadi devian. Ada tiga tahap dalam proses menjadi pecandu marijuana, yaitu (1) tertarik, maksudnya individu tertarik terlibat, karena pengaruh lingkungan: keluarga, latar belakang kelas sosial, kelompok remaja, usaha mencari identitas diri dan lain-lain.

Tetapi individu mempunyai kemampuan untuk menahan diri untuk tidak terlibat di dalamnya. (2) Menggabungkan diri, artinya individu mulai menggunakan marijuana secara teratur, tetapi dia tidak memandang dirinya sebagai devian. (3) Signifikansi, artinya terjadi bila dia menyepakati sebutan masyarakat terhadap dirinya bahwa dia seorang devian (terjadi identitas diri sebagai devian). Signifikansi itu dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan dorongan dan menjatuhkan sanksi terhadap devian. Menyadari larangan itu devian masih mempunyai kemampuan menentukan apakah dia memandang dirinya sebagai devian seperti yang dituduhkan masyarakat atau tidak. Dengan demikian proses menjadi devian berubah-ubah dan tidak dapat diramalkan. Proses menjadi devian itu tetap terbuka.

Kritik-kritik terhadap teori fenomenologi, yaitu (1) fenomenologi mengkritik bahwa positivis tidak dapat mencapai hakekat realitas deviasi, tetapi pendirian fenomenologi sendiri juga tidak meyakinkan. Fenomenologi berkeyakinan bahwa teori ini bisa benar-benar terbuka dalam mencari kebenaran realitas deviasi, tetapi hal itu sangat diragukan bahwa mereka sama sekali tidak berprasangka. Fenomenologi sekedar ingin mengungkapkansı suatu versi tentang realitas manusia, tetapi tidak berarti lebih unggul dari teori yang lain. (2) Fenomenologi

berpendirian tentang otonomi individu dan kemerdekaan kehendak individu dan menolok pandangan deterministik. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa orang-orang dari lapisan bawah dalam keadaan tertekan dan didikte pihak lain, sehingga mereka tidak memiliki kemandirian itu. Jadi pandangan deterministik ternyata benar.

Sebagai suatu metode keilmuan, fenomenologi dapat mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya dengan tidak memanipulasi data. Aneka macam teori dan pandangan yang pernah kita terima sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan dikesampingkan untuk mengungkap pengetahuan atau kebenaran yang benar-benar objektif.

Selain itu, fenomenologi memandang objek kajiannya sebagai kebulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Dengan demikian fenomenologi menuntut pendekatan yang holistik, bukan pendekatan partial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek yang diamati. Hal ini menjadi suatu kelebihan pendekatan fenomenologi, sehingga banyak dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan dewasa ini, terutama ilmuwan sosial, dalam berbagai kajian keilmuan mereka termasuk bidang kajian agama.

Dibalik kelebihan-kelebihannya, fenomenologi sebenarnya juga tidak luput dari berbagai kelemahan. Tujuan fenomenologi untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan sesuatu yang absurd. Sebab fenomenologi sendiri mengakui bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh tidak bebas nilai (*value-free*), tetapi bermuatan nilai (*value-bound*). Hal ini dipertegas oleh Derrida, yang menyatakan bahwa tidak ada penelitian yang tidak mempertimbangkan implikasi filosofis status pengetahuan. Kita tidak dapat lagi menegaskan objektivitas atau penelitian bebas nilai, tetapi harus sepenuhnya mengaku sebagai hal yang ditafsirkan secara subjektif dan oleh karenanya status seluruh pengetahuan adalah sementara dan relatif. Sebagai akibatnya, tujuan penelitian fenomenologis tidak pernah dapat terwujud.

Selanjutnya, fenomenologi memberikan peran terhadap subjek untuk ikut terlibat dalam objek yang diamati, sehingga jarak antara subjek dan objek yang diamati kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan cenderung subjektif, yang hanya berlaku pada kasus tertentu, situasi dan kondisi tertentu, serta dalam waktu tertentu. Dengan ungkapan lain, pengetahuan atau kebenaran

yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi.

Walaupun berfokus pada pengalaman subyektif orang pertama, fenomenologi tidak berhenti hanya pada deskripsi perasaan-perasaan inderawi semata. Pengalaman inderawi hanyalah titik tolak untuk sampai makna yang bersifat konseptual (*conceptual meaning*), yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu sendiri. Makna konseptual itu bisa berupa imajinasi, pikiran, hasrat, ataupun perasaan-perasaan spesifik, ketika orang mengalami dunianya secara personal.

Jika fenomenologi berfokus pada pengalaman manusia, lalu apa kaitan fenomenologi dengan psikologi sebagai ilmu tentang perilaku manusia? Husserl sendiri merumuskan fenomenologi sebagai tanggapan kritisnya terhadap psikologi positivistik, yang menolak eksistensi kesadaran, dan kemudian menyempitkannya semata hanya pada soal perilaku. Oleh sebab itu menurut Smith, fenomenologi Husserl lebih tepat disebut sebagai psikologi deskriptif, yang merupakan lawan dari psikologi positivistik.

Di dalam fenomenologi konsep makna (*meaning*) adalah konsep yang sangat penting. "Makna", demikian tulis Smith tentang Husserl, "adalah isi penting dari pengalaman sadar manusia.."Pengalaman seseorang bisa sama, seperti ia bisa

sama-sama mengendari sepeda motor. Namun makna dari pengalaman itu berbeda-beda bagi setiap orang. Maknalah yang membedakan pengalaman orang satu dengan pengalaman orang lainnya. Makna juga yang membedakan pengalaman yang satu dan pengalaman lainnya. Suatu pengalaman bisa menjadi bagian dari kesadaran, juga karena orang memaknainya. Hanya melalui tindak memaknailah kesadaran orang bisa menyentuh dunia sebagai suatu struktur teratur (*organized structure*) dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Namun begitu menurut Husserl, makna bukanlah obyek kajian ilmu-ilmu empiris. Makna adalah obyek kajian logika murni (*pure logic*). Pada era sekarang logika murni ini dikenal juga sebagai semantik (*semantics*). Maka dalam arti ini, fenomenologi adalah suatu sintesis antara psikologi, filsafat, dan semantik (atau logika murni).

Bagi Husserl fenomenologi adalah suatu bentuk ilmu mandiri yang berbeda dari ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Dengan fenomenologi Husserl mau menantang semua pendekatan yang bersifat biologis-mekanistik tentang kesadaran manusia, seperti pada psikologi positivistik maupun pada neurosains. Ia menyebut fenomenologi sebagai ilmu pengetahuan transendental (*transcendental science*), yang dibedakan dengan ilmu pengetahuan naturalistik (*naturalistic*

science), seperti pada fisika maupun biologi. Dan seperti sudah disinggung sebelumnya, perbedaan utama fenomenologi dengan ilmu-ilmu alam, termasuk psikologi positivistik, adalah peran sentral makna di dalam pengalaman manusia (*meaning in experience*). Fenomenologi tidak mengambil langkah observasi ataupun generalisasi di dalam penelitian tentang manusia, seperti yang lazim ditemukan pada psikologi positivistik.

Cita-cita Husserl adalah mengembangkan fenomenologi sebagai suatu disiplin ilmiah yang lengkap dengan metode yang jelas dan akurat. Di dalam ilmu-ilmu alam, seperti kimia, fisika, dan biologi, kita mengenal adalah metode penelitian ilmu-ilmu alam yang sifatnya empiris dan eksperimental. Inti metode penelitian ilmu-ilmu alam adalah melakukan observasi yang sifatnya sistematis, dan kemudian menganalisisnya dengan suatu kerangka teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Husserl ingin melepaskan diri dari cara berpikir yang melandasi metode penelitian semacam itu. Baginya untuk memahami manusia, fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari orang yang mengalaminya.

Di dalam kerangka berpikir ini, seorang ilmuwan sekaligus adalah sekaligus peneliti dan yang diteliti. Ia adalah subyek

sekaligus obyek dari penelitian. Dan seperti sudah ditegaskan sebelumnya, fenomenologi adalah cara untuk memahami kesadaran manusia dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Namun menurut penelitian Smith, Husserl membedakan tingkat-tingkat kesadaran (*state of consciousness*). Yang menjadi fokus fenomenologi bukanlah pengalaman partikular, melainkan struktur dari pengalaman kesadaran, yakni realitas obyektif yang mawujud di dalam pengalaman subyektif orang per orang. Konkretnya fenomenologi berfokus pada makna subyektif dari realitas obyektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dalam kosa kata Husserl, “obyek kesadaran sebagaimana dialami.”

Fenomenologi Husserlian adalah ilmu tentang esensi dari kesadaran. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan esensi dari kesadaran? Berdasarkan penelitian Smith fenomenologi Husserl dibangun di atas setidaknya dua asumsi. *Yang pertama*, setiap pengalaman manusia sebenarnya adalah satu ekspresi dari kesadaran. Seseorang mengalami sesuatu. Ia sadar akan pengalamannya sendiri yang memang bersifat subyektif. Dan *yang kedua*, setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Ketika berpikir tentang makanan, anda membentuk gambaran tentang makanan di

dalam pikiran anda. Ketika melihat sebuah mobil, anda membentuk gambaran tentang mobil di dalam pikiran anda. Inilah yang disebut Husserl sebagai intensionalitas (*intentionality*), yakni bahwa kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu.

Tindakan seseorang dikatakan intensional, jika tindakan itu dilakukan dengan tujuan yang jelas. Namun di dalam filsafat Husserl, konsep intensionalitas memiliki makna yang lebih dalam. Intensionalitas tidak hanya terkait dengan tujuan dari tindakan manusia, tetapi juga merupakan karakter dasar dari pikiran itu sendiri. Pikiran tidak pernah pikiran itu sendiri, melainkan selalu merupakan pikiran atas sesuatu. Pikiran selalu memiliki obyek. Hal yang sama berlaku untuk kesadaran. Intensionalitas adalah keterarahan kesadaran (*directedness of consciousness*). Dan intensionalitas juga merupakan keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertujuan pada satu obyek.

Namun Husserl juga melihat beberapa pengalaman konkret manusia yang tidak mengandaikan intensionalitas, seperti ketika anda merasa mual ataupun pusing. Kedua pengalaman itu bukanlah pengalaman tentang suatu obyek yang konkret. Namun pengalaman itu sangatlah jarang, kecuali anda yang menderita penyakit tertentu. Mayoritas pengalaman manusia

memiliki struktur. Mayoritas pengalaman manusia melibatkan kesadaran, dan kesadaran selalu merupakan kesadaran atas sesuatu. Husserl menyebut setiap proses kesadaran yang terarah pada sesuatu ini sebagai tindakan (*act*). Dan setiap tindakan manusia selalu berada di dalam kerangka kebiasaan (*habits*), termasuk di dalamnya gerak tubuh dan cara berpikir.

Fenomenologi adalah analisis atas esensi kesadaran sebagaimana dihayati dan dialami oleh manusia, dan dilihat dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Fenomenologi menganalisis struktur dari persepsi, imajinasi, penilaian, emosi, evaluasi, dan pengalaman orang lain yang terarah pada sesuatu obyek di luar. Dengan demikian menurut Smith, fenomenologi Husserl adalah suatu penyelidikan terhadap relasi antara kesadaran dengan obyek di dunia luar, serta apa makna dari relasi itu. Konsep bahwa kesadaran selalu terarah pada sesuatu merupakan konsep sentral di dalam fenomenologi Husserl.

Fenomenologi (Inggris: *Phenomenology*) berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* dan *logos*. *Phainomenon* berarti tampak dan *phainen* berarti memperlihatkan. Sedangkan *logos* berarti kata, ucapan, rasio, pertimbangan. Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa-apa yang nampak. Lorens Bagus

memberikan dua pengertian terhadap fenomenologi. Dalam arti luas, fenomenologi berarti ilmu tentang gejala-gejala atau apa saja yang tampak. Dalam arti sempit, ilmu tentang gejala-gejala yang menampakkan diri pada kesadaran kita.

Sebagai sebuah arah baru dalam filsafat, fenomenologi dimulai oleh Edmund Husserl (1859 – 1938), untuk mematok suatu dasar yang tak dapat dibantah, ia memakai apa yang disebutnya metode fenomenologis. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh besar dalam mengembangkan fenomenologi. Namun istilah fenomenologi itu sendiri sudah ada sebelum Husserl. Istilah fenomenologi secara filosofis pertama kali dipakai oleh J.H. Lambert (1764). Dia memasukkan dalam kebenaran (alethiologia), ajaran mengenai gejala (fenomenologia). Maksudnya adalah menemukan sebab-sebab subjektif dan objektif ciri-ciri bayangan objek pengalaman inderawi (fenomen).

Immanuel Kant memakai istilah fenomenologi dalam karyanya Prinsip-Prinsip Pertama Metafisika (1786). Maksud Kant adalah untuk menjelaskan kaitan antara konsep fisik gerakan dan kategori modalitas, dengan mempelajari ciri-ciri dalam relasi umum dan representasi, yakni fenomena indera-indera lahiriah.

Hegel (1807) memperluas pengertian fenomenologi dengan merumuskannya sebagai ilmu mengenai pengalaman kesadaran, yakni suatu pemaparan dialektis perjalanan kesadaran kodrati menuju kepada pengetahuan yang sebenarnya. Fenomenologi menunjukkan proses menjadi ilmu pengetahuan pada umumnya dan kemampuan mengetahui sebagai perjalanan jiwa lewat bentuk-bentuk atau gambaran kesadaran yang bertahap untuk sampai kepada pengetahuan mutlak. Bagi Hegel, fenomena tidak lain merupakan penampakan atau kegejalaan dari pengetahuan inderawi: fenomena-fenomena merupakan manifestasi konkret dan historis dari perkembangan pikiran manusia.

Edmund Husserl memahami fenomenologi sebagai suatu analisis deskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman-pengalaman langsung; religius, moral, estetis, konseptual, serta indrawi. Perhatian filsafat, menurutnya, hendaknya difokuskan pada penyelidikan tentang *Labenswelt* (dunia kehidupan) atau *Erlebnisse* (kehidupan subjektif dan batiniah). Penyelidikan ini hendaknya menekankan watak intensional kesadaran, dan tanpa mengandaikan praduga-praduga konseptual dari ilmu-ilmu empiris.

Fenomenologi merupakan metode dan filsafat. Sebagai metode, fenomenologi membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga kita sampai pada fenomena yang murni. Fenomenologi mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomen-fenomen sebagaimana fenomen-fenomen itu sendiri menyingkapkan diri kepada kesadaran. Kita harus bertolak dari subjek (manusia) serta kesadarannya dan berupaya untuk kembali kepada “kesadaran murni”. Untuk mencapai bidang kesadaran murni, kita harus membebaskan diri dari pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari. Sebagai filsafat, fenomenologi menurut Husserl memberi pengetahuan yang perlu dan esensial mengenai apa yang ada. Dengan demikian fenomenologi dapat dijelaskan sebagai metode kembali ke benda itu sendiri (Zu den Sachen Selbt), dan ini disebabkan benda itu sendiri merupakan objek kesadaran langsung dalam bentuk yang murni.

Secara umum pandangan fenomenologi bisa dilihat pada dua posisi. Pertama ia merupakan reaksi terhadap dominasi positivisme, dan kedua, ia sebenarnya sebagai kritik terhadap pemikiran kritisisme Immanuel Kant, terutama konsepnya tentang fenomena – noumena. Kant menggunakan kata fenomena untuk menunjukkan penampakan sesuatu dalam kesadaran, sedangkan noumena adalah realitas (das Ding an

Sich) yang berada di luar kesadaran pengamat. Menurut Kant, manusia hanya dapat mengenal fenomena-fenomena yang nampak dalam kesadaran, bukan noumena yaitu realitas di luar yang kita kenal.

Husserl menggunakan istilah fenomenologi untuk menunjukkan apa yang nampak dalam kesadaran kita dengan membiarkannya termanifestasi apa adanya, tanpa memasukkan kategori pikiran kita padanya. Berbeda dengan Kant, Husserl menyatakan bahwa apa yang disebut fenomena adalah realitas itu sendiri yang nampak setelah kesadaran kita cair dengan realitas. Fenomenologi Husserl justru bertujuan mencari yang esensial atau eidos (esensi) dari apa yang disebut fenomena dengan cara membiarkan fenomena itu berbicara sendiri tanpa dibarengi dengan prasangka (presupposition).

Sebagai reaksi terhadap positivisme, filsafat fenomenologi berbeda dalam memandang objek, bila dibandingkan dengan filsafat positivisme, baik secara ontologis, epistemologis, maupun axiologis. Dalam tataran ontologism, yang berbicara tentang objek garapan ilmu, filsafat positivisme memandang realitas dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang berdiri sendiri, dan dapat dipelajari terpisah dari objek lain, serta dapat

dikontrol. Sebaliknya, filsafat fenomenologi memandang objek sebagai kebulatan dalam konteks natural, sehingga menuntut pendekatan yang holistik, bukan pendekatan partial.

Dalam tataran epistemologis, filsafat positivisme menuntut perencanaan penelitian yang rinci, konkrit dan terukur dari semua variabel yang akan diteliti berdasarkan kerangka teoritik yang spesifik. Tata cara penelitian yang cermat ini kemudian dikenal dengan penelitian kuantitatif. Teori yang dibangun adalah teori nomothetik, yaitu berdasarkan pada generalisasi atau dalil-dalil yang berlaku umum. Sebaliknya, filsafat fenomenologi menuntut pemaknaan dibalik realitas, sehingga perlu keterlibatan subjek dengan objek, dan subjek bertindak sebagai instrumen untuk mengungkap makna dibalik suatu realitas menurut pengakuan, pendapat, perasaan dan kemauan dari objeknya. Tatacara penelitian seperti ini kemudian dikenal dengan penelitian kualitatif. Teori yang dibangun adalah teori ideografik, yaitu upaya memberikan deskripsi kultural, human atau individual secara khusus, artinya hanya berlaku pada kasus yang diteliti.

Pada tataran axiologis, filsafat positivisme memandang kebenaran ilmu itu terbatas pada kebenaran empiric sensual – logik dan bebas nilai. Sebaliknya, filsafat fenomenologi mengakui kebenaran ilmu secara lebih luas, yaitu mengakui

kebenaran empirik sensual, kebenaran logik, kebenaran etik dan kebenaran transcendental. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang diperoleh tidak bebas nilai (value free), akan tetapi bermuatan nilai (value bond), tergantung pada aliran etik yang dianutnya, apakah naturalisme, hedonisme, utilitarianisme, idealisme, vitalisme, ataukah theologisme atau pandangan filsafat yang lain.

B. Fenomenologi Sebagai Metode Ilmu

Fenomenologi berkembang sebagai metode untuk mendekati fenomena-fenomena dalam kemurniannya. Fenomena disini dipahami sebagai segala sesuatu yang dengan suatu cara tertentu tampil dalam kesadaran kita. Baik berupa sesuatu sebagai hasil rekaan maupun berupa sesuatu yang nyata, yang berupa gagasan maupun kenyataan. Yang penting ialah pengembangan suatu metode yang tidak memalsukan fenomena, melainkan dapat mendeskripsikannya seperti penampilannya tanpa prasangka sama sekali. Seorang fenomenolog hendak menanggalkan segenap teori, praanggapan serta prasangka, agar dapat memahami fenomena sebagaimana adanya: "Zu den Sachen Selbst" (kembali kepada bendanya sendiri).

Tugas utama fenomenologi menurut Husserl adalah menjalin keterkaitan manusia dengan realitas. Bagi Husserl, realitas bukan suatu yang berbeda pada dirinya lepas dari manusia yang mengamati. Realitas itu mewujudkan diri, atau menurut ungkapan Martin Heidegger, yang juga seorang fenomenolog: “Sifat realitas itu membutuhkan keberadaan manusia”. Filsafat fenomenologi berusaha untuk mencapai pengertian yang sebenarnya dengan cara menerobos semua fenomena yang menampakkan diri menuju kepada bendanya yang sebenarnya. Usaha inilah yang dinamakan untuk mencapai “Hakikat segala sesuatu”.

Untuk itu, Husserl mengajukan dua langkah yang harus ditempuh untuk mencapai esensi fenomena, yaitu metode epoche dan eidetich vision. Kata epoche berasal dari bahasa Yunani, yang berarti: “menunda keputusan” atau “mengosongkan diri dari keyakinan tertentu”. Epoche bisa juga berarti tanda kurung (bracketing) terhadap setiap keterangan yang diperoleh dari suatu fenomena yang nampak, tanpa memberikan putusan benar salahnya terlebih dahulu. Fenomena yang tampil dalam kesadaran adalah benar-benar natural tanpa dicampuri oleh presupposisi pengamat. Untuk itu, Husserl menekankan satu hal penting: Penundaan keputusan.

Keputusan harus ditunda (epoche) atau dikurung dulu dalam kaitan dengan status atau referensi ontologis atau eksistensial objek kesadaran.

Selanjutnya, menurut Husserl, epoche memiliki empat macam, yaitu (1). Method of historical bracketing; metode yang mengesampingkan aneka macam teori dan pandangan yang pernah kita terima dalam kehidupan sehari-hari, baik dari adapt, agama maupun ilmu pengetahuan, (2) Method of existensial bracketing; meninggalkan atau abstain terhadap semua sikap keputusan atau sikap diam dan menunda, (3) Method of transcendental reduction; mengolah data yang kita sadari menjadi gejala yang transcendental dalam kesadaran murni, (4) Method of eidetic reduction; mencari esensi fakta, semacam menjadikan fakta-fakta tentang realitas menjadi esensi atau intisari realitas itu.

Dengan menerapkan empat metode epoche tersebut seseorang akan sampai pada hakikat fenomena dari realitas yang dia amati.

C. Kontribusi Fenomenologi Terhadap Dunia Ilmu Pengetahuan

Memperbincangkan fenomenologi tidak bisa ditinggalkan pembicaraan mengenai konsep Lebenswelt (“dunia

kehidupan”). Konsep ini penting artinya, sebagai usaha memperluas konteks ilmu pengetahuan atau membuka jalur metodologi baru bagi ilmu-ilmu sosial serta untuk menyelamatkan subjek pengetahuan.

Edmund Husserl, dalam karyanya, *The Crisis of European Science and Transcendental Phenomenology*, menyatakan bahwa konsep “dunia kehidupan” (*lebenswelt*) merupakan konsep yang dapat menjadi dasar bagi (mengatasi) ilmu pengetahuan yang tengah mengalami krisis akibat pola pikir positivistik dan saintistik, yang pada prinsipnya memandang semesta sebagai sesuatu yang teratur – mekanis seperti halnya kerja mekanis jam. Akibatnya adalah terjadinya 'matematisasi alam' dimana alam dipahami sebagai keteraturan (angka-angka). Pendekatan ini telah mendehumanisasi pengalaman manusia karena para saintis telah menerjemahkan pengalaman manusia ke formula-formula impersonal. Dunia kehidupan dalam pengertian Husserl bisa dipahami kurang lebih dunia sebagaimana manusia menghayati dalam spontanitasnya, sebagai basis tindakan komunikasi antar subjek. Dunia kehidupan ini adalah unsur-unsur sehari-hari yang membentuk kenyataan seseorang, yakni unsur dunia sehari-hari yang ia alami dan jalani, sebelum ia menteorikannya atau merefleksikannya secara filosofis.

Konsep dunia kehidupan ini dapat memberikan inspirasi yang sangat kaya kepada ilmu-ilmu sosial, karena ilmu-ilmu ini menafsirkan suatu dunia, yaitu dunia sosial. Dunia kehidupan sosial ini tak dapat diketahui begitu saja lewat observasi seperti dalam eksperimen ilmu-ilmu alam, melainkan terutama melalui pemahaman (*verstehen*). Apa yang ingin ditemukan dalam dunia sosial adalah makna, bukan kausalitas yang niscaya. Tujuan ilmuwan sosial mendekati wilayah observasinya adalah memahami makna. Seorang ilmuwan sosial, dalam hal ini, tidak lebih tahu dari pada para pelaku dalam dunia sosial itu. Oleh karena itu, dengan cara tertentu ia harus masuk ke dalam dunia kehidupan yang unsur-unsurnya ingin ia jelaskan itu. Untuk dapat menjelaskan, ia harus memahaminya. Untuk memahaminya, ia harus dapat berpartisipasi ke dalam proses yang menghasilkan dunia kehidupan itu.

Kontribusi dan tugas fenomenologi dalam hal ini adalah deskripsi atas sejarah *lebenswelt* (dunia kehidupan) tersebut untuk menemukan 'endapan makna' yang merekonstruksi kenyataan sehari-hari. Maka meskipun pemahaman terhadap makna dilihat dari sudut intensionalitas (kesadaran) individu, namun 'akurasi' kebenarannya sangat ditentukan oleh aspek intersubjektif. Dalam arti, sejauh mana 'endapan makna' yang ditemukan itu benar-benar di rekonstruksi dari dunia kehidupan

sosial, dimana banyak subjek sama-sama terlibat dan menghayati.

Demikianlah, dunia kehidupan sosial merupakan sumbangan dari fenomenologi, yang menempatkan fenomena sosial sebagai sistem simbol yang harus dipahami dalam kerangka konteks sosio-kultur yang membangunnnya. Ini artinya unsur subjek dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari proses terciptanya suatu ilmu pengetahuan sekaligus mendapatkan dukungan metodologisnya.

D. Kritik Terhadap Fenomenologi

Sebagai suatu metode keilmuan, fenomenologi dapat mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya dengan tidak memanipulasi data. Aneka macam teori dan pandangan yang pernah kita terima sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan dikesampingkan untuk mengungkap pengetahuan atau kebenaran yang benar-benar objektif. Selain itu, fenomenologi memandang objek kajiannya sebagai kebulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Dengan demikian fenomenologi menuntut pendekatan yang holistik, bukan pendekatan partial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek yang diamati. Hal ini menjadi suatu

kelebihan pendekatan fenomenologi, sehingga banyak dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan dewasa ini, terutama ilmuwan sosial, dalam berbagai kajian keilmuan mereka termasuk bidang kajian agama.

Dibalik kelebihan-kelebihannya, fenomenologi sebenarnya juga tidak luput dari berbagai kelemahan. Tujuan fenomenologi untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan sesuatu yang absurd. Sebab fenomenologi sendiri mengakui bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh tidak bebas nilai (*value-free*), tetapi bermuatan nilai (*value-bound*). Hal ini dipertegas oleh Derrida, yang menyatakan bahwa tidak ada penelitian yang tidak mempertimbangkan implikasi filosofis status pengetahuan. Kita tidak dapat lagi menegaskan objektivitas atau penelitian bebas nilai, tetapi harus sepenuhnya mengaku sebagai hal yang ditafsirkan secara subjektif dan oleh karenanya status seluruh pengetahuan adalah sementara dan relatif. Sebagai akibatnya, tujuan penelitian fenomenologis tidak pernah dapat terwujud.

Selanjutnya, fenomenologi memberikan peran terhadap subjek untuk ikut terlibat dalam objek yang diamati, sehingga

jarak antara subjek dan objek yang diamati kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan cenderung subjektif, yang hanya berlaku pada kasus tertentu, situasi dan kondisi tertentu, serta dalam waktu tertentu. Dengan ungkapan lain, pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi.

Ringkasan

1. Fenomenologi diartikan sebagai, pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal, suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang.
2. Fenomenologi adalah upaya untuk memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama.
3. Penekanan dalam fenomenologi adalah pemahaman terhadap pengalaman subyektif atas peristiwa dan kaitan-kaitannya yang melingkupi subyek.
4. Fenomenologi fokus pada pemahaman terhadap pengalaman subyektif atas suatu peristiwa, maka interaksi simbolik fokus pada *penafsiran* terhadap pemaknaan subyektif yang muncul dari hasil interaksi dengan orang lain atau lingkungannya.
5. Interaksi simbolik adalah interaksi yang memunculkan makna khusus dan menimbulkan interpretasi atau penafsiran.
6. Perbedaan antara fenomenologi dan interaksi simbolik muncul dari makna katanya sendiri “fenomena dan interaksi”. Fenomenologi bertumpu pada *pemahaman* terhadap pengalaman subyektif atas gejala alamiah (*fenomena*).
7. Pengembangan teori fenomenologi ini sedikit berbeda dengan teori label yang menekankan deviasi dilihat dari

reaksi masyarakat terhadap deviasi dan dampaknya terhadap devian maupun pihak yang memberi label (cap/definisi sosial).

8. Teori fenomenologi dalam studi deviasi sebagaimana uraian di atas memandang bahwa pengalaman subyektif devian merupakan inti realitas deviasi, sedangkan positivis tidak.
9. Perbedaan pendapat tentang bunuh diri dan kematian mendadak, karena deviasi itu maknanya bersifat problematik, tidak pasti, maka kaum positivis tidak bisa mencapai esensi dari fenomena deviasi.
10. Konsep makna (*meaning*) sangat penting, maka dalam arti ini, fenomenologi adalah suatu sintesis antara psikologi, filsafat, dan semantik (atau logika murni).
11. Makna fenomena deviasi itu bersifat problematik tidak baru, ada dua pembedaan makna, yaitu makna abstrak (*abstract meaning*), dan situasional (*situated meaning*).
12. Makna abstrak menunjukkan kepada idea objektif yang digunakan oleh positivis pada tingkahlaku yang dipelajarinya. Makna situasional menunjuk interpretasi subjektif dari devian terhadap tingkahlakunya sendiri.
13. Hanya interpretasi subjek dari devian mengenai pengalamannya sendiri yang dapat mencapai realitas deviasi.

14. Pakar fenomenologi berpendirian bahwa pendirian objektif mereka berbeda dengan pendirian positivis, yaitu (2) proposisi, metode dan pengetahuan mereka, (2) pakar fenomenologi berusaha menghapus dari pikiran mereka pengertian ilmiah dan keyakinan pribadi mereka, sehingga mampu menangkap makna pengalaman subjektif devian.
15. Faham *voluntarisme*, yaitu manusia itu mempunyai kehendak merdeka, mempunyai tujuan atau makna yang direfleksikan dalam mengkonstruksi makna bunuh diri, dan ia berbuat sesuai dengan makna yang dikonstruksi itu.
16. Menyadari larangan itu devian masih mempunyai kemampuan menentukan apakah dia memandang dirinya sebagai devian seperti yang dituduhkan masyarakat atau tidak. Dengan demikian proses menjadi devian berubah-ubah dan tidak dapat diramalkan. Proses menjadi devian itu tetap terbuka.
17. Kenyataan menunjukkan bahwa orang-orang dari lapisan bawah dalam keadaan tertekan dan didikte pihak lain, sehingga mereka tidak memiliki kemandirian itu.
18. Sebagai suatu metode keilmuan, fenomenologi dapat mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya dengan tidak memanipulasi data.

19. Fenomenologi menuntut pendekatan yang holistik, bukan pendekatan partial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek yang diamati.
20. Tujuan fenomenologi untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan sesuatu yang *absurd*.
21. Fenomenologi adalah suatu bentuk ilmu mandiri yang berbeda dari ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.
22. Untuk memahami manusia, fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari orang yang mengalaminya.
23. Di dalam kerangka berpikir ini, seorang ilmuwan sekaligus adalah yang diteliti.
24. Fenomenologi adalah analisis atas esensi kesadaran sebagaimana dihayati dan dialami oleh manusia, dan dilihat dengan menggunakan sudut pandang orang pertama.
25. Maksudnya adalah menemukan sebab-sebab subjektif dan objektif ciri-ciri bayangan objek pengalaman inderawi (fenomen).
26. Secara umum pandangan fenomenologi bisa dilihat pada dua posisi. Pertama ia merupakan reaksi terhadap dominasi positivisme, dan kedua, ia sebenarnya sebagai

kritik terhadap pemikiran kritisisme Immanuel Kant, terutama konsepnya tentang fenomena.

27. Sebagai reaksi terhadap positivisme, filsafat fenomenologi berbeda dalam memandang objek, bila dibandingkan dengan filsafat positivisme, baik secara ontologis, epistemologis, maupun axiologis.
28. Dalam tataran epistemologis, filsafat positivisme menuntut perencanaan penelitian yang rinci, konkrit dan terukur dari semua variabel yang akan diteliti berdasarkan kerangka teoritik yang spesifik.
29. Pada tataran axiologis, filsafat positivisme memandang kebenaran ilmu itu terbatas pada kebenaran empirik sensual–logik dan bebas nilai.
30. Fenomenologi berkembang sebagai metode untuk mendekati fenomena dalam kemurniannya.
31. Tugas utama fenomenologi adalah menjalin keterkaitan manusia dengan realitas.
32. Untuk itu, dua langkah yang harus ditempuh untuk mencapai esensi fenomena, yaitu metode epoche dan eidetich vision.
33. Selanjutnya, epoche memiliki empat macam, yaitu (1). *Method of historical bracketing*, (2) *Method of existensial*

bracketing, (3) Method of transcendental reduction, (4) Method of eidetic reduction.

34. Kontribusi dan tugas fenomenologi dalam hal ini adalah deskripsi atas sejarah lebenswelt (dunia kehidupan) tersebut untuk menemukan 'endapan makna' yang merekonstruksi kenyataan sehari-hari.
35. Sebagai suatu metode keilmuan, fenomenologi dapat mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya dengan tidak memanipulasi data.

BAB XIII

TEORI KONFLIK

Teori konflik tentang deviansi dan kejahatan bersumber pada ajaran Karl Marx, dan kemudian pada teori Rolf Dahrendorf. Dengan mengamati situasi Eropa pada abad 19, Marx menyimpulkan bahwa konflik kelas sosial merupakan proses sosial dasar dalam masyarakat merupakan satu-satunya kunci untuk memahami proses dan struktur sosial lainnya. Menurut Marx dalam masyarakat industri ada dua kelas ekonomi utama, yaitu kelas pemilikan alat-alat produksi atau disebut dengan kaum kapitalis dan kelas pekerja disebut dengan kaum buruh.

“Class conflict originates from the opposing interests of these two major classes. On the one hand, it is in the interest of the capitalist class to expand its control over the economic apparatus of society, to maximize profits, and, therefore, to keep the wages of laborers as low as possible. On the other hand, the working class, denied ownership and control of the products of its own labor, becomes alienated from the entire of productive process. As the dominant, bourgeoisie class pursues its interest and strengthens its monopolistic control over the economic order, it becomes increasingly in the interest of the working class to overthrow the capitalist system that holds it captive and exploit its labor.”

Lebih jauh ia (Marx) mengatakan, kepentingan kedua kelas tersebut secara diametral berlawanan. Kapitalis

berkepentingan menekan upah buruh serendah-rendahnya agar dapat kompetitif dipasaran nasional dan internasional, sedangkan buruh berkepentingan untuk mendapat upah yang layak. Maka konflik sosial tidak dapat dielakan.

Marx berpendapat, sistem hubungan ekonomi ini juga mempengaruhi institusi politik, budaya, dan agama. Masyarakat kapitalis cenderung mengembangkan hukum, agama, dan ilmu pengetahuan yang melindungi kepentingan kapitalis. Seperti, di dalam masyarakat Barat pemerintah melindungi hak milik kapitalis dan agama Kristen mendukung kapitalis dengan mengalihkan energi kaum buruh untuk kehidupan diakhirat dan tidak memikirkan penderitaan hidup di dunia. Karl Marx menyebut agama sebagai candu bagi masyarakat. Oleh karena itu, kaum buruh di arahkan untuk memikirkan.

Dahrendorf adalah tokoh utama teori konflik “wewenang” dan ‘posisi’ sebagai konseptual sentral teorinya. Ia melihat yang terlibat konflik adalah kelompok sempu yaitu para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok kepentingan, yang terdiri dari kelompok sempu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.

Karya Rolf Dahrendorf (1959) kadang-kadang dianggap sebagai adaptasi karya Marx untuk masyarakat industri abad

XX. Apabila Marx menekankan pentingnya peranan pemilikan alat-alat produksi, maka Dahrendorf menekankan peranan kekuasaan sebagai dasar pembagian masyarakat; bila Marx menekankan bahwa kekuasaan berasal dari pemilikan alat-alat produksi, maka Dahrendorf berpendapat bahwa dalam masyarakat industri sekarang kekuasaan kerap kali terpisah dari pemilikan alat produksi, melainkan bersumber dari kewibawaan industri. Dahrendorf membedakan, golongan yang memiliki kewibawaan dan golongan yang tidak memiliki kewibawaan dalam mengontrol tingkahlaku manusia dalam struktur institusi.

Lebih lanjut menurut Dahrendorf (Judistira K Garna, 1992) analisis masyarakat itu bertitik tolak dari kenyataan bahwa para anggotanya dapat dikelompokkan dalam dua katagori, yaitu mereka yang menguasai dan yang dikuasai. Dualisme ini ialah yang termasuk struktur hakekat hidup bersama, memberi akibat akan kepentingan yang berbeda dan saling berlawanan. Uraianannya itu merujuk kepada tiga konsep utama yaitu kekuasaan, kepentingan dan kelompok sosial. Pada gilirannya nanti tampak bahwa diferensiasi kepentingan dapat melahirkan kelompok konflik potensial maupun kelompok konflik aktual yang berbenturan karena mempunyai kepentingan antagonistik. Sedangkan fungsionalisme melihat

masyarakat atau satuan-satuannya itu sebagai sistem atau jaringan relasi-relasi yang terintegratif. Bagian-bagian itu berintegrasi dan saling tergantung, dan kesatuan digarisbawahi dan dipentingkan dari pada kejamakan.

Dahrendorf (1959,1968) berpendirian, bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Jadi, kita tak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.

Dahrendorf melihat masyarakat berisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama, sehingga segala sesuatunya dapat dianalisa dengan fungsionalisme struktural dan dapat pula dengan konflik. Harapannya bersama Coser, agar perspektif konflik dapat digunakan dalam rangka memahami dengan lebih baik fenomena sosial. Sebaliknya, Durkheim cenderung, melihat konflik yang berlebihan sebagai sesuatu yang tidak normal dalam integrasi masyarakat. Simmel juga berasumsi bahwa konflik dan ketegangan adalah sesuatu yang “abnormal” atau keduanya merusakkan persatuan kelompok, merupakan suatu perspektif yang penuh bias yang tidak didukung oleh kenyataan.

Menurut Dahrendorf (Ritzer and Goodman, 2007: 155), otoritas tidak konsisten karena ia terletak dalam posisi, bukan

dalam diri orangnya. Karena itu seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Begitu pula seseorang, yang berada dalam posisi subordinat dalam satu kelompok, mungkin menempati posisi yang superordinat dalam kelompok lain.

Struktur ekonomi penting, tetapi tidak berperan sentral. Dahrendorf menambahkan bahwa kewibawaan dalam suatu institusi (ekonomi misalnya) tidak dengan sendirinya overlap dengan kewibawaan dalam institusi yang lain, seperti pendidikan, agama, pemerintah). Dengan demikian konflik sosial itu terpecah-pecah.

Baik Marx maupun Dahrendorf tidak banyak menulis tentang kejahatan. Marx memandang kejahatan dan penjahat sebagai sesuatu yang tidak mempunyai relevansi dengan kekuatan-kekuatan sosial yang membentuk masyarakat dan sejarah. Dia memandang penjahat sebagai parasit yang menggunakan barang dan jasa tanpa memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dia tidak memandang kejahatan sebagai tingkahlaku politik dan tidak memandang penjahat sebagai terlibat pada perubahan sosial, melainkan sekedar sebagai usaha pemeliharaan diri sendiri. Kejahatan bahkan dapat menghambat perkembangan sosial masyarakat, karena

kebanyakan penjahat berasal dari kalangan buruh. Angka kejahatan yang tinggi akan menyebabkan membesarnya dan kuatnya angkatan kepolisian, hal itu justru akan mengokohkan kedudukan kapitalis.

Para ahli teori konflik tidak memperkembangkan teori Marx dan Dahrendorf tentang kriminalitas, melainkan mereka mengembangkan teori mereka tentang kejahatan berdasarkan teori umum Marx dan Dahrendorf tentang konflik sosial.

Pada umumnya para ahli teori konflik mempelajari proses sosial dan politik yang melahirkan kejahatan dan penjahat. Konsep yang paling penting dalam studi politik, yaitu kekuasaan menjadi sangat sentral dalam studi tentang kejahatan. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan sosial mana yang menentukan norma menjadi hukum, dan hukum mana yang diterapkan terhadap golongan masyarakat tertentu.

Pada pertengahan tahun 1960 an teori konflik menjadi sangat menonjol. Dalam masyarakat tradisional yang sederhana orang menganut nilai-nilai kutur yang sama, dengan demikian mereka menjalin hubungan sosial yang harmonik. Tetapi konsensus nilai dan keserasian sosial tidak terdapat dalam masyarakat industri modern. Dalam masyarakat industri modern dijumpai banyak konflik sosial dan kultural. Konflik sosial itu bersumber pada ketidak serasian kepentingan,

kebutuhan, dan keinginan dari golongan-golongan yang berbeda, seperti penguasa dengan serikat buruh, kelompok politik konservatif dengan liberal, dan lain-lain.

Konflik kebudayaan bersumber kepada perbedaan pendapat dalam norma dan nilai mengenai apa yang dianggap benar dan salah dari sub kultur yang berbeda. Konflik sosial kultural ini menjadi sumber tingkahlaku kriminal. Dengan demikian konflik dan tingkahlaku kriminal sebagai akibatnya merupakan bagian yang melekat dari kehidupan masyarakat modern. Ini menjadi dasar teori para penganut teori konflik. Tetapi para ahli teori konflik ini masih terpengaruh cara berfikir tradisional yang memberikan penjelasan kausal tentang tingkahlaku kriminal. Baru pada pertengahan tahun 1960 an para ahli teori konflik mulai memandang kriminalitas sebagai sebutan (difinisi). Sejak pertengahan tahun 1970 an sejumlah ahli teori konflik mulai mendasarkan diri pada ajaran Marx untuk menjelaskan sebab musabab deviansi.

Ada tiga versi teori konflik yang penting, yaitu teori unsur-unsur kriminalitas, teori realitas hukum (Chamblis), dan teori realitas sosial daripada kejahatan (Quinney). Unsur-unsur kriminalita (Agustin Turk) yang penting tidak mencari sebab-sebab kriminalitas, melainkan bagaimana seseorang memperoleh status kriminal. Ini tidak tergantung pada apa yang

dilakukan seseorang, melainkan ditentukan oleh penentuan penguasa terhadap seseorang sebagai kriminal.

Menurut teori Turk, makin besar perbedaan kultural antara penguasa dengan rakyat makin besar kemungkinan terjadinya konflik. Penguasa adalah pembuat hukum dan penegak hukum, sedang rakyat adalah pihak yang dikontrol hukum. Jika kedua pihak benar-benar berbuat seperti apa yang dikatakan, maka konflik akan terjadi. Tetapi bila ada kesenjangan antara kata dan perbuatan, maka konflik tidak terjadi, seperti polisi – remaja ganja. Karena penguasa mempunyai kemampuan mengkriminalisasikan rakyat dan bukan sebaliknya, maka kriminalisasi penguasa akan terjadi bila terjadi konflik. Tetapi konflik tidak selalu menghasilkan kriminalisasi, kecuali bila: penguasa memandang sesuatu hukum itu sangat penting – pelanggar dikriminalisasikan, penguasa memandang bahwa tingkahlaku rakyat yang dilarang hukum itu bersifat ofensif, makin besar perbedaan kekuasaan, makin besar kecenderungan mengkriminalisasikan pihak yang menentang, makin realistis gerakan salah satu pihak, makin cenderung berhasil pihak tertentu. Pada hakekatnya Turk memandang konflik antara penguasa dengan rakyat bagaikan dogfight, penguasa sebagai the topdog sedangkan rakyat sebagai the *underdog*.

Realitas hukum menurut William Chamblis banyak ahli hokum dan ilmu pengetahuan social tidak menyadari *dogfight*, mereka berpendapat hukum merupakan produk dari consensus social demi kepentingan umum.

Pandangan seperti itu hanya didapat dalam hukum di buku-buku seperti yang berdasarkan pada UUD, tetapi hukum dalam kenyataannya lain. Jadi ada kesenjangan antara hukum secara ideal dengan hukum secara aktual.

Kalau dipelajari hukum secara aktual akan terbukti, penegak hukum cenderung tidak adil, memihak golongan yang kaya dan berkuasa dan merugikan pihak yang miskin dan lemah. Ini seperti yang dikemukakan Turk dalam teori konfliknya. Hal itu tidak bersumber kepada sebab-sebab individual, melainkan mempunyai latarbelakang sejarah dan organisasi. Berdasarkan latarbelakang sejarah hukum mengabdikan kepada kepentingan golongan yang kaya dan berkuasa dan merugikan golongan yang miskin dan lemah.

Penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim cenderung menjadi alat dari golongan yang berkuasa dan mempunyai hak-hak istimewa. Ini merupakan keharusan organisasi, setiap organisasi menuntut anggotanya memaksimalkan ganjaran dan meminimalkan kesulitan bagi organisasinya. Maka merupakan ganjaran bagi penegak hukum jika mereka bisa menangkap

pelacur, penjudi, pemabuk, pencuri dan lain-lain sebagainya. Tetapi penegak hukum akan mengalami kesulitan bila akan menangkap koruptor dan kejahatan lain yang dilakukan oleh golongan atas. Jadi berdasarkan keharusan organisasi, para penegak hukum cenderung mengabdikan kepentingan golongan yang kaya dan berkuasa.

Realitas sosial kejahatan, menurut Richard Quinney mencari sumber ketidakadilan hukum pada sistem kapitalisme. Ia berpendapat, hukum pidana digunakan oleh negara dan kelas pengusaha untuk mempertahankan sistem kapitalisme. Karena masyarakat kapitalis itu menghadapi bahaya kontradiksi-kontradiksi dari dalam dirinya, maka hukum pidana digunakan sebagai usaha untuk mempertahankan tata masyarakat. Kritik Quinney terhadap kapitalisme itu didasarkan pada teori konfliknya tentang kriminalitas. Teorinya disebut realitas sosial tentang kriminalitas. Konsepnya itu memuat empat faktor yang saling berkaitan, yaitu (1) golongan yang berkuasa akan menentukan kriminal terhadap tingkahlaku yang mengancam kepentingannya, (2) untuk itu digunakan sebutan kriminal guna melindungi kepentingan mereka, (3) golongan yang lemah karena kondisi kehidupannya yang jelek terpaksa melakukan perbuatan yang tergolong kriminal, (4) golongan yang berkuasa menggunakan tindakan-tindakan terhadap

golongan yang lemah sebagai alasan untuk memandang bahwa tindakan golongan yang lemah itu berbahaya karena mengandung unsur-unsur kriminal.

Kemudian Quinney ingin bergerak lebih jauh, mengubah teori konfliknya menjadi tindakan politik. Ia berpendapat bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tidak saja pada masyarakat kapitalis, tetapi juga masyarakat sosialis seperti Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur, yaitu golongan yang berkuasa mengkriminalisasikan golongan yang lemah demi mempertahankan *statusqua* ketidakadilan. Ia menyarankan perlunya kesadaran revolusioner menuju masyarakat demokratik-sosialis.

Evaluasi terhadap konflik, yaitu (1) beberapa sosiolog berpendapat, konflik hanya bisa digunakan untuk menerangkan deviansi yang bersumber pada konflik politik dan ideologi, tetapi tidak bisa diterapkan untuk deviansi yang lain seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan dan lain-lain. Tetapi kritik tersebut tidak tepat karena – banyak kejahatan *bias* yang mempunyai latarbelakang politik – jenis-jenis kriminalitas itu seperti perjudian, mabuk dan sebagainya dapat dipandang membahayakan nilai-nilai kapitalisme (tanggungjawab, kerja keras, kerja produktif dan lain-lain) hukum untuk mencegah kejahatan seperti itu tujuannya melindungi nilai-nilai

kapitalisme, jadi mengabdikan golongan yang berkuasa. (2) orang menduga dalam masyarakat utopia – masyarakat sosialis tanpa kelas – disitu tidak ada lagi kriminalitas. Pernyataan itu tidak tepat, yang benar bukannya tidak ada kriminalitas sama sekali, melainkan kriminalitas akan berkurang. (3) teori konflik menjelaskan bagaimana pembentukan norma, aturan dan hukum dan bagaimana hubungan dengan golongan yang berkuasa dalam masyarakat. (4) teori itu juga menjelaskan pengangguran, surplus penduduk merupakan sumber kriminalitas.

Ringkasan

1. Konflik kelas sosial merupakan proses sosial dasar dalam masyarakat dan satu-satunya kunci untuk memahami proses dan struktur sosial lainnya, dan kepentingan kedua kelas secara diametral berlawanan.
2. Sistem hubungan ekonomi juga mempengaruhi institusi politik, budaya, dan agama.
3. Peranan kekuasaan sebagai dasar pembagian masyarakat, golongan yang memiliki kewibawaan dan golongan yang tidak memiliki kewibawaan dalam mengontrol tingkahlaku manusia dalam struktur institusi.
4. Dahrendorf menganalisis masyarakat, bertitik tolak dari kenyataan bahwa para anggotanya dapat dikelompokkan dalam dua katagori, yaitu mereka yang menguasai dan yang dikuasai.
5. Masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian, teori konflik dan teori konsensus.

6. Menurut Dahrendorf, otoritas tidak konsisten karena ia terletak dalam posisi, bukan dalam diri orangnya.
7. Kewibawaan dalam suatu institusi (ekonomi misalnya) tidak dengan sendirinya overlap dengan kewibawaan dalam institusi yang lain.
8. Kejahatan dan penjahat sebagai sesuatu yang tidak mempunyai relevansi dengan kekuatan-kekuatan sosial yang membentuk masyarakat dan sejarah.
9. Para ahli teori konflik tidak memperkembangkan teori Marx dan Dahrendorf tentang kriminalitas.
10. Konsep yang paling penting dalam studi politik, yaitu kekuasaan menjadi sangat sentral dalam studi tentang kejahatan.
11. Konflik sosial itu bersumber pada ketidak serasian kepentingan, kebutuhan, dan keinginan dari golongan-golongan yang berbeda.

12. Konflik kebudayaan bersumber kepada perbedaan pendapat dalam norma dan nilai mengenai apa yang dianggap benar dan salah dari sub kultur yang berbeda.
13. Ada tiga versi teori konflik yang penting, yaitu teori unsur-unsur kriminalitas, teori realitas hukum, dan teori realitas sosial.
14. Perbedaan kultural antara penguasa dengan rakyat makin besar kemungkinan terjadinya konflik.
15. Realitas hukum dan ilmu pengetahuan sosial tidak menyadari *dogfight*, mereka berpendapat hukum merupakan produk dari konsensus sosial demi kepentingan umum.
16. Ada kesenjangan antara hukum secara ideal dengan hukum secara aktual.
17. Kalau dipelajari hukum secara aktual akan terbukti, penegak hukum cenderung tidak adil, memihak golongan yang kaya dan berkuasa dan merugikan pihak yang miskin dan lemah.

18. Realitas sosial kejahatan, mencari sumber ketidakadilan hukum pada sistem kapitalisme, hukum pidana digunakan oleh negara dan kelas pengusaha untuk mempertahankan sistem kapitalisme.

19. Ada sesuatu yang tidak beres, tidak saja pada masyarakat kapitalis, tetapi juga masyarakat sosialis dan negara-negara Eropa Timur, yaitu golongan yang berkuasa mengkriminalisasikan golongan yang lemah demi mempertahankan *statusqua* ketidakadilan.

20. Evaluasi terhadap konflik, yaitu (1) konflik hanya bisa digunakan untuk menerangkan deviasi yang bersumber pada konflik politik dan ideologi. (2) orang menduga dalam masyarakat utopia – masyarakat sosialis tanpa kelas – disitu tidak ada lagi kriminalitas. (3) teori konflik menjelaskan bagaimana pembentukan norma, aturan dan hukum dan bagaimana hubungan dengan golongan yang berkuasa dalam masyarakat. (4) teori ini juga menjelaskan pengangguran, surplus penduduk merupakan sumber kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Thio, A. 1983. *Deviant Behavior*, Houghton Mifflin Compony, Boston, Dallas, Printed in The USA.
- Orcutt, JD. 1983. *Analyzing Deviance*, TheDorsey Press, Homewood, Illinois, Florida University.
- Liska AE. 1981. *Perspectives on Deviance*, Prentice-Hall, Inc, Englewood, New Jersey, State University of New York at Albany.
- Suwarsono dan Alvin Y So. 2000. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Garna JK. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Program Pascasarjana Universitas Pajajaran, Bandung.
- Siegel LJ. 1986. *Criminology*, West Publishing Company, St Paul New York Los Angles San Francisco.